RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029

H. Herman Deru
Gubernur Sumatera selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera selatan

"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinasi, fasilitasi serta administrasi pemerintahan yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunanan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Derah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui Penyelenggaran pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu penyusunan RPJPD wajib selaras dan berpedoman pada RPJP Tahun 2025-2045 (Pasal 10 Ayat 2) dengan mengusung Visi Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, dimana terdapat 5 sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi 5 sasaran Visi Daerah. Selanjutnya terdapat 8 Misi Pembangunan RPJPN 2025-2045 yang akan menjadi misi daerah beserta Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dengan 45 Indikator Utama Pembangunan menjadi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok di Daerah.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 didasari kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur, terarah, dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada hasil (outcome).

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dengan perkada menjadi pedoman kepala sekretariat daerah dalam menyusun renja sekretariat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap sekretariat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil *(oriented result)* yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan di laksanakan sampai dengan tahun 2029. Renstra Sekretariat Daerah, penyusunan diawali dengan Tahap Persiapan (pembentukan tim penyusun renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), orientasi Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kabupaten/Kota, perumusan isu strategis, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beriku target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum sekretariat daerah/lintas sekretariat daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra, pengesahan Renstra dan penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Renstra Sekretariat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesusaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Sekretariat Daerah dengan Renstra Sekretariat Daerah.

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Sekretariat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renstra juga merupakan bagian integral dari implementasi reformasi birokrasi yang menuntut adanya perencanaan yang adaptif terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika sosial-politik, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi,misi, dan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Visi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”.**

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tanggung jawab Kepala Daerah (Setiap Daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 bulan setelah Kepala Daerah dilantik)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengarusutamaaan Gender Di Daerah.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029',
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan pedoman bagi seluruh Biro Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (Lima) Tahun. Oleh karena itu, Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2025-2029 ini di maksudkan untuk :

a. Sebagai pedoman perencanaan jangka menengah sistematis, terukur,dan terarah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretrariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrument evaluasi kinerja organisasi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

c. Untuk menyelaraskan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai koordinat administratif pemerintahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

d. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan ukuran pencapaian rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan teratur.

f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu Tahun 2025-2029.

g. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasarannya unutk kurun waktu sampai Tahun 2029.

h. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas program/kegiatan Sekretariat Daerah secara terstruktur dan logis dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah

b. Memberikan kerangka strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unit koordinatif, administratif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja.

d. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal, secara periodik.

e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

f. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun dokumen rencana kerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kurun waktu tahun 2025-2029.

g. Menentukan strategis untuk pengelolaan kerberhasilan dan penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

1. Gambaran Layanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
   b. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
   c. Kinerja Pelayanan Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
   d. Kelompok Sasaran Layanan
   e. Mitra Perangkat Daerah
   f. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
   g. Kerjasama Daerah
2. Permasalahan Dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu–Isu Strategis

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk mengatur tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
4. Pelayanan administrasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksanaan;
6. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan Prasarana dan Sarana Pemerintah Provinsi; dan
7. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lainnya yang di berikan oleh Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga asisten yaitu :

a. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
   1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
   2. Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia
   3. Biro Kesejahteran Rakyat
b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari :
   1. Biro Perekonomian
   2. Biro Administrasi Pembangunan
   3. Biro Pengadaan Barang/Jasa
c. Asisten Administrasi Dan Umum yang terdiri dari :
   1. Biro Organisasi
   2. Biro Umum Dan Perlengkapan
   3. Biro Humas dan Protokol

Biro-Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, pemantuan dan evaluasi program kegiatan dan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.
   a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.
   b. Penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi

daerah ;

c. Penyelenggaraan pembinaan adminstrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang adminstrasi;
d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoodinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota. Biro hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
   b. Penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
   c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan

bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota

d. Pelaksana koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, memberikan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
   b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, pemuda dan olahraga ;
   c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
   d. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
   e. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan,

kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan. Biro Perekonomian mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
   b. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian,industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
   c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan

perhubungan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur sumatera selatan sesuai arahan dengan tugas dan fungsinya.

5. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
   a. Pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
   b. Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
   c. Pengevalusian bahan hasil pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
   d. Pengkoordinasain bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
   e. Pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
   f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Biro Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
   b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengdaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
   c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
   d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantuan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, sumber daya manusia dan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian,

administrasi pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur. Biro Organisasi mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur ;
b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
d. Penyelenggaraan pembinaan teknis, administratif dan sumber daya Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya manusia di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah. Biro Umum Dan

Perlengkapan memepunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis kebijakan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas, keprotokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik.

   Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol mempunyai fungsi:

   a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu dan informasi publik;
   b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat, protokolan pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
   c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik
   d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Struktur Organisasi dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

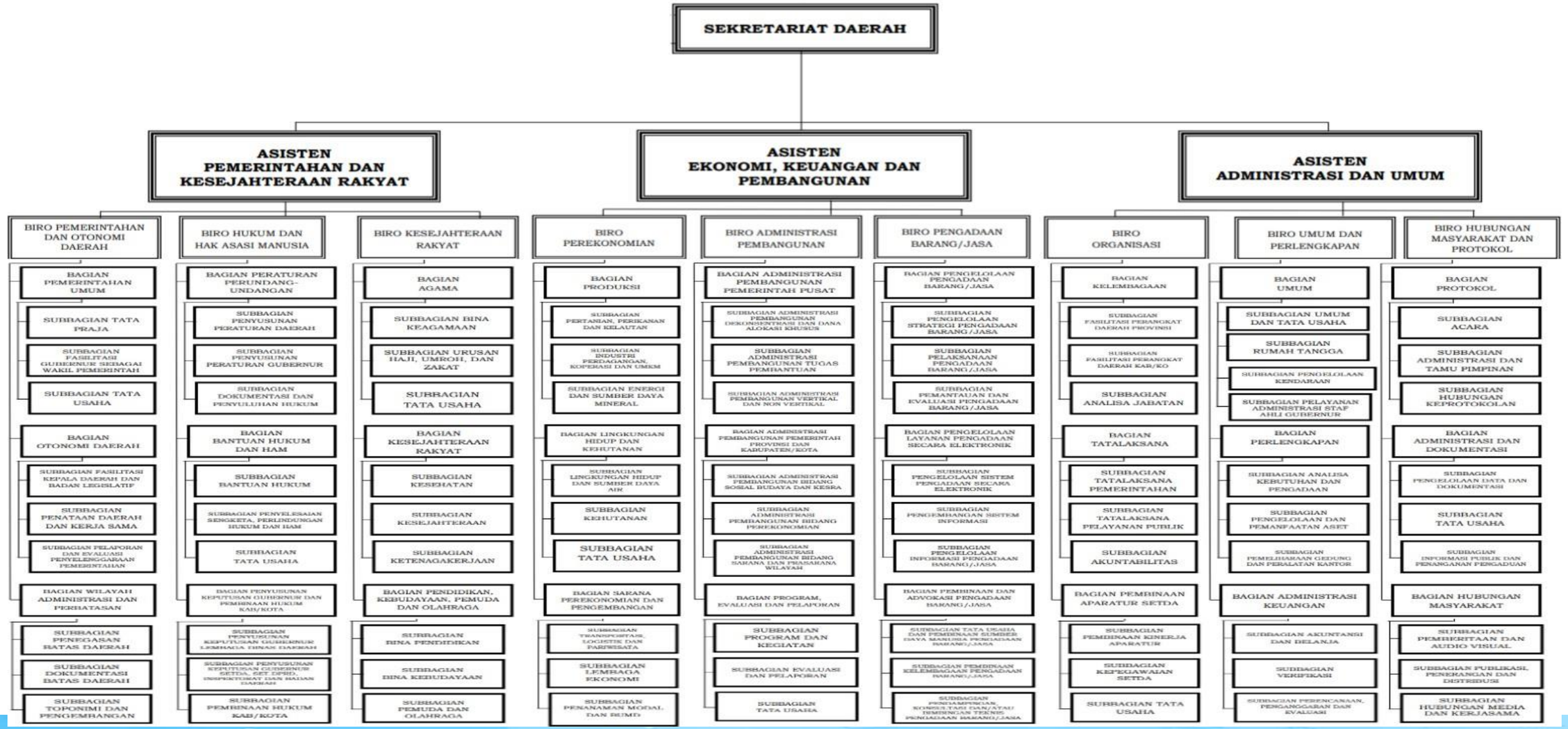

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Manusia yang merupakan aparatur yang ada di Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian Biro-Biro Setda
Provinsi Sumatera Selatan

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN					PENDIDIKAN				JENIS KELAMIN
1	*2*	*3*					*4*				*5*
1	**Kepala Biro**	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1	Orang		S.3	=	1	Orang	Perempuan
2	**Kepala Bagian**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
3			=	1	Orang		S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
4	**Kepala Sub Bagian**	Pembina Tiingkat I (IV/b)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
5		Pembina (IV/a)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
6			=	1	Orang		S.2	=	1	Orang	Perempuan
7		Penata Tingkat I (III/d)	=	4	Orang		S.1	=	4	Orang	Laki-Laki
8			=	1	Orang		S.1	=	1	Orang	Perempuan
9		Penata (III/c)	=	1	Orang		S.1	=	1	Orang	Laki-Laki
10	**Jabatan Fungsional Umum (JFU)**	Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
11			=	3	Orang		S.2	=	3	Orang	Perempuan
12		Penata Muda Tingkat I (III/b)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
13			=	2	Orang		S.1	=	2	Orang	Laki-Laki
14			=	1	Orang		D.3	=	1	Orang	Laki-Laki
15			=	1	Orang		D.3	=	1	Orang	Perempuan
16			=	1	Orang		SMU	=	1	Orang	Laki-Laki
17		Penata Muda (III/a)	=	2	Orang		S.1	=	2	Orang	Laki-Laki
18			=	1	Orang		S.1	=	1	Orang	Perempuan
19		Pengatur (II/c)	=	1	Orang		SMU	=	1	Orang	Laki-Laki
20			=	1	Orang		SMU	=	1	Orang	Perempuan
Jumlah				**27**	**Orang**				**27**	**Orang**	
21	**PPPK Tahap I**	Golongan IX	=	8	Orang		S.1	=	8	Orang	Laki-Laki
22			=	6	Orang		S.1	=	6	Orang	Perempuan
23		Golongan VII	=	1	Orang		D.3	=	1	Orang	Perempuan
24		Golongan V	=	3	Orang		SMU	=	3	Orang	Laki-Laki
25			=	3	Orang		SMU	=	3	Orang	Perempuan
Jumlah				**21**	**Orang**				**21**	**Orang**	
26	**PPPK Tahap II**	Golongan IX	=	1	Orang		S.1	=	1	Orang	Laki-Laki
27			=	1	Orang		S.1	=	1	Orang	Perempuan
28		Golongan V	=	1	Orang		SMU	=	1	Orang	Perempuan
Jumlah				**3**	**Orang**				**3**	**Orang**	
29	**PPPK Tahap II Optimalisasi BKN**		=	2	Orang		SMU	=	2	Orang	Perempuan
Jumlah				**2**	**Orang**				**2**	**Orang**	
30	**PPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)**	Golongan V	=	1	Orang		SMU	=	1	Orang	Laki-Laki
Jumlah				**1**	**Orang**				**1**	**Orang**	
31	**NON ASN**		=	1	Orang		S.1	=	1	Orang	Laki-Laki
			=	2	Orang		S.1	=	2	Orang	Perempuan
Jumlah				**3**	**Orang**				**3**	**Orang**	

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				PENDIDIKAN				JENIS KELAMIN		
1	*2*	*3*				*4*				*5*		
1	**Kepala Biro**	Pembina Tk.I (IV/b)	=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki :	1	Orang
2	**Kepala Bagian**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang	S.2	=	2	Orang	Laki-Laki :	2	Orang
		Jaksa Utama Pratama(IV/b)	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan :	1	Orang
3		Pembina (IV/a)	=	1	Orang							
4	**Kepala Sub Bagian**	Pembina (IV/a)	=	2	Orang	S.2	=	6	Orang	Laki-laki :	1	Orang
5		Penata Tk.I (III/d)	=	4	Orang	S.1	=	3	Orang	Perempuan :	8	Orang
6		Penata (III/c)	=	2	Orang							
7		Penata Muda Tk.I (III/b)	=	1	Orang							
10	**Staff**	Pembina (IV/a)	=	1	Orang	S.2	=	4	Orang	Laki-Laki :	4	Orang
11		Penata Tk.I (III/d)	=	1	Orang	S.1	=	4	Orang	Perempuan :	7	Orang
12		Penata (III/c)	=	3	Orang	SMA	=	3	Orang			
13		Penata Muda Tk.I (III/b)	=	4	Orang							
14		Penata Muda (III/a)	=	1	Orang							
15		Pengatur Tk.I (II/d)	=	1	Orang							
Jumlah				**24**	**Orang**			**24**	**Orang**			
21	**PPPK Tahap I**	Golongan IX	=	6	Orang	S.1	=	6	Orang	Laki-Laki :	4	Orang
23		Golongan VII	=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan :	6	Orang
24		Golongan V	=	3	Orang	SMA	=	3	Orang			
Jumlah				**10**	**Orang**			**10**	**Orang**			
26	**PPPK Tahap II Optimalisasi BKN**	Golongan V	=	2	Orang	SMA	=	2	Orang	Perempuan :	1	Orang
Jumlah				**2**	**Orang**			**2**	**Orang**			
30	**Menunggu pengumuman Tampungan BKN**		=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Laki-Laki :	1	Orang
Jumlah				**1**	**Orang**			**1**	**Orang**			
31	**PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I dan Tahap II)**	PPPK Tahap I	=	10	Orang	S.1	=	14	Orang	Laki-Laki :	3	Orang
		PPPK Tahap II	=	4	Orang					Perempuan :	11	Orang
Jumlah				**14**	**Orang**			**14**	**Orang**			
32	**NON ASN**		=	3	Orang	S.1	=	3	Orang	Perempuan :	3	Orang
Jumlah				**3**	**Orang**			**3**	**Orang**			

3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				PENDIDIKAN				JENIS KELAMIN			
1	*2*	*3*				*4*				*5*			
1	**Kepala Biro**	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1	Orang	S.3	=	1	Orang	Laki-Laki	:	1	Orang
2	**Kepala Bagian**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	3	Orang	S.2	=	3	Orang	Laki-Laki	:	3	Orang
		Pembina Tingkat I (IV/b)	=										
3		Pembina Tingkat I (IV/b)	=										
4	**Kepala Sub Bagian**	Pembina (IV/a)	=	5	Orang	S.2	=	5	Orang	Laki-laki	:	4	Orang
5		Penata Tk.I (III/d)	=	3	Orang	S.1	=	3	Orang	Perempuan	:	4	Orang
6		Penata (III/c)	=		Orang								
7		Penata Muda Tk.I (III/b)	=		Orang								
10	**Staff**	Pembina (IV/a)	=	1	Orang	S.2	=	5	Orang	Laki-Laki	:	10	Orang
11		Penata Tk.I (III/d)	=	12	Orang	S.1	=	11	Orang	Perempuan	:	10	Orang
12		Penata (III/c)	=	4	Orang	D3	=	1	Orang				
13		Penata Muda Tk.I (III/b)	=	-	-	SMA	=	3	Orang				
14		Penata Muda (III/a)	=	-	-								
		Pengatur Tk.I (II/d)	=	1	Orang								
15		Pengatur Muda Tk.I (II/b)	=	2	Orang								
Jumlah				**32**	**Orang**			**32**	**Orang**				
21	**PPPK Tahap I**	Golongan IX	=	10	Orang	S.1	=	10	Orang	Laki-Laki	:	8	Orang
23		Golongan VII	=	2	Orang	D.3	=	2	Orang	Perempuan	:	6	Orang
24		Golongan V	=	2	Orang	SMA	=	2	Orang				
Jumlah				**14**	**Orang**			**14**	**Orang**				
26	**PPPK Tahap II Optimalisasi BKN**	Golongan IX	=	10	Orang	S.I	=	10	Orang	Laki-Laki	:	3	Orang
		Golongan VII	=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan	:	8	Orang
Jumlah				**11**	**Orang**			**11**	**Orang**				
30	**Menunggu pengumuman Tampungan BKN**		=	-	-	-	=	-	Orang	-		-	Orang
Jumlah				**-**	**Orang**			**-**	**Orang**				
31	**PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I dan Tahap II)**	PPPK Tahap I	=	1	Orang	SMA	=	-	Orang	Laki-Laki	:	1	Orang
		PPPK Tahap II	=	-	-					Perempuan	:	-	-
Jumlah				**1**	**Orang**			**-**	**Orang**				
32	**NON ASN**		=	-	-	S.1	=	-	-	Perempuan	:	-	-
Jumlah				**0**	**Orang**			**0**	**Orang**				

4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				PENDIDIKAN				JENIS KELAMIN
1	*2*	*3*				*4*				*5*
1	**Kepala Biro**	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
		Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
			=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Perempuan
2	**Kepala Bagian**	Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan
4	**Kepala Sub Bagian**	Pembina (IV/a)	=	4	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
							=	3	Orang	Perempuan
5		Penata Tingkat I (III/d)	=	4	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
6			=			S.1	=	3	Orang	Perempuan
7		Penata (III/c)	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan
8		Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
9			=	3	Orang	S.2	=	3	Orang	Laki-Laki
13	**STAFF**	Pembina (IV/a)	=	2	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
14							=	1	Orang	Perempuan
		Penata Tingkat I (III/d)	=	7	Orang	S.1	=	5	Orang	Perempuan
								1	Orang	Laki-Laki
						S.2		1	Orang	Laki-Laki
15		Penata (III/c)	=	2	Orang	S.1	=	2	Orang	Perempuan
17		Penata Muda Tingkat I (III/b)	=	4	Orang	S.1	=	2	Orang	Perempuan
						S.1	=	1	Orang	Perempuan
18						SMU	=	1	Orang	Perempuan
		Penata Muda (III/a)	=	1	Orang	SMU	=	1	Orang	Perempuan
	JUMLAH		=	**33**	**Orang**		**=**	**33**	**Orang**	
21	**PPPK Tahap I**	Golongan IX	=	3	Orang	S.1	=	3	Orang	Perempuan
22		Golongan VII	=	2	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan
23			=					1	Orang	Laki-Laki
24	**JUMLAH**			**5**	**Orang**			**5**	**Orang**	
27	**PPPK Tahap II**	Golongan IX	**=**	2	Orang	S.1		1	Orang	Perempuan
28								1	Orang	Laki-Laki
		Golongan VII	=	1	Orang	D.3		1	Orang	Laki-Laki
		Golongan V	=	2	Orang	SMU		1	Orang	Laki-Laki
								1	Orang	Perempuan
	JUMLAH			**5**	**Orang**			**5**	**Orang**	
29	**PPPK Tahap II Optimalisasi BKN**	Golongan V	=	23	Orang	SMU	=	20	Orang	Laki-Laki
								3	Orang	Perempuan
	JUMLAH			**23**	**Orang**			**23**	**Orang**	
30	**NON ASN**		=	2	Orang	S.1	=	2	Orang	Laki-Laki
31	**JUMLAH**			**2**	**Orang**			**2**	**Orang**	

5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				PENDIDIKAN				JENIS KELAMIN
1	*2*	*3*				*4*				*5*
1	**Kepala Biro**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
2	**Kepala Bagian**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Laki-Laki
3			=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	Perempuan
4	**Kepala Sub Bagian**	Pembina (IV/a)	=	5	Orang	S.2	=	5	Orang	Perempuan
6		Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan
7			=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Laki-Laki
8	**Staf**	Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan
9			=	2	Orang	S.1	=	2	Orang	Laki-Laki
10		Pengatur (II/d)	=	1	Orang	SMU	=	1	Orang	Laki-Laki
Jumlah				**14**	**Orang**			**14**	**Orang**	
11	**PPPK Tahap I**	Golongan IX	=	2	Orang	S.1	=	2	Orang	Laki-Laki
12			=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan
13		Golongan VII	=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan
14		Golongan V	=	1	Orang	SMU	=	1	Orang	Perempuan
Jumlah				**5**	**Orang**			**5**	**Orang**	
15	**PPPK Tahap II**	Golongan VII	=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan
Jumlah				**1**	**Orang**			**1**	**Orang**	
16	**PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)**	Golongan IX	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan
Jumlah				**1**	**Orang**			**1**	**Orang**	
17	**PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap II)**	Golongan IX	=	2	Orang	S.1	=	2	Orang	Perempuan
		Golongan IX	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Laki-Laki
Jumlah				**3**	**Orang**			**3**	**Orang**	
18	**NON ASN**		=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan
Jumlah				**1**	**Orang**			**1**	**Orang**	

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN
1	2	3				4			5
1	**Kepala Biro**	Pembina Utama Muda(IV/c)	=	1	Orang	S.3 =	1	Orang	Perempuan
2	**Kepala Bagian**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang	S.2 =	1	Orang	Laki-Laki
3			=	1	Orang	S.2 =	1	Orang	Laki-Laki
4	**Kepala Sub Bagian**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang	S.2 =	1	Orang	Laki-Laki
5		Pembina (IV/a)	=	1	Orang	S.2 =	1	Orang	Laki-Laki
6			=	1		S.2 =	1	Orang	Perempuan
7		PenataTingkat I (III/d)	=	4		S.1 =	4	Orang	Laki-Laki
8			=	1	Orang	S.1 =	1	Orang	Perempuan
9		Penata (III/c)	=	1	Orang	S.1 =	1	Orang	Laki-Laki
10	**Jabatan Fungsional Umum (JFU)**	Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang	S.2 =	1	Orang	Laki-Laki
11			=	3	Orang	S.2 =	3	Orang	Perempuan
12			=	1	Orang	S.2 =	1	Orang	Laki-Laki
13			=	2	Orang	S.1 =	2	Orang	Laki-Laki
14		Penata Muda Tingkat I (III/b)	=	1	Orang	D.3 =	1	Orang	Laki-Laki
15			=	1	Orang	D.3 =	1	Orang	Perempuan
16			=	1	Orang	SMU=	1	Orang	Laki-Laki
17		Penata Muda (III/a)	=	2	Orang	S.1 =	2	Orang	Laki-Laki
18			=	1	Orang	S.1 =	1	Orang	Perempuan
19		Pengatur (II/c)	=	1	Orang	SMU=	1	Orang	Laki-Laki
20			=	1	Orang	SMU=	1	Orang	Perempuan
		Jumlah.....		**27**	**Orang**		**27**	**Orang**	
21	**PPPK Tahap I**	Golongan IX	=	8	Orang	S.1 =	8	Orang	Laki-Laki
22			=	6	Orang	S.1 =	6	Orang	Perempuan
23		Golongan VII	=	1	Orang	D.3 =	1	Orang	Perempuan
24		Golongan V	=	3	Orang	SMU=	3	Orang	Laki-Laki
25			=	3	Orang	SMU=	3	Orang	Perempuan
		Jumlah.....		**21**	**Orang**		**21**	**Orang**	
26	**PPPK Tahap II**	Golongan IX	=	1	Orang	S.1 =	1	Orang	Laki-Laki
27			=	1	Orang	S.1 =	1	Orang	Perempuan
28		Golongan V	=	1	Orang	SMU=	1	Orang	Perempuan
		Jumlah.....		**3**	**Orang**		**3**	**Orang**	
29	**PPPK Tahap II Optimalisasi BKN**		=	2	Orang	SMU=	2	Orang	Perempuan
		Jumlah.....		**2**	**Orang**		**2**	**Orang**	
30	**PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)**	Golongan V	=	1	Orang	SMU=	1	Orang	Laki-Laki
		Jumlah.....		**1**	**Orang**		**1**	**Orang**	
	Ikut Test CPNS		=	1	Orang	S.1 =	1	Orang	Laki-Laki
31	**(Tidak Lulus)**		=	2	Orang	S.1 =	2	Orang	Perempuan
		Jumlah.....		**3**	**Orang**		**3**	**Orang**	

7. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN					PENDIDIKAN					JENIS KELAMIN
1	2	3					4					5
1	**Kepala Biro**	Pembina Utama Madya (IV/d)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Laki-Laki
2	**Kepala Bagian**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	2	Orang		S.2	=	2	Orang		Laki-Laki
3			=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Perempuan
4	**Kepala Sub Bagian**	Pembina (IV/a)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Laki-Laki
5			=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Perempuan
6		Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Laki-Laki
7			=	3	Orang		S.2	=	3	Orang		Perempuan
8			=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Laki-Laki
9			=	2	Orang		S.1	=	2	Orang		Perempuan
8	**Analis Kelembagaan**	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Laki-Laki
9		Pembina (IV/a)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Perempuan
10		Penata Muda (III/a)	=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Perempuan
11		Penata Muda (III/a)	=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Laki-Laki
12	**Analis Kinerja**	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Laki-Laki
13	**Analis Tatalaksana Pemerintahan**	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Perempuan
14		Pembina (IV/a)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Perempuan
15	**Analis Pengembangan SDM Aparatur**	Penata Tingkat I (III/d)	=	1	Orang		S.2	=	1	Orang		Laki-Laki
16	**Analis Jabatan**	Penata Muda Tk. I (III/b)	=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Perempuan
17	**Analis Tatalaksana Pelayanan Publik**	Penata Muda (III/a)	=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Laki-Laki
18	**Pengadministrasi Umum**	Penata Muda (III/a)	=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Perempuan
Jumlah				**24**	**Orang**				**24**	**Orang**		
19	**PPPK Tahap I**	Golongan IX	=	2	Orang		S.1	=	2	Orang		Laki-Laki
20			=	5	Orang		S.1	=	5	Orang		Perempuan
21		Golongan VII	=	1	Orang		D.3	=	1	Orang		Perempuan
22		Golongan V	=	2	Orang		SMU	=	2	Orang		Laki-Laki
Jumlah				**10**	**Orang**				**10**	**Orang**		
23	**PPPK Tahap II**	Golongan IX	=	2	Orang		S.1	=	2	Orang		Perempuan
24		Golongan V	=	1	Orang		SMU	=	1	Orang		Perempuan
Jumlah				**3**	**Orang**				**3**	**Orang**		
25	**PPPK Tahap II Optimalisasi BKN**	Golongan IX	=	2	Orang		S.1	=	2	Orang		Laki-Laki
			=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Perempuan
		Golongan V	=	3	Orang		SMU	=	3	Orang		Laki-Laki
			=	5	Orang		SMU	=	5	Orang		Laki-Laki
Jumlah				**11**	**Orang**				**11**	**Orang**		
31	**NON ASN**		=	1	Orang		S.1	=	1	Orang		Laki-Laki
Jumlah				**1**	**Orang**				**1**	**Orang**		
Jumlah Total				**49**	**Orang**				**49**	**Orang**		

8. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-Laki = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 3 Org
		Penata (III/c) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) =17 Org	S2 = 6 Org S1 =11 Org	Laki-lakiPerempuan = 7 Org = 10 Org
		Penata (III/c) =12 Org	S2 = 2 Org S1 =10 Org	Laki-laki = 6 Org Perempuan = 6 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) =14 Org	S1 =11 Org SLTA = 3 Org	Laki-lakiPerempuan = 10 Org = 4 Org
		Penata Muda (III/a) =13 Org	S1 = 9 Org D III = 3 Org SLTA= 1 Org	Laki-lakiPerempuan = 10 Org = 3 Org
		Pengatur Tk.I (II/d) =13 Org	SLTA= 13 Org	Laki-laki = 8 Org Perempuan = 5 Org
		Pengatur (II/c) =6 Org	SLTA= 6 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 2 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) =2 Org	SLTA= 2 Org	Laki-laki = 2 Org
		Pengatur Muda (II/a) =1 Org	SLTA= 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Juru (I/c) =2 Org	SLTP= 2 Org	Laki-laki = 2 Org
5.	PPPK	Penata Layanan Operasional = 29 Org	S1	Perempuan = 13 Org Laki-Laki = 16 Org
		Pengelola Layanan Operasional (VII) = 3 Org	D3	Perempuan = 1 Org Laki-Laki = 2 Org
		Pengadministrasi Perkantoran (VII) = 42 Org	SMA	Perempuan = 14 Org Laki-Laki = 28 Org
6.	NON ASN	Pegawai Non ASN = 353 Org		

9. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	ASN	JABATAN	PANGKAT/GOL		PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
1	PNS	Kepala Biro	Pembina TK.I (IV/b)	1 Org	S2	Laki-laki	1 Org
		Kepala Bagian	Pembina (IV/a)	2 Org	S2	Laki-laki	2 Org
		Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d)	2 Org	S2	Laki-laki	3 Org
			Penata (III/c)	5 Org	S1	Laki-laki	4 Org
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1 Org	S1	Perempuan	1 Org
		Staf	Penata Tk.I (III/d)	9 Org	S2	Laki-laki	4 Org
			Penata (III/c)	12 Org	S2	Perempuan	6 Org
			Penata Muda Tk.I (III/b)	10 Org	S1	Laki-laki	9 Org
			Penata Muda (III/a)	11 Org	S1	Perempuan	15 Org
			Pengatur Tk.I (II/d)	3 Org	D3	Laki-laki	2 Org
			Juru (I/c)	1 Org	D3	Perempuan	2 Org
					SLTA	Laki-laki	5 Org
					SLTA	Perempuan	2 Org
					SLTP	Laki-laki	1 Org
2	PPPK TAHAP I				S1	Laki-laki	Org
					S1	Perempuan	7 Org
					D3	Laki-laki	- Org
					D3	Perempuan	4 Org
					SLTA	Laki-laki	5 Org
					SLTA	Perempuan	4 Org
	PPPK TAHAP II				S1	Laki-laki	- Org
					S1	Perempuan	1 Org
					SLTA	Laki-laki	8 Org
					SLTA	Perempuan	- Org
	PPPK PARUH WAKTU				S1	Laki-laki	5 Org
					S1	Perempuan	3 Org
					SLTA	Laki-laki	- Org
					SLTA	Perempuan	1 Org
3	NON ASN		HONORER			Laki-laki	2 Org
						Perempuan	- Org
			TKPD			Laki-laki	- Org
						Perempuan	'- Org
			TENAGA IT			Laki-laki	2 Org
						Perempuan	2 Org

Grafik 2.1.

DATA PEGAWAI TAHUN 2025

Jumlah

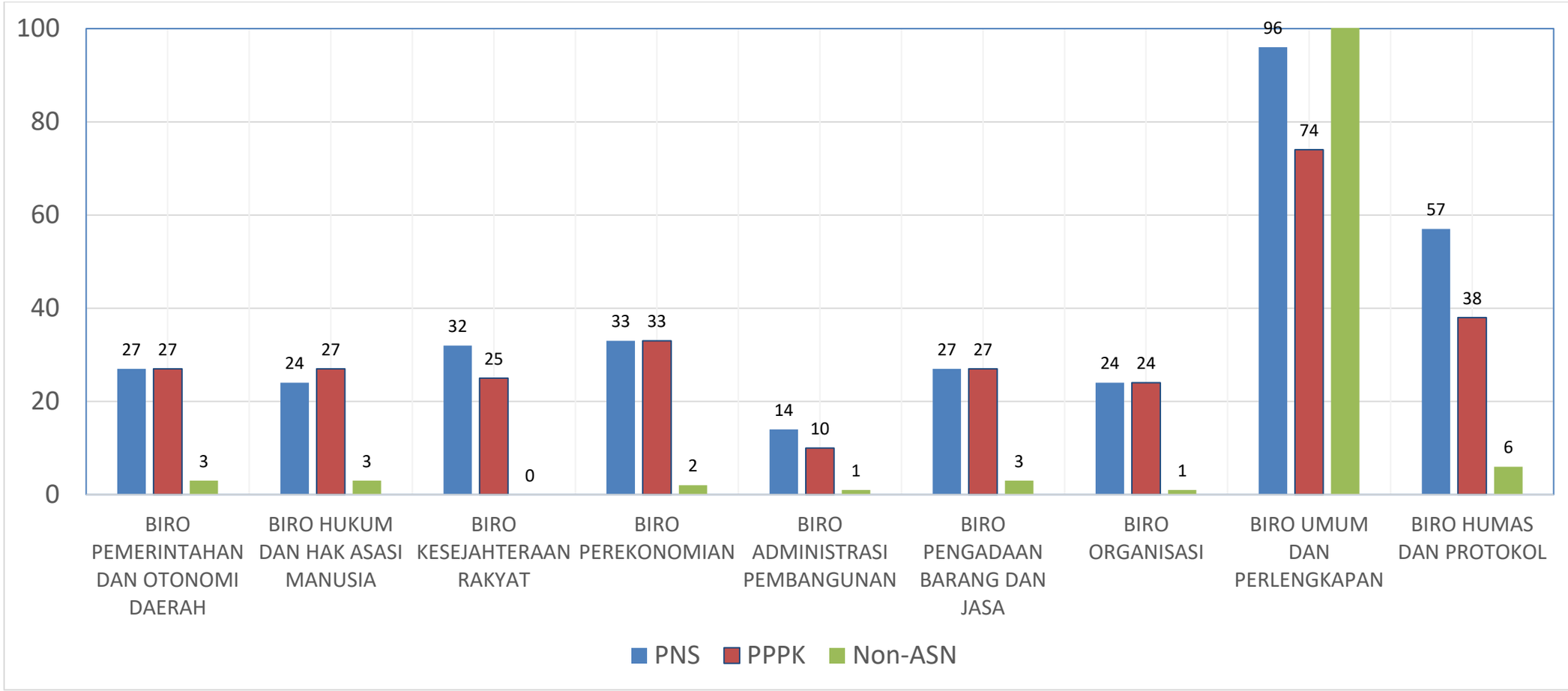

Jadi disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa biro masih membutuhkan SDM yang mana SDM pada saat ini masih terdapat kekurangan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Di bagian ini akan dikemukan tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra sebelumnya. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode sebelumnya , sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Dalam penetapan target selama 5 tahun terhitung dari tahun 2025-2029.

Pencapaian Indikator Kinerja dari tahun 2025–2029 secara kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyampaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 ditargetkan dengan nilai Sangat Tinggi (**ST)** dengan angka (3,0) dengan realissasi skor (**3,18**). dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.2.
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun 2023

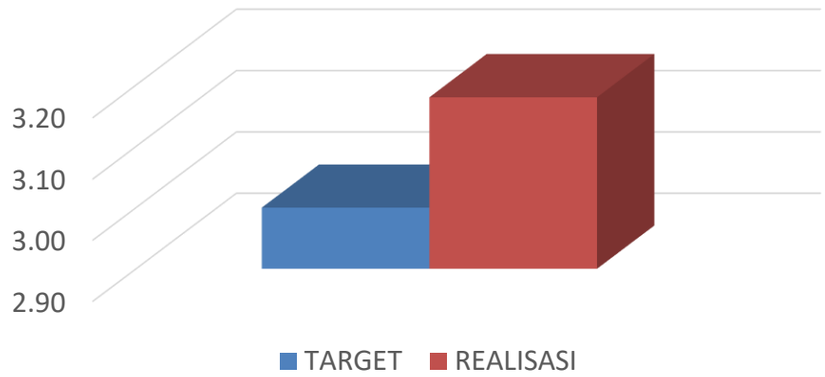

2. Capaian Produk Hukum Daerah Penanganan Perkara dan HAM Jumlah Peraturan Daerah yang Di akses oleh Publik

Persentase Produk Hukum daerah, Penanganan Perkara dan HAM Pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100%. Tercapainya persentase produk hukum 100% karena perhitungannya didapat dari Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Persentase gugatan menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

1) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Daerah, Target 5 Perturan Daerah dan 9 Peraturan Daerah.
2) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, target 15 Perturan Gubernur dan 31 Perturan Gubernur.
3) Jumlah Penelitian dan Penelahaan Draft Keputusan Gubernur, Target 700 Keputusan Gubernur dan 1002 Keputusan Gubernur.
4) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan

Kepala Daerah, Target 5 Perda dan Realisasi Target 9 Perda.

5) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, Target 15 Pergub dan Realisasi Target 31 Pergub.
6) Jumlah Penelitian dan Penelahaan Draft Keputusan Gubernur, Target 700 kpts dan Realisasi Target 1000 kpts.
7) Jumlah Publikasi Produk Hukum Berupa Buku dan Media Cetak, Target 84 Buku dan 1 Kali Cetak serta Realisasi Target 121 Buku dan 1 Kali Cetak.
8) Jumlah Publikasi Produk Hukum dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Target 110 Produk Hukum dan Realisasi Target 419 Produk Hukum.
9) Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dapat di Evaluasi, Fasilitasi, dan Klarifikasi, Target 450 Produk Hukum dan Realisasi Target 681 Produk Hukum.
10) Jumlah Perkara yang Menyangkut Kepentingan Pemerintah Provinsi Sumsel, Target 8 Perkara dan Realisasi Target 30 Perkara.
11) Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin, Target 20 Kasus dan Realisasi Target 52 Kasus.
12) Jumlah Rapat dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang di selesaikan, Target 2 Kali dan Realisasi Target 2 kali.
13) Terbentuknya Keluarga Sadar Hukum di 17 (Tujuh Belas) kabupaten/kota, Target 1 Kegiatan dan Realisasi Target 1 Kegiatan.
14) Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Hukum, Target 5 kab/kota dan Realisasi Target

5 Kab/Kota.

15) Jumlah Laporan Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota, Target 3 Laporan dan Realisasi Target 3 Laporan.

3. Persentase Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia)

Laporan capaian aksi HAM di sampaikan secara berkala oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat setiap periode 4 bulanan yaitu periode B04, B08 dan B12. Capaian hasil pelaporan aksi HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tahun	Periode			Rata-rata Nilai Capaian
2020	100	100	100	100
2021	88,89	75	89,14	84,34
2022	86	100	100	95,33
2023	96,88	100	100	98,96
2024	100	86,4	100	95,47

Nilai rata-rata Capaian Laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024 mencapai angka 75,01 % yang mengartikan bahwa rata-rata nilai capaian dalam kategori “mencapai target atau memuaskan.”

Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik Target Peraturan Daerah pada tahun 2023 target 7 (tujuh) perda dan realisasinya adalah (lima)Peraturan Daerah yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 71,4% dari target yang ditetapkan. Ke semua peraturan daerah dimaksud

dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. (8 Peraturan Daerah) karena adanya ada kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan, dan pada Tahun 2020 Target sebesar 100% (8 Peraturan Daerah) terealisasi 90% (14 Peraturan Daerah) terjadinya peningkatan penyusunan Perda karena adanya banyaknya fasilitas penyusunan produk hukum. Sedangkan tahun 2021 target sebesar 8 Peraturan Daerah dan terealisasi 13 Peraturan Daerah, tahun 2022 target sebesar 7 Peraturan Daerah dan terealisasi 7 Peraturan Daerah serta tahun 2023 target sebanyak 7 (tujuh) terealisasi 5 (lima). Dapat dilihat pada grafik dibawah ini bisa dilihat peningkatan setiap tahunnya jumlah Peraturan Derah yang dapat diakses oleh publik. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.3.
Target dan Realisasi Peraturan Daerah yang Diakses Publik 2020 s.d. 2023

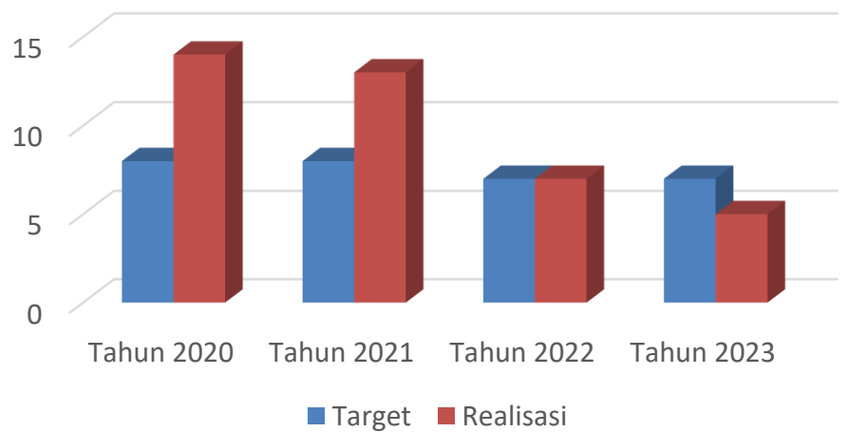

Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik

Peraturan Gubernur pada Tahun 2023 target 27 (dua puluh tujuh) Pergub dan realisasinya adalah 37 (tiga puluh tujuh) Pergub yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 137,03% dari target yang ditetapkan. Kesemua Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id.

Grafik1.3 Jumlah Gubernur yang diakses oleh PublikTahun 2023

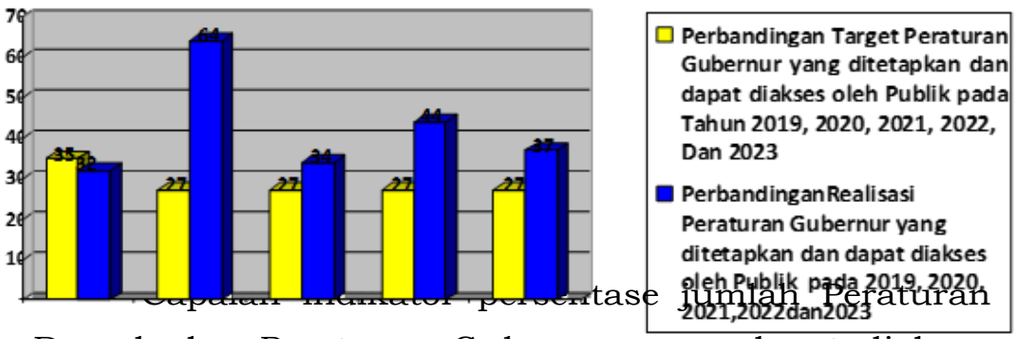

Capaian indikator persentase jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik pada Tahun 2019 mencapai 110 dan Tahun 2020 mencapai 95 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 97,6% dari target hingga Tahun 2020 yaitu sebanyak 21 produk hukum daerah dan tahun 2021 mencapai 125,93% Capaian indikator persentase jumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat diakses oleh publik Tahun 2021 mencapai 45 produk hukum daerah, jumlah tersebutmencapai 1,69% dari target hingga Tahun 2021 yaitu sebanyak 97 produk hukum daerah dan capaian indikator persentase jumlah produk hukum

yang dapat diakses oleh publik Tahun 2022 dengan target 110 (seratus sepuluh)dan realisasinya mencapai 43 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 574,54% dari target produk hukum daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Capaian dari tahun 2019 s.d 2023 mencapai nilai yang stabil sebesar 80% dari produk hukum yang dapat diakses publik. Capaian indikator persentase jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh publik Tahun 2023 dengan target 110 (seratus sepuluh) dan realisasinya mencapai 212 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 192,73% dari target produk hukum daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.4.
Target dan Realisasi Peraturan Gubernur yang Diakses Publik 2019 s.d. 2023

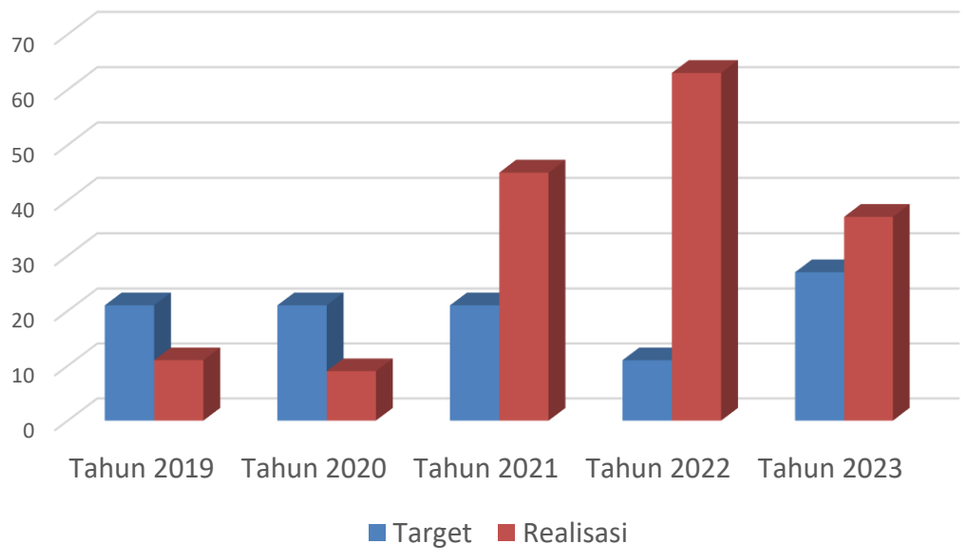

4. capaian Indikator Kinerja Jumlah Kerjasama Daerah Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD Dan Lembaga Non Pemerintah

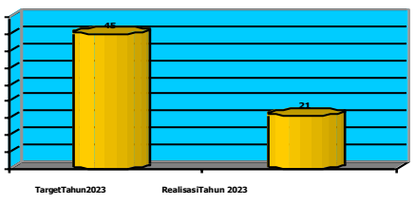

Fasilitasi penyusunan memorandum of understanding (MoU) antara pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 45 MoU terealisasi sebanyak 21 MoU atau 46,67%, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan MoU berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai aspek didalam penandatanganan MoU tetapi untuk tahun 2023 hanya melibatkan beberapa pihak yang terkait sehingga tidak mencapai capaian yang di targetkan.

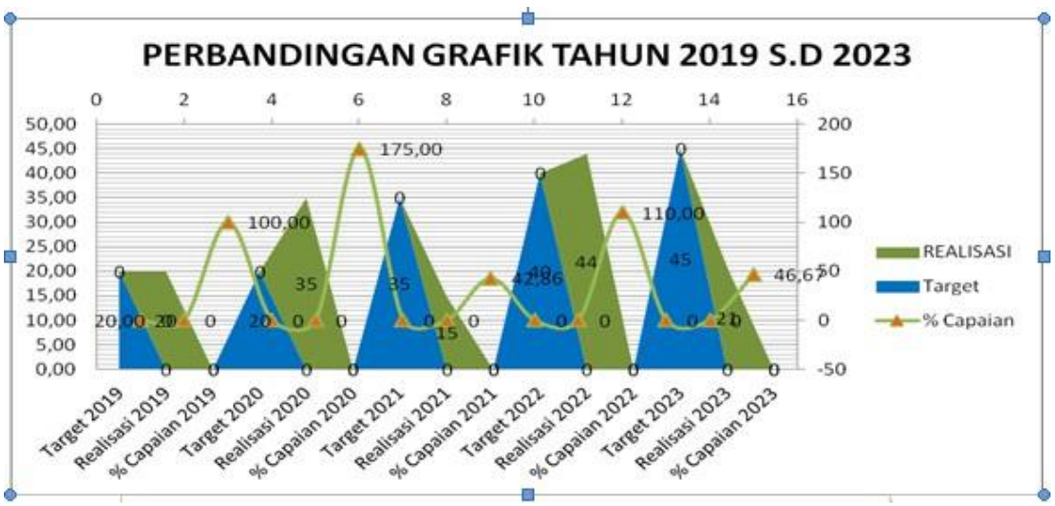

Grafik1.6 Perbandingan MoU Tahun 2019 s.d 2023

Dari grafik di atas bisa di lihat peningkatan pada tahun 2019 s.d 2023 dan terjadi penurunan ditahun 2021 dan 2023 serta peningkatan di tahun 2022 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun **2019** ditargetkan sebanyak 25 (dua puluh lima) dokumen terealiasi sebanyak 28 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Hukum Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum H. Aslin Amardi SH & Assosiates tentang Kerjasama di Bidang Jasa Hukum.
2. Nota Kesepakatan antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengembangan Pelabuhan laut dalam (Deep Sea Port) dan Sekitar nya serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pelayanan Isbat Nikah Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perum BULOG Divre Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengadaan dan Penyaluran Beras bagi ASN Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Terbuka tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Terhadap Masyarakat.
6. Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum& HAM Sumatera Selatan

dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembinaan dan Pemenuhan Hak yang berhadapan dengan Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
8. Nota Kesepahaman antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengembangan Sumber saya Manusia Bidang Energi & Sumber Daya Mineral.
9. Kesepakatan Bersama antara Kepolisian daerah Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Walikota Palembang, PMI Provinsi Sumatera Selatan, PMI kota Pelembang tentang Kerjasama dalam Pembangunan Sistem Informasi Basis Data Golongan Darah Anggota Kepolisian Negara RI dan ASN Kepolisian Negara RI yang terintegritas dalam pemenuhan kebutuhan darah di provinsi sumatera selatan.
10. Kesepakatan bersama antara dinas kesehatan provinsi sumatera selatan dengan IPPI sumatera selatan tentang upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kesepakatan bersama antar dinas kesehatan provinsi sumatera selatan dengan pengurus daerah IDI tentang upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Kesepakatan bersama antara dinas kesehatan provinsi sumatera selatan dengan ormas aisyah sumatera selatan tentang upaya peningkatan

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Forum Kader Posyandu Indonesia Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Intan Maharani tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PPNI Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
17. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PERSAKMI tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
18. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan PKBI Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
19. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah tentang Pengintegrasian Sumatera Selatan *Command Center* dengan *command center* Kepolisian Sumatera Selatan.

20. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Dinas Ketahanan Pangan tentang Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Mendukung Sumatera Selatan Swasembada Ternak Tahun 2025.
21. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang Tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoprasian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Palembang.
22. Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Penyediaan Lahan dan Pembangunan Perumahan Musiku (Murah, Bersubsidi, Berkualitas) bagi Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
23. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatandengan PERSAKMI tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
24. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan FKPI Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
25. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Intan Maharani Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
26. Perjanjian Kerja Sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Pesatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Selatan tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

27. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
28. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia tentang Upaya Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada **tahun 2020** ditargetkan sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen terealiasi sebanyak 28 dokumen di karenakan masih adanya pandemic *Covid-19* yang mana Pemerintah memperketat protokol kesehatan hingga menerapkan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghambat semakin meluasnya penularan *Covid-19* terutama di lingkungan perkantoran sehingga mengakitbatkan proses koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lakukan secara daring/*online* dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU), dengan rincian dokumen sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama tentang pelatihan keterampilan untuk warga binaan pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan
2. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pengurus pusat Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) tentang kerja sama pembangunan daerah.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya

tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

4. Kesepakatan Bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang Pengamanan dalam rangka Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid -19) Di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penguatan Konektivitas Antar Wilayah.
8. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi

Geografis.

9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas IBA tentang Pengembangan dan Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
10. Kesepakatan Bersama atara Pememerintan Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Argo Indutri Nasional tentang Optimalisasi Potensi Pertanian, Perikanan & Kehutanan.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.
12. Nota kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan STKIP PGRI Lubuk Linggau tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Nota kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Muhammadiyah Palembang tentang peningkatan kualifikasi pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
15. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Terbuka Palembang tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Angkasa Pura II (Persero) tentang Sinergi Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 WORLD CUP Tahun 2021 di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II.
17. Nota kesepakatan bersama antara Pemerntah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA tentang Addendum atas Perjanjian Konsesi tanggal 13 juli 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarame.
18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyalahgunaan Pemerintah Daerah.
19. Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perdagangan.
20. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perindustrian.
21. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanaman Modal.
22. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
23. Perjanjian Kerja Sama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Sampah Limbah

dan Bahan Berbahaya dan Beracun

24. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten TanggamusProvinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatantentang Kerjasama Pembangunan daerah.

Fasilitasi penyusunan memorandum of understanding (MoU) pada tahun 2021 di targetkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen terealisasi sebanyak 22 dokumen.
Penyusunan draft kesepakatan bersama, nota kesepakatan, ataupun perjanjian kerja sama pada tahun 2021 belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan kondisi memasuki erapost-pandemic covid-19 yang mana penyelenggaraan pemerintahan daerah masih beradaptasi dengan adanya New Norma, dengan rincian dokumen sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi jambi dengan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan PT. Angkasa Pura II KC Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang pengembangan budaya literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan pojok baca digital (POCADI) di ruang publik Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
2. Nota kesepakatan antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perpustakaan, Peningkatan Gerakan Membaca dan Gerakan Literasi untuk kesejahteraan.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita

(GIWANG) Sumsel.

4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademis, Komunitas, dan media tentang GIWANG.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang tentang kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan.
6. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang pengelolaan, pembayaran retribusi tiket penyeberangan pelabuhan tanjung api-api-tanjung kelian.
7. Nota kesepakatan antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan kantor staf presiden tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Pelaksanaan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PATANI INDONESIA tentang kerja sama Bidang Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian.
9. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademisi,

Komunitas, dan Media tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita (GIWANG) Sumsel.

12. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kab/Kota Se-Sumatera Selatan Tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita (GIWANG) Sumsel.
13. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya tentang pengelolaan Sementara Layanan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal PerbendaharaanKantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pengelolaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) dari PT. Pertamina Hulu Energi pada Wilayah Kerja Blok Jambi Merang di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tentang Kerja Sama Kawasan Regional Manna-PagarAlam–Lahat (KERMAPALA).
17. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Batubara Mandiri tentang Pengelolaan Alur-Pelayaran Kelas II Sungai Lematang.
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Batubara

Mandiri tentang Pengelolaan Alur-Pelayaran Kelas II Sungai Musi Bagian Hulu.

19. Nota Kesepahaman antara Universitas Singa perbangsa Karawang dan Pemprov Sumsel.
20. Nota Kesepahaman tentang Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Ketahanan Penghidupan terhadap Perubahan Iklim di Indonesia antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan *International Center for Research and Agroforestry* (ICRAF).
21. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya tentang Pengelolaan Sementara Layanan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
22. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Distribusi dan Ketersediaan Pangan.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada **tahun 2022** ditargetkan sebanyak 40 (empat puluh) dokumen terealiasi sebanyak 44 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama antar Daerah.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Stiper Sriwigama Palembang.
3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Staf Kepresidenan tentang pemanfaatan aplikasi sistem

monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pemantauan rencana aksi daerah pengarustamaan gender.

4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palembang
   tentang pemberian bantuan hukum cuma-cumadari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Batu Bara Mandiri tentang Pengelolaan Alur Pelayaran Kelas II Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Musi Bagian Lematang.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kesepakatan Bersama antara Universitas Indo Global Mandiri dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang *Tri Dharma* Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang pengembangan layanan informasi potensi peluang investasi di provinsi sumatera selatan melalui media informasi

dan aplikasi *Sumsel Awareness Investment* (SAI) di ruang Publik Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

10. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Pengelolaan Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terintegrasi antar Penegak Hukum.
11. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Over Dimension* dan *Over Loading*) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemetaan Kawasan Hutan, Perkebunan, Pertambangan, Agraria/ Pertanahan, dan Tata Ruang di Provinsi Sumatera Selatan.
13. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komando Daerah Militer II Sriwijaya tentang Pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi di Daerah.

15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kerja Sama Antar Daerah.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Angkasa Pura II Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin
    II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
17. Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumsel dan Pemerintah KabupatenPALI tentang Pengelolaan *Participating Interest* (10%) dari PT. PHE Raja Tempirai pada Wilayah Kerja Raja Pendopo di Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
18. Nota Kesepakatan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Sumatera Selatan.
19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang

Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tentang Pengelolaan *Partcipating Interest* 10% (sepuluh persen) dari PT. Odira Energi Karang Agung pada Wilayah Kerja Blok Karang Agung di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
23. Nota Kesepakatan antara BP2IM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
24. Nota Kesepakatan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Sumatera Selatan.
25. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sumatera Selatan tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
26. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dan PT. Jasa Raharja tentang Pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Berbasis Teknologi Informasi dengan Aplikasi Sistem Pengecekan Keabsahan Kendaraan Prioritas Keamanan Masyarakat (CAKPAKAM)

27. Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendayagunaan Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kepolisian Berbasis Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan.
28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Tokopedia tentang Pengembangan dan pelatihan Ekonomi Digital serta Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri kecil Menengah (IKM) di Provinsi Sumatera Selatan.
29. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia tentang Percepatan Pelaksanaan Restorasi, Komoditas Berkelanjutan, dan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan.
30. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aplikasi Genta Informasi Wisata Andalan yang Nyaman dan Gempita Sumatera Selatan (GIWANG SUMSEL) di Kabupaten Musi Banyuasin.
31. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan tentang Peningkatan Perekonomian Daerah di Provinsi

Sumatera Selatan.

32. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang layanan informasi potensi peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui media informasi dan aplikasi *Sumsel Awareness Investment* (SAI) di ruang publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
33. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan SP I Kawasan Transmigrasi Petata Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
34. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pariwisata Kota Pagaralam tentang pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita (GIWANG) Sumatera Selatan.
35. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan SP I Kawasan Transmigrasi PETATA Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
36. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera

Utara dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau dan Dinas Perhubungan Kepulauan Bangka Belitung tentang Penertiban dan Pengendalian Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) se-Sumatera.

37. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan UTP tentang Penyusunan Dokumen *Detail Engineering Design* (DED).
38. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan UPT tentang Pelaksanaan Program Pendampingan Kampung Iklim (PROKLIM).
39. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa PuraII Bandar Udara Sultan Mahdmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
40. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
41. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Sektor Industri di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Barat.

42. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
43. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)pada **tahun 2023** ditargetkan sebanyak 45 (empat puluh lima) dokumen terealiasi sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Bandar Lampung tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan The International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Penanganan Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan, dan Kesetaraan Gender Khususnya pada Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan The International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) tentang Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Ketahanan Penghidupan terhadap Perubahan Iklim di Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Palembang tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Perempuan Indonesia tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA-NG / Financial Management Information System (FMIS) yang terintegrasi dengan Bank Sumsel Babel dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Jimmagro Inter Mulya tentang Pengembangan Inovasi Teknologi Produk Unggulan Daerah di Kawasan SSTP Sumatera Selatan.
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Ladang Karya Husada (Toko Ladang) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan Marketplace Lokal Toko Ladang di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta.
13. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Urusan pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pertukaran data dan/atau informasi tentang pelayanan publik, dan kegiatan lain yang disepakati.

15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tentang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur tentang Urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah.
17. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
19. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah III tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.

22. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah kabupaten Enkerang Provinsi Sulawesi Selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada **tahun 2025** terealiasi sebanyak 40 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

a. KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

1. Kesepakatan Bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kabupaten ogan komering ulu tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
2. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah dengan kabupaten ogan komering ilir tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah
3. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kabupaten musi banyuasin tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
4. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kabupaten banyuasin tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
5. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kota pagaralam tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

6. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kota lubuk linggau tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
7. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kota prabumulih tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
8. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kabupaten pagaralam tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
9. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kabupaten ogan komering ulu timur tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah
10. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah
11. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah kabupaten ogan ilir tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah
12. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kota Palembang tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
13. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
14. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang kerja sama

pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

15. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kabupaten Empat Lawang tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
16. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kabupaten Musi Rawas tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
17. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kabupaten musi rawas utara tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
18. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pemerintah daerah provinsi lampung tentang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
19. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah Provinsi Lampung tentang kerja sama pengembangan perdagangan.
20. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung tentang pemberdayaan dan pengembangan sektor industri
21. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah provinsi sumatera selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah
22. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah kabupaten Enkerang Provinsi Sulawesi Selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah

b. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju tentang Revegetasi Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bukit Asam, Tbk tentang Revegetasi tentang Dukungan Terhadap Program Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Daerah.
3. Kesepakatan bersama antara RS Kanker Dharmais Jakarta dengan RSUP Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker.
4. Kesepakatan bersama antara RSP Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta dan RSUP Muhammad Hoesin Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Stroke.
5. Kesepakatan bersama antara RS Penyakit Infeksi Prof. Dr Sulianti Saroso dan RSUP Muhammad Hoesin Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Imerging.
6. Kesepakatan bersama antara RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan RSUP Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskular.
7. Kesepakatan bersama antara RSUP Persahabatan dengan RSUP Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan

Tuberkulosis.

8. Kesepakatan bersama antara RS Anak dan Bunda Harapan Kita dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangkusumo dan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan di bidang kesehatan Ibu dan Anak.
9. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perusahaan Umum Bulog Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pembelian dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan tentang Perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit
11. Perjanjian Kerja Sama Tentang Perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
12. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Kerja Sama Penyiaran Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hibah Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan.

c. SINERGI ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Nota kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Nota kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komando Daerah Militer II/Sriwijaya tentang kerja sama percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Nota kesepakatan antara Pusat Investasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang sinergi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di provinsi sumatera selatan melalui pembiayaan ultra mikro.
4. Nota kesepahaman antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang penataan aset lahan kompleks perkantoran kehutanan.

5. CAPAIAN KINERJA MAKRO PROVINSI SUMATERA SELATAN

5.1 Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 73,18 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 73,84 %

Perubahan 0,902 %

b. Angka Kemiskinan

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 73,18%

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 10,97%

c. Angka Pengangguran

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 4,11 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 3,86 %

Perubahan-6,083 %

d. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 5,08 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 5,03 %

Perubahan -0,984 %

e. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita ADHB)

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 71,96 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 75,13 %

Perubahan4,405 %

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 0,338 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 0,331 %

Perubahan-2,071 %

6. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Meningkatnya Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target Tahun 2024 = 5,74 %

Realisasi Tahun 2024 = 5,07 %

Capaian Tahun 2024 = 87,41 %

b. Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB

Target Tahun 2024 = Rp.71,67 Juta

Realisasi Tahun 2024 =Rp.75,13 Juta

Capaian Tahun 2024 = 104,83 %

c. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Target Tahun 2024 = Indeks 6,00 %

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 6,31 %

Capaian Tahun 2024 = Indeks 105,17 %

d. Indeks Entropi Theil

Target Tahun 2024 = Indeks 2,097 %

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 2,331 %

Capaian Tahun 2024 = Indeks 111,16 %

Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan

a. Nilai Tukar Petani

Target Tahun 2024 = 109,11%

Realisasi Tahun 2024 = 120,83%

Capaian Tahun 2024 = 110,74%

Meningkatnya Ekosistem Inovasi

a. Indeks Ekosistem Inovasi

Target Tahun 2024 = Indeks 2,72%

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 3,38%

Capaian Tahun 2024 = Indeks 124,26%

Terkendali Laju Inflasi Daerah

a. Tingkat Inflasi Daerah

Target Tahun 2024 = 2,5±1%

Realisasi Tahun 2024 = 1,20%

Capaian Tahun 2024 = 100%

Menjadikan Pemeretaan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

a. Tingkat Kemiskinan

Target Tahun 2024 = 10,95%

Realisasi Tahun 2024 = 10,51%

Capaian Tahun 2024 = 104,02%

b. Gini Ratio

Target Tahun 2024 = Indeks 0,324%

Realisasi Tahun 2024 =Indeks 0,331%

Capaian Tahun 2024 = Indeks 102,16%

Menurunnya Tingkat Pengangguran

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Target Tahun 2024 = 4,14%

Realisasi Tahun 2024 = 3,86%

Capaian Tahun 2024 = 106,67%

Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

a. Indeks Pembangunan Manusia

Target Tahun 2024 = Indeks 71,63%

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 73,84%

Capaian Tahun 2024 = Indeks 103,09%

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target Tahun 2024 = Indeks 93,94%

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 93,25%

Capaian Tahun 2024 = Indeks 99,27%

c. Indeks Pembangunan Pemuda

Target Tahun 2024 = Indeks 70%

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 54%

Capaian Tahun 2024 = Indeks 77,14%

d. Prevalensi Stunting

Target Tahun 2024 = 14,3%

Realisasi Tahun 2024 = 1,20%

Capaian Tahun 2024 = 191,61%

Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target Tahun 2024 = Indeks 71,93%

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 72,69%

Capaian Tahun 2024 = Indeks 101,06

b. Persentase Penurunan Emisi GRK

Target Tahun 2024 = 8,04%

Realisasi Tahun 2024 = 20,20%

Capaian Tahun 2024 = 251,24%

c. Indeks Resiko Bencana Sumsel

Target Tahun 2024 = Indeks 136,53

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 131,24

Capaian Tahun 2024 = Indeks 103,87

7. Capaian Kinerja Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Target Tahun 2024 = Indeks 67,5(B)

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 69,14

Capaian Tahun 2024 = Indeks 102,43

2. Capaian Kinerja

a. Nilai SAKIP

Target Tahun 2024 = Nilai 80,55

Realisasi Tahun 2024 = Nilai 77,53

Capaian Tahun 2024 = Nilai 96,25%

8. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Tahun 2024 =Indeks A

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 89,99

Capaian Tahun 2024 = Indeks 110,74

b. **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

Target : A (88,31) Indeks

Realisasi : A (89,99) Indeks

Capaian : A (101,90) %

9. Capaian Perangkat Daerah Yang Telah Menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 : 35 Perangkat Daerah

Capaian Perangkat Daerah yang belum menyampaikan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat : 15 Perangkat Daerah

Target : 50 OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Capaian : 70%

10. Hasil Rekap Perangkat Daerah (OPD)

Biro Perekonomian

Jumlah Responden : 27%

Nilai IKM : 90,23%

Capaian Tindak Lanjut : 75%

Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah Responden : 125%

Nilai IKM : 89,44%

Capaian Tindak Lanjut : 100%

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Responden : 150%

Nilai IKM : 88,39%

Capaian Tindak Lanjut : 100%

Biro Organisasi

Jumlah Responden : 25%

Nilai IKM : 92,02%

Capaian Tindak Lanjut : 75%

Biro Umum dan Perlengkapan

Jumlah Responden : 30%

Nilai IKM : 89,91%

Capaian Tindak Lanjut : 100%

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah Responden : 25%

Nilai IKM : 57,31%

Capaian Tindak Lanjut : 100%

11. Persentase Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia)

Laporan capaian aksi HAM di sampaikan secara berkala oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat setiap periode 4 bulanan yaitu periode B04, B08 dan B12. Capaian hasil pelaporan aksi HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tahun	Periode			Rata-rata Nilai Capaian
2020	100	100	100	100
2021	88,89	75	89,14	84,34
2022	86	100	100	95,33
2023	96,88	100	100	98,96
2024	100	86,4	100	95,47

Nilai rata-rata Capaian Laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024 mencapai angka 75,01 % yang mengartikan bahwa rata-rata nilai

capaian dalam kategori “mencapai target atau memuaskan.”

12. Capaian Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan 12%)

SAKIP Sekretariat Daerah berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJiP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
b. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.
c. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.
d. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
e. Sarana penyempurnaan organisasi ,kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
f. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

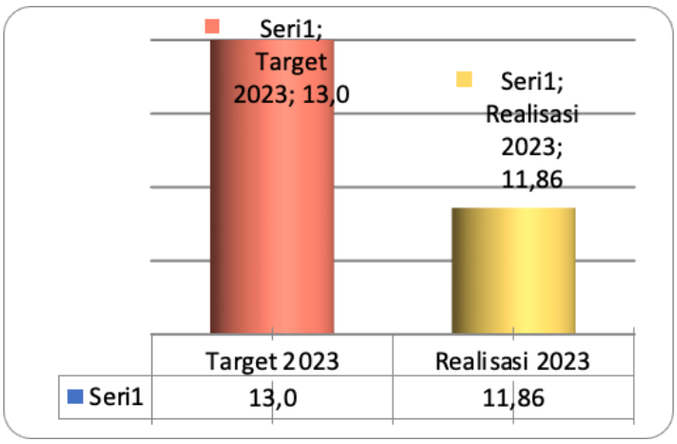

Grafik1.7 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)Tahun 2023

Nilai SAKIP	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (82-83)	A (83-84)	A (84-85)	A (85-86)	80,55
Capaian	BB (78,98)	BB (79-76)	BB (78,06)	BB (78,25)	96,25

Pada Tahun 2023 Nilai SAKIP (komponen pelaporan) Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 12% Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memperoleh komponen nilai pelaporan 11,86%. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah hampir sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik, banyak yang harus diperbaiki dari sistem kinerja, capaian penyerapan kinerja program dan kegiatan yang menunjang kinerja dari semua indikator kinerja dan sasaran tepat guna.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dan memperbaiki laporan kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Dokumen Laporan Kinerja LKJIP belum direvisi secara internal.
2. Laporan Kinerja telah disusun, namun informasi yang disajikan belum menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan budaya kinerja langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Menyusun dokumen data kinerja, yang relevan untuk mengukur capaian kinerja serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala (terus menerus dengan interval waktu yang relatif sama) yang dituangkan dalam Rencana Aksi atas kinerja.
2. Melakukan pengukuran kinerja yang disesuaikan dokumen dengan aktivitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.
3. Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai.
4. Melakukan revisi atas Laporan Kinerja LKJLP secara internal.
5. Memanfaatkan informasi pada laporan kinerja agar menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai.
6. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2022.
7. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencaan kinerja dimasa yang akan datang

Nilai SAKIP dari sisi komponen penilaian sudah hampir memenuhi nilai target 2023 sebesar 12% sebesar 11,86% tinggal 1 poin tapi masih perlu berupaya untuk bisa meningkatkan nilai

sakip pada komponen pelaporan kinerja. Kedepannya Sekretariat Daerah berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dari sisi komponen lebih baik. Upaya – upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2024 yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Biro untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
3. Komitmen dan Ownership SAKIP ,dari lebel pimpinan hingga ke level staf.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, penjelasan capaian kinerja secara komprehensif dan pemanfaatannya dalam pengambil kebiajkan.
5. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.
6. *Optimalisasi system* manajeman kinerja melalui dukungan teknologi (TIK).

Capaian Nilai SAKIP dari sisi komponen nilai dapat dicapai dengan adanya dukungan program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring evaluasi SAKIP serta kegiatan bimbingan teknis dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

13. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi .(Indeks RB)

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 yaitu 69,14 dengan kategori“**B**”. Peningkatan Indeks RB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

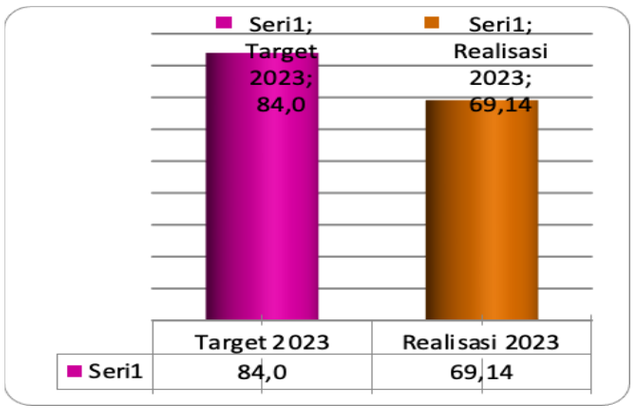

Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 hasil evaluasinya “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRV nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 yaitu 65,04 dengan kategori “**B**”dan pada tahun 2021 yaitu 61,13 dengan kategori “**B**” mengalami peningkatan sebesar 3,91 hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yangditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Tahun

2023 ada 2 komponen penilaian yang dinilai yaitu RB General dan RB Tematik sehingga bobot nilainya mengalami peningkatan menjadi 69,14 dan sistem penilaiannya berbeda dari tahun sebelumnya.

Hambatan yang masih dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya ASN yang belum paham terhadap arah kebijakan Reformasi Birokrasi.
2. Diperlukannya komitmen yang kuat seluruh ASN dan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Masih adanya belum kesesuaian antara program/kegiatan yang akan dicapai dengan indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Di bentuknya kelompok kerja Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait terhadap capaian Reformasi Birokrasi.
3. Menyusun dan finalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sambil menunggu arah kebijakan *Road Map* Nasional.

14. Capaian Indikator Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat di Fasilitasi

1. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi
2. Pemberangkatkan Kafilah MTQ/STQ ke Tingkat Nasional.

Daftar Penerima Hibah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Berikut :

Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022

1. BKPRMI Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.8.850.000.000
2. LPTQ Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 4.450.000.000
3. BAZNAS Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 883.000.000

Jumlah Rp. 14.233.000.000

Tahun 2023

1. LPTQ dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 4.450.000.000,-
2. MUI dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 950.000.000,-
3. Muhammadiyah Pagu Anggaran Sebesar Rp. 500.000.000,-

Jumlah Rp5.950.000.000,-

Tahun 2024

1. BAZNAS dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 600.000.000,-
2. BKPRMI dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.000.000.000,-
3. Lembaga Pengembangan Pesparani Pagu Rp. 500.000.000,-
4. Lembaga Pengembangan Pesparawi Pagu Rp.500.000.000,-
5. LPTQdenganPaguAnggaranSebesar Rp.4.600.000.000,-
6. MUI dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 750.000.000,-
7. FORPESS dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 925.000.000,-

Jumlah Rp. 9.875.000.000,-

Tahun 2025

1. LPTQ dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 7.000.000.000,-
2. BAZNAS dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 500.000.000,-
3. Muslimat NU Pagu Anggaran Sebesar Rp. 500.000.000,-
4. Lembaga Pengembangan Pesparawi Pagu Rp. 500.000.000,-
5. MUI dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 500.000.000,-

Jumlah Rp. 9.000.000.000,-

CAPAIAN KEGIATAN MTQ/STQH Tingkat Nasional

TAHUN	TARGET	CAPAIAN
2021	PERINGKAT 10 BESAR	PERINGKAT 9
2022	PERINGKAT 10 BESAR	PERINGKAT 8
2023	PERINGKAT 10 BESAR	PERINGKAT 3
2024	PERINGKAT 10 BESAR	PERINGKAT 5

15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi Bidang Perekonomian Yang Dapat Di Akses Publik

Capaian Indikator jumlah informasi bidang perekonomian yang dapat diakses publik persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% terealisai 100% hal ini disebabkan adanya dukungan data informasi dari berbagai aspek yang telah disediakan untuk menunjang kegiatan terlaksana dengan baik. Data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia antara lain:

1. Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (100%).
2. Identifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Wilayah Sumatera Selatan (100%).
3. Identifikasi Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat(KUR) Wilayah Sumatera Selatan (100%).
4. Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan (100%).
5. Promosi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Negeri(100%).

Dari keseluruhan data informasi yang disajikan hampir semua capaian kinerja terserap 100% dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada 2 pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yaitu fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro yang berorientasi kepada persentase data informasi pembangunan yang tersedia. Berikut ini Data Penyertaan Modal, Laba (Rugi), Deviden BUMD 2020-2024

2.PT.Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda)	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
Laba (Rugi)	521.232.728	1.602.334.089	4.074.006.780	2.984.687.210	5.848.833.851
Dividen	-	-	-	-	-

1. PT. Bank Sumsel Babel (Perseroda)	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	423.666.348.800	458.297.438.263	538.114.971.914	584.007.368.988	457.800.563.614
Dividen	-	56.866.949.483	71.318.740.435	91.983.475.608	80.188.171.852

3. PT Jamkrida Sumsel (Perseroda)	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	40.000.000.000 dan inbreng 32.300.000.000	-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	7.287.385.644	16.108.548.254	10.441.201.754	3.911.427.362
Dividen	-	-	3.643.692.822	8.054.274.127	5.220.600.873

5. PT.Sumsel Energi Gemilang (Perseroda)	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal		-	-	-	-
Laba (Rugi)	(2.526.463.269)	340.013.421	6.662.909.290	13.539.815.025	4.718.440.470
Dividen	4.738.328.468	-	-	2.300.000.000	6.769.907.513

4.PT.Sriwijaya Mandiri Sumsel	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	-	16.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	(1.742.326.767)	7.997.858.101	6.338.320.459	2.897.632.318	(1.643.016.383)
Dividen	-	-	-	869.918.414	5.220.600.873

6. PT tirta sriwijaya Maju (Perseroda)	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	-	-	66.000.000.000	-	-
Laba (Rugi)	-	-		16.530.635.589	13.368.223.390
Dividen	-	-	-	3.168.015.427	3.454.902.834

7. PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	-	5.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	(6.509.570.765)	(5.746.854.920)	(2.871.602.936)	(1.954.219.689)	(1.731.219.768)
Dividen	-	-	-	-	-

8. PT. Sriwijaya Agro Industri	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	4.114.901.552	-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	(3.784.511.411)	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-

9. PT. Syailendra Investasi Gemilang (Perseroda)	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	1.000.000.000	-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	(866.985.821)	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-

11.PT.Jakabaring Sport City	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal	9.000.000.000	15.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	(34.320.912.625)	(40.555.711.104)	(32.762.452.693)	(5.478.137.662)	(5.844.083.414)
Dividen	-	-	-	-	-

12. PD. PRODEXIM	2020	2021	2022	2023	2024
Penyertaan Modal		-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-

16. Capaian Kinerja Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020,2021,2022,2023 & 2024

Tahun 2020

Target Keuangan : Rp. 1.210.291.927

Realisasi Keuangan : Rp. 1.056.892.500 (87,33%)

Target Fisik : 100%

Realisasi Fisik : 91,95%

Tahun 2021

Target Keuangan : Rp. 2.600.000.000

Realisasi Keuangan : Rp. 2.317.845.877 (89,15%)

Target Realisasi : 100%

Realisasi Fisik : 94,34%

Tahun 2022

Target Keuangan : Rp. 1.948.361.750

Realisasi Keuangan : Rp. 1.386.394.614 (71,16%)

Target Fisik : 100%

Realisasi Fisik : 84,00%

Tahun 2023

Target Keuangan :Rp.11.496.794.185.917,5

Realisasi Keuangan :Rp.9.128.638.662.792,41(79,40%)

Target Fisik : 100%

Realisasi Fisik : 100%

Tahun 2024

Target Keuangan :Rp.11.597.662.841.485

Realisasi Keuangan (89,76%) :Rp.10.410.097.190.553

Target Fisik : 100%

Realisasi Fisik : 97,82%

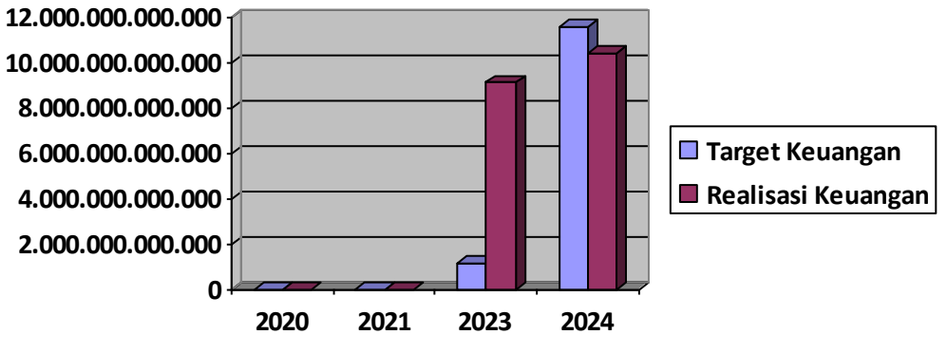

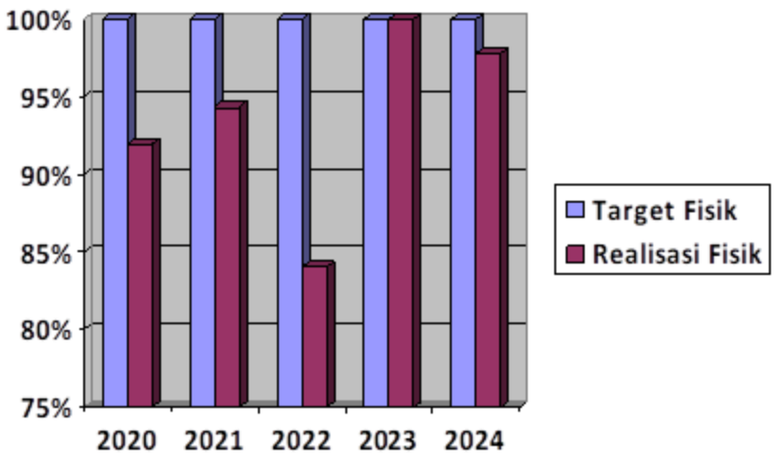

17. Capaian Indikator Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pada tahun 2023 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 88,60% atau dari 500 kegiatan terealisasi mencapai 443 kegiatan. Semua data di maksud dapat di akses oleh publik melalui website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro.

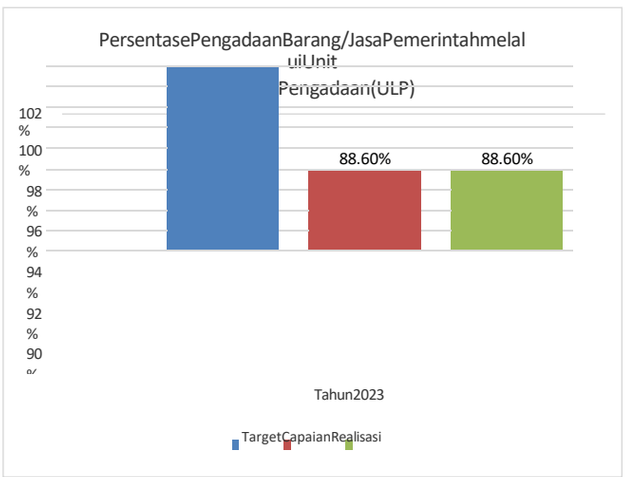

Grafik1.8PersentasePengadaanBarang/JasamelaluiUnitlayananPengadaan(ULP) Tahun 2023

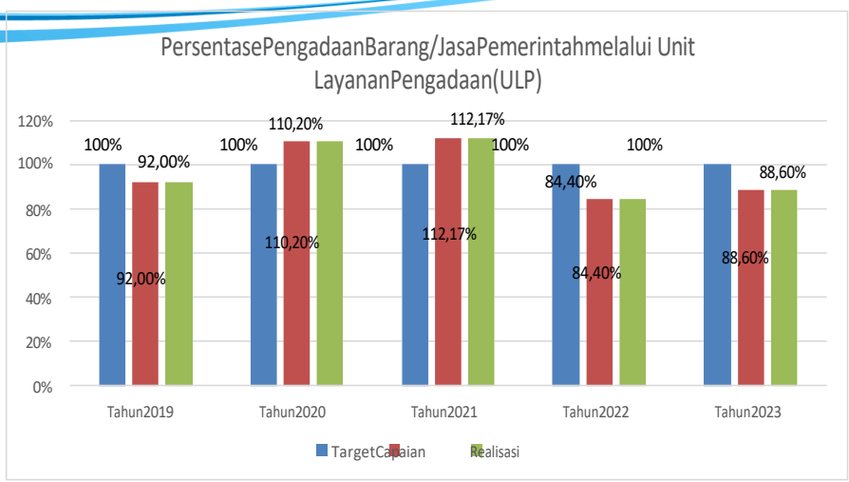

Capaian Persentase Pengadaan Barang/Jasa dari Tahun 2020 s.d 2024. Pada Tahun 2020 adalah 500 (Lima ratus) kegiatan dan realisasinya 551 Kegiatan (Lima ratus lima puluh satu) kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka 110,20% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 persentase pengadaan barang/jasapemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 134,6% atau dari 500 kegiatan terealisasi mencapai 673 kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka yang telah ditentukan diatas 100%

Pada Tahun 2022 persentase pengadaan barang/jasapemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 84,40% atau dari 500 kegiatan hanya terealisasi 422 kegiatan. jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 27,77% di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, ada beberapa paket pada pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui *E- Purchasing* baik itu melalui E-Katalog ataupun Toko Daring (Mbizzmarket dan Bela Pengadaan).

Pada Tahun 2023 persentase pengadaan barang/jasapemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 88,60% atau dari 500 kegiatan hanya terealisasi

443 kegiatan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,20% dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena makin banyaknya paket yang sudah beralih

Melalui E-Katalog local ataupun Toko Daring (Bela Pengadaan dan Mbizz market).

Tabel Capaian Indikator Kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP

NO.	Tahun	Target		Capaian	
		Persentase	Paket	Persentase	Paket
1	Tahun2020	100%	500	110,20%	551
2	Tahun2021	100%	500	134,6%	673
3	Tahun2022	100%	500	84,40%	422
4	Tahun2023	100%	500	88,60%	443

Sedangkan grafik capaian persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dapat dilihat dari Tahun 2023 Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sumatera Selatan Mengalami peningkatan 4,2% dari tahun 2022, hal ini disebabkan karena ada beberapa paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui E-Katalog lokal ataupun Toko Daring (Bela Pengadaan dan Mbizzmarket).

18. Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

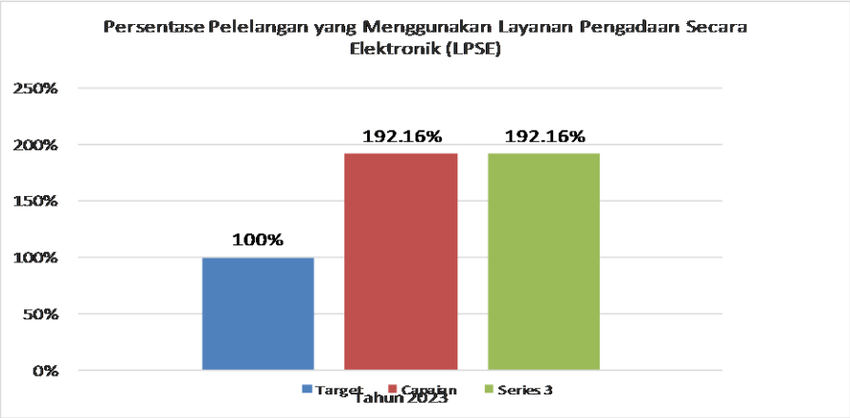

Grafik1.9Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2023

Pada tahun 2023 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) dan terealisasi sebesar 192,16% (5.765 kegiatan). Semua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro. Dapat di lihat SIRUP dan

Rekapitulasi Paket LPSE Report yaitu :

Paket Penyedia 2023-2024					
No	Metode	Paket		Pagu	
		2023	2024	2023	2024
1	Tender	363	220	936.068.052.885	766.234.427.356
2	Seleksi	114	75	57.104.469.124	47.245.789.000
3	Pengadaan Langsung	109	351	11.993.992.824	34.048.444.283
4	Penunjukkan Langsung	1706	1	148.649.148.391	120.900.000
5	Pengecualian	79	1	14.589.499.400	309.000.000
6	E-Purchasing	3.394	2.432	784.751.032.390	533.301.546.425
Total		5.765	3.080	1.953.156.195.014	1.381.260.107.064

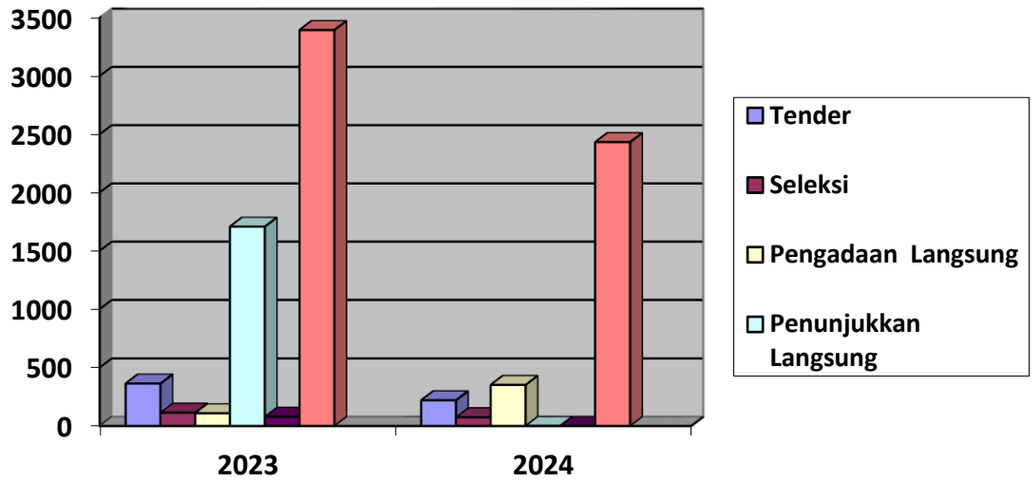
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2023
2024
Tender
Seleksi
Pengadaan Langsung
Penunjukkan Langsung

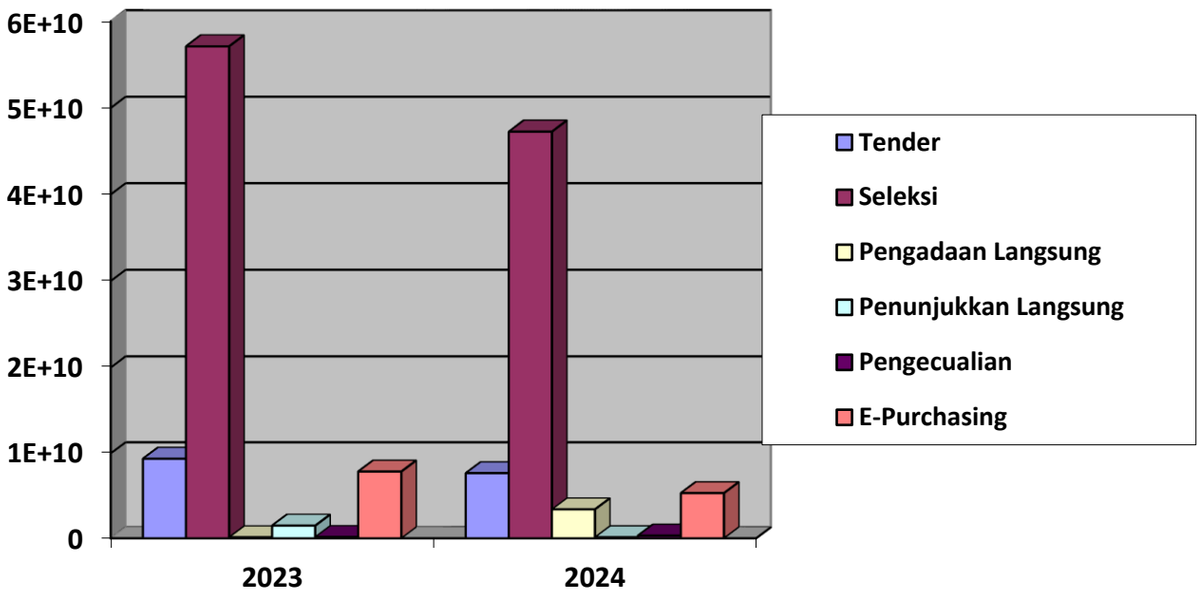
6E+10
5E+10
4E+10
3E+10
2E+10
1E+10
0
2023
2024
Tender
Seleksi
Pengadaan Langsung
Penunjukkan Langsung
Pengecualian
E-Purchasing

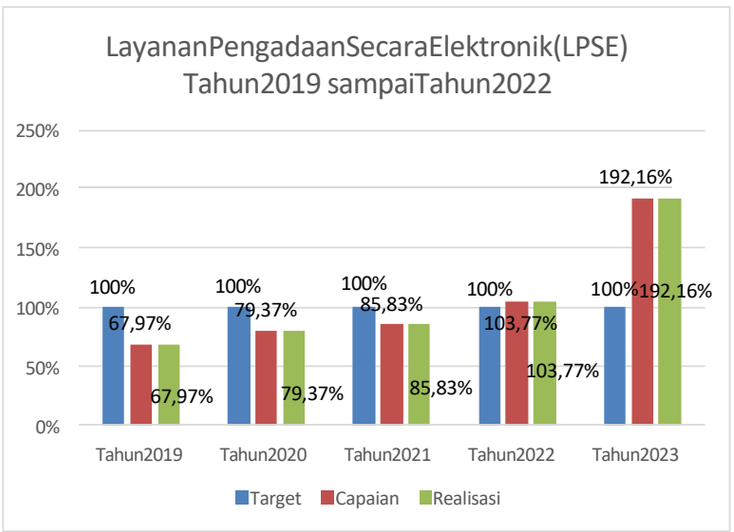

Dari grafik disamping terlihat bahwa persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari 2020-2024 terus mengalami peningkatan, sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% pada tahun 2022 dan 2023. Target Pelelangan yang menggunakan LPSE pada Tahun 2019 adalah 3.000 (tiga ribu) kegiatan dan realisasinya 2.039 (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka 67,97%dari target yang ditetapkan. Ke semua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro ,agar target dapat tercapai dilakukan pelatihan dan pemahaman mengenai aplikasi SIRUP.

Pada Tahun 2020 Target Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah 3.000 (tiga ribu) kegiatan dan realisasinya 2.381 Kegiatan (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu kegiatan), jumlah tersebut mencapaiangka79,37%

Pada tahun 2021 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) tetapi hanya terealisasi sebesar 85,83% (2.575 kegiatan). Capaian kinerja terserap sebesar 85,83% disebabkan masih ada Perangkat Daerah yang belum melaporkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi Sirup yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pada Tahun 2022 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) telah melebihi target yang telah di tentukan yaitu sebesar 17,94 (3113 Kegiatan dengan presentase (103,77%) persen dari target yang ditetapkan sebesar 100% (3.000 kegiatan).

Pada Tahun 2023 target mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 88,39 persen (5765 kegiatan dengan persentase 192,16%) dari target yang di tetapkan 3000 kegiatan dengan persentase 100%, hal ini bisa dicapai dikarenakan telah dilakukan pembinaan pelatihan dan pemahaman mengenai aplikasi SIRUP serta sudah mulai adanya tingkat kesadaran Perangkat Daerah untuk melaporkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Tabel Capaian Indikator Kinerja dari Tahun 2019 s.d 2023 Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE

No.	Tahun	Target		Capaian	
		Persentase	Paket	Persentase	Paket
1	Tahun 2020	100%	3000	79,37%	2381
2	Tahun 2021	100%	3000	85,83%	2575
3	Tahun 2022	100%	3000	103,77%	3113
4	Tahun 2023	100%	3000	192,16%	5765
5	Tahun 2024				

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat

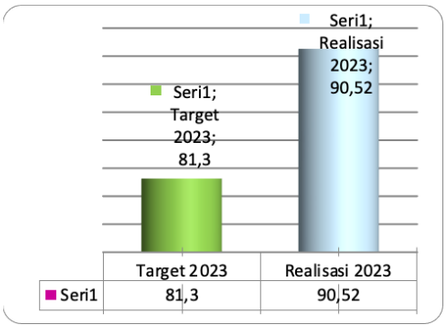

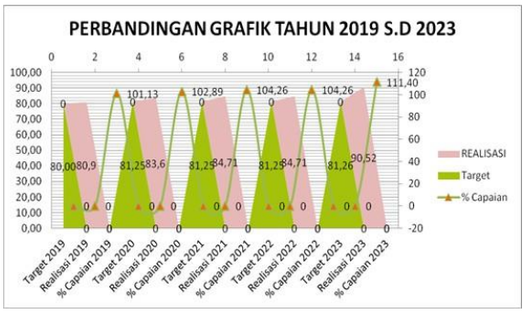

Grafik1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata "Baik" (62,51 – 81.25), untuk itu Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan mendapatkan nilai rata-rata "Sangat Baik" (90,52). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Sekreatriat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata "Sangat Baik" yaitu 81,26 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 90,52.

Capaian indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat dapat di lihat dari grafik disamping, terjadi peningkatan setiap tahunnya 2020 s.d 2025. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 yaitu 80,95 kategori "**B**"sudah melebihi kategori yang telah ditentukan dari indeks kumulatif dilingkungan Sekretariat Daerah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 83,60 kategori "**A**", dan tahun 2021dan 2022 yaitu 84,71 dengan kategori "**A**" dan tahun 2023 sebesar 90,52 "**A**" hal ini disebabkan adanya kerjasama pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan proses pengumpulan data sesuai tenggang waktu yang dijadwalkan. Adanya program yang mendukung pelaksanaan survei kepuasaan masyarakat yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
2. Biro Hukum dan Ham;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. Biro Perekonomian;

5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Humas dan Protokol;
9. Biro Umum dan Perlengkapan.

19. Capaian Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

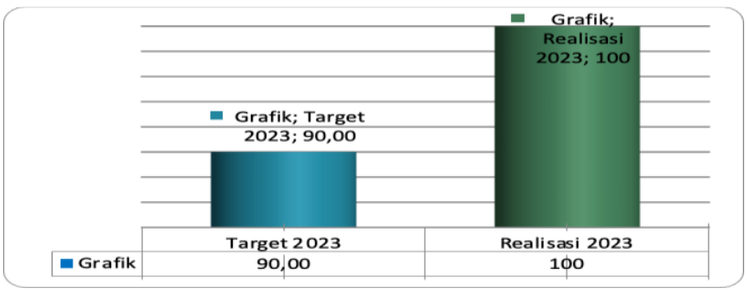

Grafik 1.11 Anjab dan ABK Tahun 2023

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada tahun 2023 ditargetkan 90% dan terealisasi 100% sebesar (111,11%). Hal ini terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah plus 9 (Biro) dan 3 (tiga) Staf Ahli yang ada di lingkunganPemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan validasi Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerjanya. Realisasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2023 yang mencapai 100% hal ini terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedomanan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi

Pemerintah.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3).

Oleh karena itu diperlukan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan Asistensi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Simona Kemendagri bagi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- ❖ Asistensi atau pendampingan dengan cara fasilitasi (konsultasi) pada proses penyusunan Anjab dan ABK bagi Perangkat Daerah yang perlu pengarahan lebih lanjut.

20. Capaian indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

Capaian persentase fasilitasi sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi 941%, hal ini dikarenakan waktu kegiatan yang terbatas.

Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat di akses oleh publik	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)		ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)						
			Penyampaian LKPJ dan RLPPD Pemerintah Prov. Sumsel yang tepat waktu		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD				
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelayanan Kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi.		3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec		3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec		100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang		60Pilar	60Pilar	60Pilar												
2			Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/ BUMN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.		65 MoU	65 MoU				35 MoU					53%				
3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik	Jumlah Peraturan yang dapat diakses oleh publik		13 Pergub					8 Perda		8 Perda	8 Perda		61,54%		80%	61,54%	
			Jumlah Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik		13 Pergub					8 Pergub		32 Pergub	8 Pergub		61,54%		120%	61,54%	
			Jumlah perkara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selesai		8 Perkara					8 Perkara		9 Perkara	8 Perkara		100%		78%	100%	
4	Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi		Jumlah Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		100%					100%		100%	100%		100%		100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pembinaan koperasi dan UMKM, Pertanian dan Sumber Daya Alam serta TPID Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kebijakan pembinaan LHK, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan jumlah BUMD yang dibina dan dievaluasi																	
			jumlah dokumen informasi investasi daerah jumlah kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah																
6	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tertangani			100%	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%	
7	Persentase Capaian Target Program Kegiatan APBD/APBN OPD Provinsi.	Jumlah realisasi Kegiatan APBD/APBN	100%		100%	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%	
8	Persentase Laporan yang dikelola	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Komponen Pelaporan	Jumlah Dokumen LKjIP Provinsi Sumatera Selatan		84		84	84											
		Persentase Penetapan Peraturan per Undang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku			100%		100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
9	Persentase PD yang telah menyusun anjab ABK	Jumlah PD yang telah membuat Anjab ABK			85%		85%	85%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Sumsel yang tertangani				100%		100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100%	100%	-	-	-	88,9%	-	-	-	-	98,0%	94,4%	-	-	-
2.	Persentase Kwalitas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99,3%	-	-	-	-	96,1%	99,6%	-	-	-
3.	Persentase Kepuasan Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	94,1%	-	-	-	-	96,7%	97,1%	-	-	-
4.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	82,4%	-	-	-	-	96,7%	97,1%	-	-	-
5.	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja PD	-	-	-	100%	100%	-	-	-	93,6%	-	-	-	-	99,7%	91,2%	-	-	-
6.	Persentase Kepuasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kedinasan KDH/WKDH	-	-	-	100%	100%	-	-	-	75,3%	-	-	-	-	96,5%	87,7%	-	-	-
7.	Program Dukungan Penguatan Peran dan Konpetensi Staf Ahli KDH dalam Mendukung Tugas dan Fungsi KDH	-	-	-	100%	100%	-	-	-	66,6%	-	-	-	-	78,9%	83,3%	-	-	-
	Kepmen 050-5889 Tahun 2020 (Kegiatan)																		
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah																		
8	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	95,9%	92,2%	-	-	-	97,9%	96,1%	-
9	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	96,3%	88,6%	-	-	-	98,1%	94,3%	-
10	Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	93,0%	99,0%	-	-	-	96,5%	99,5%	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	96,5%	97,5%	-	-	-	98,3%	98,8%	-
12	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,8%	97,5%	-	-	-	99,9%	98,8%	-
13	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	98,8%	94,4%	-	-	-	99,4%	97,2%	-
14	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,0%	99,6%	-	-	-	99,5%	99,8%	-
15	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	95,3%	96,2%	-	-	-	97,6%	98,1%	-
16	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	94,4%	99,5%	-	-	-	97,2%	99,7%	-
17	Persentase Peningkatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	98,9%	99,5%	-	-	-	99,4%	99,8%	-
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**60%**	**65%**													
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5000 materai	8000 materai	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Peralatan dan Bahan Pembersih				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran				25 Orang Honorer	25 Orang Honorer	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri				25 Kali	25 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**80%**	**80%**	-	-	-			-	-	-					
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Jenis	10 Jenis	-	-	-			-	-	-					
3	**Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur**				**80%**	**80%**	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				109 Orang/ 2 stel	109 Orang/ 2 stel	-	-	-			-	-	-					
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**				**100%**	**100%**	-	-	-			-	-	-					

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				75%	75%	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75%	75%	-	-	-			-	-	-					
5	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**				**100%**	**100%**	-	-	-			-	-	-					
	Dokumentasi dan Kliping				1000 Dokumen	1000 Dokumen	-	-	-			-	-	-					
	Penerbitan Informasi Pembangunan				5 Edisi	5 Edisi	-	-	-			-	-	-					
	Pembuatan dan Penayangan Informasi Layanan Masyarakat				3 Tema	3 Tema	-	-	-			-	-	-					
	Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik				101 media	101 media	-	-	-			-	-	-					
	Peliputan Kunjungan Kerja KDH/WKDH dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dan Tamu Pimpinan				350 Kali	350 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Pembuatan dan Penayangan Video Profil				1 Video	1 Video	-	-	-			-	-	-					
	Pengumpulan dan Penyaringan Informasi				3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	-	-	-			-	-	-					
	Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu SKPD				5 Jenis	5 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers				15 Kali	15 Kali	-	-	-			-	-	-					
6	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH**				**100%**	**100%**	-	-	-			-	-	-					
	Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-Tamu Pimpian				150 Kali	150 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				50 Kunker	50 Kunker	-	-	-			-	-	-					
	Pelaksanaan Silaturahmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan				30 Kali	30 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Rapat Koordinasi Bidang Keprotokolan se-Sumatera Selatan				85 Orang	85 Orang	-	-	-			-	-	-					
I	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti**						100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-	-				-	-								

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
2	**Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**				-	-				-	-								
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-	-				-	-								
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				-	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	-	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-	-				-	-								
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	-	-	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**				-	-				-	-				100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	-				-	-				100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	-	25 Laporan Honorer, 10 Laporan TKPD	25 Laporan Honorer, 20 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	25 Laporan Honorer, 21 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	-	-	25 Laporan Honorer, 10 Laporan TKPD	25 Laporan Honorer, 20 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	25 Laporan Honorer, 21 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 (T-C.24 PMDN 86/2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	264.026.754.315,56	413.465.314.064,00	401.417.722.247,00	324.321.513.300,00	319.778.463.628,00	240.311.428.297,00	373.822.753.885,00	358.193.712.579,99	285.400.339.028,92	293.086.919.482,71	1,10	1,11	1,12	1,14	1,09	0,21	0,22
- Belanja Pegawai	107.766.622.496,56	68.579.456.000,00	76.709.976.850,00	74.278.391.000,00	78.110.843.832,00	99.657.440.869,00	63.506.835.983,00	67.523.615.376,00	65.548.547.887,00	71.228.972.718,00	1,08	1,08	1,14	1,13	1,10	-0,28	-0,29
- Belanja Barang Jasa	156.260.131.819,00	187.374.933.902,00	221.447.966.934,00	240.113.022.300,00	206.429.278.796,00	140.653.987.428,00	167.560.391.552,00	206.263.914.689,99	213.460.176.585,92	186.755.492.003,71	1,11	1,12	1,07	1,12	1,11	0,32	0,33
- Belanja Hibah	0,00	157.510.924.162,00	103.259.778.463,00	9.930.100.000,00	35.238.341.000,00		142.755.526.350,00	84.406.182.504,00	6.391.614.556,00	34.653.454.761,00	-	1,10	1,22	1,55	1,02	-0,78	-0,76
Belanja Modal	53.502.556.462,00	83.967.363.150,00	66.402.039.786,00	46.514.653.100	36.033.553.244,00	46.902.852.215,40	75.361.131.480,00	63.802.446.443,00	41.511.027.151,00	34.626.117.864,00	1,14	1,11	1,04	1,12	1,04	-0,33	-0,26
TOTAL BELANJA	317.529.310.777,56	497.432.677.214,00	467.819.762.033,00	370.836.166.400,00	355.812.016.872,00	287.214.280.512,40	449.183.885.365,00	421.996.159.022,99	326.911.366.179,92	327.713.037.346,71	1,11	1,11	1,11	1,13	1,09	0,12	0,14

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

I. Biro Pemerintahan

- Bagian Tata Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
- DPRD Kabupaten/Kota

II. Biro Hukum dan Hak Asasi manusia

- Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
- Pejabat Pemerintah
- Masyarakat yang bermasalah hukum
- Organisasi Bantuan Hukum
- Lembaga / Instansi Pemerintah
- Akademisi

III. Biro Kesejahteraan Rakyat

- Masyarakat Umum
- Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial
- Organisasi Kemasyarakatan
- BUMN / BUMD
- Perangkat Daerah
- Daerah Otonomi Baru

IV. Biro Perekonomian

Kelompok Sasaran Biro Perekonomian Terdiri Dari :

- Bappeda
- Dinas Perdagangan Prov. Sumsel
- Kesbangpol
- BPKAD
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
- Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel

- Dinas Perindustrian Prov. Sumsel
- Dinas Perhubungan Prov. Sumsel
- Dinas ESDM Prov. Sumsel
- Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel
- Dinas Sosial Prov. Sumsel
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel
- Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel.

V. Biro Administrasi Pembangunan

- Perangkat Daerah
- Layanan (Administratif, Koordinatif Dan Analitis)
- Tim Evaluasi Dan Pengawasan (TERPA Atau Sejenisnya)
- Unit Pelaksanaan Kegiatan/Proyek
- Penyedia Barang Dan Jasa (Kontraktor/Konsultan
- Lembaga Pengawas (Seperti Inspektorat/Konsultan)
- Masyarakat Umum (Sebagai Penerima Manfaat Pembangunan)

VI. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Unit Kerja Pemerintah (Perangkat Daerah, Sekolah Dan Desa)
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Penyedia Barang dan Jasa
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Lembaga Pengawas (Inspektorat, BPK, KPK)
- Masyarakat Umum (Sebagai Pengguna Hasil Pengadaan)

VII. Biro Organisasi

- Perangkat Daerah
- Aparatur Sipil Negara
- Unit Pelayanan Publik (UPP)

- Tim Reformasi Birokrasi/Zona Integritas
- Pimpinan Perangkat Daerah
- Masyarakat Umum/Pengguna Layanan Publik

VIII. Biro Umum dan Perlengkapan

- Biro dilingkup Setda Prov. Sumsel
- PD dilingkup pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Organisasi kepemudaan
- Organisasi keagamaan
- Pemerintah kabupaten kota se Sumatera Selatan
- Perbankan
- Lembaga sosial kemasyarakatan
- Lembaga keuangan vertical
- Forum komunikasi perangkat daerah se-Sumatera Selatan
- BUMN / BUMD

IX. Biro Humas dan Protokol

- Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota Dan Wakilnya)
- Perangkat Daerah (OPD)
- Media Massa (Cetak, Elektronik Dan Online)
- Masyarakat Umum
- Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama
- Instansi Vertikal Dan Lembaga Mitra Pemerintah
- Delegasi Atau Tamu Resmi Pemerintahan
- Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2.1.5 Mitra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberian Pelayanan

Sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi strategis tersebut, Setda melaui 9 Biro yang ada dalam strukturnya membangun jejaring kemitraan yang luas, baik dengan internal perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, maupun mitra non-pemerintah.

Berikut tabel mitra pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan :

No	Staf Ahli	Biro	Dinas/Badan/ Instansi Vertikal	Bentuk layanan/fasilitasi
1.	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov. Sumsel	- Dinas PMD - Badan Kesbangpol - Bagian Pemerintahan Kab/Kota - Bappeda	- Koordinasi pemerintahan umum - Pembinaan otonomi daerah - Sinkronisasi penataan wilayah
		Biro Hukum dan HAM	- Seluruh OPD pengusul produk hukum - Bagian Hukum Kab/Kota - Kanwil Kemenhum - Bappeda	- Fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum - Bantuan hukum - Sinkronisasi regulasi dengan kebijakan pembangunan
		Biro Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial - Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan & Pariwisata - Kanwil Kemenag	- Fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial, budaya, kepemudaan - Dukungan koordinasi program layanan dasar publik

			- Organisasi Sosial/Keagamaan	
2.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Biro Perekonomian	- Dinas Perindag, Pertanian, Perkebunan - Dinas ESDM, Dinas Perhubungan - Bank Indonesia, OJK, BUMD	- Koordinasi stablitas ekonomi - Fasilitasi TPID - Pengendalian harga dan distribusi logistik
		Biro Administrasi Pembangunan	- Bappeda - BPKAD - KPPN - OPD Prov Sumsel	- Monitoring dan evaluasi pembangunan - Pelaporan realisai fisik dan keuangan OPD terkait dana APBD dan APBN
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	- LKPP RI - Seluruh OPD pengguna anggaran - UKPBJ Kab/Kota - Inspektorat - BPKAD	- Koordinasi - Pendampingan dan pembinaan pengadaan - Pengawasan proses pengadaan - Sinkronisasi anggaran pengadaan
3.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Biro Organisasi	- Seluruh OPD - BKD - Bappeda - KemenPAN-RB, BKN	- Pembinaan kelembagaan - Penyusunan struktur organisasi, ANJAB, ABK - Penguatan kapasitas organisasi
		Biro Umum dan Perlengkapan	- Seluruh OPD pengguna layanan perkantoran - BPKAD - BKD	- Penyediaan fasilitas, logistik, perlengkapan - Pengelolaan aset/barang - Layanan umum perkantoran dan dukungan kepegawaian
		Biro Humas dan Protokol	- Dinas Kominfo - Seluruh OPD penyelenggara kegiatan pimpinan - Media massa dan lembaga penyiaran - DPRD	- Layanan keprotokolan - Publikasi dan komunikasi publik - Dukungan hubungan media dan penyebaran informasi kebijakan pemerintah

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Setda Sumsel) memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dukungan BUMD terhadap kinerja Setda Sumsel tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari kontribusi pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, partisipasi dalam peningkatan kulaitas pelayanan publik, peran dalam mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah, hingga memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan.

Aspek Dukungan	Bentuk Peran BUMD	Biro Terkait
Dukungan program/kegiatan	- Penyediaan logistik kegiatan resmi - Penyedia jasa transportasi dan akomodasi - Dukungan sponsor pada acara sosial, budaya, keagamaan	Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Kesra
Peningkatan pelayanan publik	- Inovasi layanan digital pembayaran/perizinan - Layanan publik dasar (air bersih, transportasi, energi, keuangan) berbasis teknologi	Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan
Penguatan ekonomi daerah	- Mendorong investasi dan memperkuat rantai pasok lokal - Diversifikasi usaha sektor	Biro Perekonomian

	strategis	
Kontribusi PAD	- Memberikan dividen dan bagi hasil kepada daerah - Menjadi sumber penerimaan pajak/retribusi	Biro Perekonomian, Biro Umum dan Perlengkapan

Kontribusi BUMD melalui dukungan program, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan struktur ekonomi daerah, dan juga terhadap PAD menjadi salah satu bentuk sinergi yang nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda. Sinergi ini semakin diperkuat melalui forum koordinasi, penyelarasan rencana bisnis, dan pertukaran informasi strategis yang dikelola secara terintegrasi dengan arah kebijakan RPJMD dan sasaran Renstra Setda Sumsel.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Setda

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama daerah. Kerja sama ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas daerah, memperluas jaringan kemitraan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra. Tanggung jawab ini umumnya dikoordinasikan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, namun pelaksanaannya bersifat lintas biro tergantung pada substansi kerja sama. Untuk lebih rincinya dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Jenis kerja sama	Peran Setda	Biro Penanggung Jawab	Mitra Utama
Kerja sama antar daerah (KSD)	Memfasilitasi penyusunan naskah kesepakatan	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah	Pemprov lain, Pemkab/Pemkot dalam/luar Sumsel

	bersama (MoU), koordinasi antar kepala daerah, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama		
Kerja sama dengan pemerintah pusat	Mengoordinasikan persetujuan, harmonisasi substansi kerja sama, dan pengawalan implementasinya di tingkat daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (koordinator umum); Biro Administrasi Pembangunan (teknis)	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat
Kerja sama dengan Badan Usaha (BUMN/BUMD/ Swasta	Memfasilitasi proses negosiasi, telaah hukum, koordinasi dengan perangkat daerah teknis, dan persetujuan dari kepala daerah	Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang/Jasa	BUMN, BUMD, Perusahaan swasta nasional/daerah
Kerja sama dengan lembaga non-pemerintah	Melakukan koordinasi lintas biro (misalnya Biro Kesra, Biro Organisasi) untuk mendukung proses administrasi dan pembiayaan kegiatan kerja sama	Biro Kesra, Biro Organisasi	Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Masyarakat, Lembaga Keagamaan

Melalui pengelolaan kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi, Setda Sumsel mampu memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalankan benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahn dan pelayanan publik. Sinergi antar pihak yang terbangun melalui kerja sama ini juga memperkuat daya dukung terhadap

pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

Permasalahan dan Isu strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan strategis. Permasalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan (target), baik dari sisi kinerja kelembagaan, sumber daya, maupun capaian pelayanan. Sementara itu, isu strategis adalah hal-hal pokok, mendesak, berdampak besar, dan perlu segera ditangani atau ditindaklanjuti, yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2025–2029 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan dinamika global, arah pembangunan nasional, serta isu-isu strategis regional Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
2) Masih belum optimalnya kinerja Aparatur Pelaksana Kerja Sama dalam hal perencanaan dan eksekusi pelaksanaan kerja sama daerah

3) Kekurangan regenerasi tokoh adat/agama; perbedaan pandangan di antara tokoh yang berpengaruh; keterbatasan dukungan fasilitas pembinaan sosial. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (ASN), masih terdapat penempatan ASN yang belum sesuai dengan Kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja
4) Optimalisasi Penataan Perekonomian daerah masih belum tercapai secara maksimal akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki Keahlian Sebagai Analis Ekonomi dan Masih Terkendalanya Keterlambatan Pengiriman data-ata yang dibutuhkan dari instansi terkait lainnya dalam penyusunan laporan triwulan dan laporan tahunan
5) Minimnya Kapasitas Regulasi dan Pengawasan Aktifitas Perekonomian dalam rangka mendorong adposi ekonomi berkelanjutan
6) Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Akibat Kurangnya Pemahaman Para Pelaku Pengadaan
7) Belum Tersedianya alat ukur untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan peluang perbaikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses Pengadaan Barang Jasa yang adil, Transparan dan Akuntabel
8) Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
9) Belum Optimalnya Pelaksanaan dan Pengembangan data/Informasi Pembangunan
10) Belum optimalnya pelayanan dalam fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
11) Belum Optimalnya Capaian Reformasi Birokrasi
12) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perlu karena kurangnya Ketaatan Terhadap Standar Operasional Prosedur dan Budaya Kerja yang telah di tetapkan

13) Belum Optimal nya Upaya Reformasi Hukum, Belum memadainya SDM di bidang regulasi dan belum optimalnya partisipasi pembentukan regulasi
14) Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian serta Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta kualitas SDM yang belum sesuai
15) Belum Optimalnya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Serta Pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi, serta belum optimalnya peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah serta kurangnya efektifitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan
16) Penempatan ASN yang masih belum sesuai dengan Kompetensi dan Kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, permasalahan sekretariat daerah merupakan refleksi nyata dari tantangan global (digitalisasi, good governance, ekonomi berkelanjutan), tantangan nasional (reformasi birokrasi, integrasi data, pemerataan pembangunan), dan tantangan regional (kearifan lokal dan penguatan kelembagaan daerah) sebagaimana diuraikan dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini memperkuat posisi Sekretariat Daerah sebagai garda depan tata kelola pemerintahan daerah yang harus segera melakukan transformasi birokrasi, penguatan SDM, digitalisasi pelayanan, dan integrasi perencanaan untuk mendukung pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2 Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan nasional. Kelemahan birokrasi,

keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan sosial dan ekonomi yang muncul di daerah, seluruhnya beririsan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029.

Sebagai bagian dari wilayah strategis Sumatera Selatan, menghadapi tantangan regional, diantaranya :

- Potensi konflik horizontal: Perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengaruh budaya luar, serta lemahnya regenerasi tokoh adat/agama menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi.
- Kelembagaan adat dan kearifan lokal: Sumatera Selatan memiliki basis sosial-budaya yang kuat, namun perlu diperkuat perannya dalam menjaga harmoni dan mencegah konflik sosial.
- Kapasitas tata kelola pemerintahan daerah: Masih terdapat kendala koordinasi lintas kabupaten/kota, pelaporan pembangunan yang belum optimal, serta keterbatasan dalam pengembangan data pembangunan.

Di samping itu juga, isu strategis Internal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

1) Belum optimalnya koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan pemerintahan umum, serta rendahnya capaian Reformasi Birokrasi.
2) Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi, keterbatasan keterampilan, serta lemahnya manajemen SDM Aparatur
3) Masih adanya potensi konflik sosial, lemahnya regenerasi tokoh adat/agama, dan keterbatasan fasilitas pembinaan sosial.
4) Belum optimalnya pelaporan dan pengendalian pembangunan, keterlambatan pengiriman data, serta lemahnya sistem informasi pembangunan.

5) Keterbatasan kapasitas analisis ekonomi daerah, lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, serta belum optimalnya kerja sama daerah.
6) Sistem pengadaan barang/jasa belum optimal, minim pemahaman pelaku, serta belum adanya alat ukur kualitas dan akuntabilitas pengadaan.
7) Kurangnya efektivitas dukungan administrasi dan layanan pimpinan daerah, termasuk pemeliharaan sarpras, dokumentasi, dan penyampaian informasi kegiatan pimpinan.

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan yang harus segera diatasi agar Sekretariat Daerah mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Semua Isu strategis di atas memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan daerah :

- **Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka Ekonomi kerakyatan yang Berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat** → relevan dengan isu kapasitas ekonomi daerah, kerja sama regional, dan penguatan regulasi ekonomi berkelanjutan.
- **Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas** → relevan dengan mayoritas permasalahan Setda, termasuk reformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, optimalisasi pengadaan, serta pengembangan data pembangunan
- **Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan**

budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal → relevan dengan pengembangan toleransi kehidupan beragama.

Dengan demikian, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian **VISI RPJMD 2025–2029: "Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"** khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi konsultasi, Fasilitasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum Kabupaten/ kota diProvinsi Sumatera Selatan	Perencanaan pembangunan ramah lingkungan & partispasi	Tata Kelola pemerintahan yang efektuf dan transparan sebagai bagian dari Sustainnable Development Goals (SDG 16 Peace Juctice adn Strong Institutions	Reformasi birokrasi peningkatan kapasitas, tata kelola pemerintahan yang efektif	Sinergi antarwilyah, koordinasi pembangunan regional konsistensi kebijakan antarprovinsi	Peningkatan efektivitas koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan RANHAM di Daerah, yaitu Masih lemahnya tindak lanjut OPD dalam	Masih lemahnya tindak lanjut OPD dalam Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM (RANHAM) Aksesibilitas atau sarana dan prasarana yang	Tidak ada keterkaitan yang relevan dengan Biro Hukum	RPJMN dan SDGs terkait HAM dan Pembangunan berkeadilan	Tidak ada keterkaitan yang relevan dengan Biro Hukum	Penguatan koordinasi dan Implementasi RANHAM lintas sektor di tingkat Provinsi

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM (RANHAM)	layak bagi Penyandang Disbilitas				
Biro Kesejahteraan Rakyat	Kekurangan regenerasi tokoh adat/agama, perbedaan pandangan di antara tokoh yang berpengaruh, keterbatasan dukungan fasilitas pembinan sosial	Penguatan peran kelembagaan lokal, pelestarian nilai nilai sosial budaya, peningkatan kualitas SDM berbasis kearifan lokal	Pengaruh ideologi transnasional, perubahan nilai akibat globalisasi menjadi isu intoleransi	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pembinaan karakter serta pemajuan kebudayaan	Perubahan struktur sosial di pedesaan akibat masuknya pendatang dengan budaya yang berbeda	Memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga perdamaian
	Masih terdapat potensi konflik sosial akibat perbedaan kepentingan, kesenjangan pembangunan antar wilayah, pengaruh budaya luar yang dapat mengikis nilai lokal	Pelestarian adat budaya lokal, peningkatan kualitas kerukunan dan toleransi pembangunan dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal	Arus globaliasi dan modernisasi budaya serta pengaruh media digital terhadap nilai sosial menjadi isu toleransi	Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan serta pemajuan kebudayaan	Perbedaan budaya yang memerlukan adaptasi sosial dan pemerataan pembangunan antar wilayah	Memperkuat kerukunan antar umat beragama dan melestarikan kearifan lokal serta meningjkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya
Biro Perekonomian	Belum optimalnya pengelolaan kebijakan perekonomian daerah yang sinergi antara hulu dan hilir	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, Inflasi, PDRB Perkapita, Investasi, Kemiskinan dan Pengangguran).	Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity	Pertumbuhan Nasional	Sumsel Berintegritas dan melayani	-
	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomia	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan perekonomian yang	-	-	-	-

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	n dalam merespon dinamika lingkungan strategis perekonomian global/ nasional/ regional/ lokal yang sangat VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity)	mendasarkan sinergi data empiris yang handal (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pariwisata, Penanaman Modal dan Perhubungan).				
	Kurang efektifnya BUMD dalam implementasi kebijakan daerah yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.	Belum terdapat roadmap yang secara konsisten terkait penambahan penyertaan modal disetor kepada BUMD tiap tahunnya supaya tidak terjadi dilusi dan untuk pengembangan usaha.	-	Pertumbuhan ekonomi	100.000 Sultan Muda Sumsel	-
Biro Administrasi Pembangunan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Global	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Nasional	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Regional	Optimalisasi koordinasi antar OPD, peningkatan kualitas dan efektivitas pelaporan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mewujudkan ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan atau Suistanable Public	Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan memperbaiki sistem perencanaan, pengawasan dan	Suistanable Public Procurement	Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif	Rendahnya pengguna an teknologi tinggi pada industri	Menciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan kondusif.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Procurement Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkelanjutan pada Pemprov Sumsel	pelaksanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif				
Biro Organisasi	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Integrasi isu pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan kebijakan dengan memastikan organisasi dan tatalaksana birokrasi memungkinkan koordinasi antar instansi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.	Tatakelola perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs)	Reformasi Birokrasi (efisiensi sumber daya dan "green office") dan tatakelola digital	Koordinasi lintas batas dan penataan kelembagaan	Tatalaksana Pemerintahan
	Meningkatkan jasa kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang mencakup Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan merancang sistem akuntabilitas kinerja yang tidak hanya fokus pada target administratif, tetapi juga memasukkan indikator-indikator yang berkelanjutan.				
		Pemanfaatan teknologi dan tatalaksana digital dengan mendorong implementasi tatalaksana digital yang efisien.				
Biro Umum dan Perlengkapan	Belum optimalnya fasilitasi dan	Belum ada integrasi prinsip green building efisiensi	Kompetensi ASN perlu	Road Map Reformasi Birokrasi	Kesenjangan sarana	Optimalisasi pemeliharaan kantor

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	analisa kebuuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian serta belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta kualitas SDM yang belum selesai	energi dan ramah lingkungan dalam pengelolaan kantor	disesuaikan dengan perkembangan global	(RB) 2020-2025 dan RB tematik 2025-2029 menekankan efisiensi sarana prasarana dan kopentensi ASN serta UU ASN & manajemen Talenta Nasional menurut penempatan Asn berbasis kompetensi	dan prasarana antar wilayah memperlebar disparitas pelayanan publik serta SDM Aparatur belum merata kualitasnya sehingga mempengaruhi pelayanan Administrasi dan koordinasi pembangunan lintas wilayah	agar layak layanan administrasi tidak terganggu dan biaya jangka panjang efisiensi dan peningkatan kualitas SDm Aparatur melalui manajemen talenta. Pelatihan kompetensi digital dan green governance serta optimalisasi setda sebagai koordintaor dalam penyediaan sarana prasarana & pengelolaan ASN lintas Biro
Biro Humas dan Protokol	Belum Optimalnya peliputan dan dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah serta kurangnya efektifitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Hubungan Media: Membangunan Hubungan dengan Media untuk Meningkat Citra Pemerintah daerah dan menyebarluaskaninformasi pembangunan daerah	Penguatan Sistem Dokumentasi dan kehumasan digital

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Setda

3.1.1 Tujuan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Tujuan pembangunan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Sekretariat Daerah memiliki tugas utama membantu menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana dan aparatur serta pelayanan administratif perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut, berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yaitu **"Sumsel Maju Terus Untuk Semua"** yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, maka Sekretariat Daerah memiliki tujuan strategis yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang**

Efektif dan Efisien.

Sebagai pusat koordinasi penyelengaraan pemerintahan di tingkat provinsi, Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh biro di dalamnya mampu menjalankan tugas secara efektif, efisien, serta akuntabel. Hal ini berarti Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupaya membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berperan penting sebagai motor penggerak birokrasi di daerah. Selain itu, penguatan koordinasi internal antar biro di lingkungan Setda juga menjadi prioritas agar fungsi kesekretariatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan pimpinan dapat berjalan sinergis dan terpadu.

Disamping itu juga, Sekretariat Daerah sebagai unsur pelaksana administratif utama memegang peran penting dalam menyediakan layanan administrasi yang mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fokus utama Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perangkat daerah, berjalan dengan optimal. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan proses birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan standar pelayanan minimal. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan mereka, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

3.1.1 Sasaran

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas melalui penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra). Sasaran ini merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah sebagai koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor, serta sebagai pilar utama reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis tersebut terdiri dari tujuan program masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi:

Sasaran 1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah

Sasaran ini bertujuan mendukung Misi 6 RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029: "Meningkatkan penyelenggaraan Tata Kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas", melalui percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadikan birokrasi lebih terbuka, efisien dan responsif.

Hal ini diwujudkan melalui indikator Indeks kematangan Organisasi yang mencakup Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi, serta Indeks Pelayanan Publik. Target untuk Tahun 2030 menunjukkan peningkatan, yaitu SAKIP dengan nilai pelaporan 12,5 (AKIP pelaporan), indeks reformasi birokrasi naik menjadi A, dan indeks pelayanan publik tetap stabil 5,90. Peningkatan tersebut mencerminkan dorongan reformasi birokrasi yang lebih substantif, dengan birokrasi yang tidak hanya administratif

tetapi juga mampu beradaptasi dengan transformasi

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sasaran ini menekankan pentingnya kebijakan yang disusun secara berbasis data, aspiratif, dan sesuai prinsip otonomi daerah. Artinya, pemerintah provinsi memiliki kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam bingkai regulasi nasional.

Sasaran kedua ini masih mendukung Misi 6 melalui indikator efektivitas kerja sama daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung kepentingan pembangunan, maka efektivitas kerja sama daerah diperlukan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun, melaksanakan, dan memanfaatkan kerja sama dengan pihak lain (antar daerah, dengan pemerinath pusat, maupun dengan pihak ketiga seperti BUMD, swasta, an lembaga internasional). Efektivitas kerja sama daerah tidak hanya dilihat dari jumlah perjanjian atau MoU yang ditandatangani, tetapi lebih kepada kebermanfaatan nyata dari kerja sama tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertib dan efektif menjadi prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas pemerintahan, ketertiban sosial, serta kelancaran pembangunan. Indikator ini umumnya merujuk pada hasil Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai amanat Undang-undang otonomi daerah.

Sasaran 3. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sasaran ini menekankan pentingnya optimalisasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diwujudkan melalui indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat berarti bahwa program-program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pengentasan kemiskinan dapat berjalan sesuai perencanaan, terukur hasilnya, memberi manfaat nyata, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan.

Sasaran ini sejalan dengan Misi 7 RPJMD Sumatera Selatan **"Mewujudkan Kehidupan Beragama, Seni dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal"**.

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, penyusunan produk hukum yang dihasilkan tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi mulai dari level strategis, implementatif, hingga operasional, sehingga kebijakan daerah dapat berjalan dengan terarah, terukur, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Sasaran ini masih termasuk dalam pencapaian Misi 6 dengan fokus meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami

permasalahan hukum. Indikator untuk sasaran tersebut adalah produk hukum yang dihasilkan, yang merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah daerah, khususnya Sekretariat Daerah, dalam memfasilitasi penyusunan dan penerbitan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Produk hukum daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), maupun Keputusan Gubernur , menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum, arahan kebijakan, serta dasar pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Selatan.

Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran ini menekankan pada upaya pemerintah daerah, khususnya Sekretariat Daerah, untuk memperluas akses perlindungan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan dan berpenghasilan rendah. Kebijakan pengelolaan perekonomian yang efektif ditandai dengan tercapainya stabilitas makro ekonomi daerah, seperti terkendalinya inflasi, meningkatnya investasi, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi lokal maupun nasional.

Sasaran ini memiliki keterkaitan langsung dengan Misi 2 RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029: **"Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat"**. Sementara itu, melalui indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pembangunan diharapkan tidak hanya menilai keberadaan regulasi atau program, tetapi juga menekankan pada kualitas hasil,

dampak keberlanjutan, serta sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada terwujudnya sistem pengadaan yang modern, profesional dan berbasis teknologi informasi. Melalui penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pemerintah daerah didorong untuk menerapkan tata kelola pengadaan yang lebih terstandar, meningkatkan kompetensi SDM pengelola, serta mengintegrasikan sistem elektronik yang mampu meminimalisasi potensi penyimpangan.

Sasaran ini memiliki indikator berupa tingkat kematangan UKPBJ, yang menjadi tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan Setda Provinsi Sumatera Selatan mencapai sasaran strategis penguatan kualitas pengadaan barang dan jasa. Peningkatan skor kematanga UKPBJ dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah agar lebih terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Melalui peningkatan kualitas kebijakan administrasi pembangunan, diharapkan terwujud keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program, pemborosan anggaran, maupun

keterlambatan capaian target.

Sasaran ini juga termasuk dalam Misi 6 RPJMD, dengan indikatornya yaitu efektivitas kebijakan administrasi pembangunan. Kebijakan administrasi pembangunan yang efektif ditandai dengan adanya sinergi antar perangkat daerah, kesesuaian dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan RKPD), serta konsistensi pelaksanaan program sesuai alokasi sumber dayanyang tersedia.

Sasaran 8 dan 9. Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah

Sasaran ini hanya merupakan kegiatan rutin yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, Biro Umum dan Perlengkapan berperan menyediakan sarana dan prasarana, layanan administrasi umum, dan penunjang operasional bagi pimpinan maupun seluruh perangkat daerah. Peningkatan kualitas biro ini berarti efisiensi logistik, pengelolaan aset, serta dukungan administrasi yang memperlencar roda pemerintahan.

Selain Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol juga bertugas membangun komunikasi publik, penyebarluasan informasi kebijakan, serta pengelolaan hubungan kelembagaan dan protokoler. Kualitas yang meningkat akan memperkuat citra pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dengan pamangku kepentingan.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 khususnya untuk prioritas Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana dan aparatur, serta pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	
		Meningkatnya tata Kelola Organiasi Pemerintahan Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	BB 5,88	12 5,90	12 5,90	12 5,90	12 5,90	12,5 5,90	12,5 5,90	Penataan Organisasi
		Meningkatnya Kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1) Efektivitas kerja sama daerah 2) Kinerja penyelenggaraan pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100	100	100	Kesejahteraan Rakyat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100	100	100	100	100	100	100	Hukum
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	Perekonomian
	Kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	100	100	100	100	100	100	100	Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan administrasi pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	Administrasi Pembangunan
	Biro Umum dan Perlengkapan Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya pendukung urusan pemerintahan	Meningkatnya pelaksanaan pendukung urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	Umum dan Humas

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Setda

3.2.1 Strategi

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks dan cepat berubah baik di tingkat Nasional maupun Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun strategi Renstra yang fokus pada optimalisasi sumber daya, tahapan implementasi yang terukur, penentuan fokus prioritas, serta penyusunan program dan kegiatan secara sistematis.

Strategi ini diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal, serta memperkuat peran Setda sebagai motor penggerak birokrasi provinsi.

Langkah-langkah strategis Setda tersebut diantaranya :

a. Optimalisasi Sumber Daya

Sebagai penggerak utama roda birokrasi, ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memiliki kapasitas dan karakter yang mumpuni. Oleh karena itu, strategi penguatan SDM difokuskan pada tiga aspek utama :

1) Peningkatan Kompetensi ASN

Aparatur Sipil Negara perlu terus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan dinamika tugas pemerintahan. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi : Pelatihan Teknis (Bimbingan Teknis), diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan keahlian sesuai unit kerja masing-masing, seperti administrasi perkantoran, perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengarsipan, dan pelayanan publik.

Selanjutnya bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (Diklat) yang bertujuan agar para pejabat memiliki kemampuan manajerial, pengambilan keputusan, serta ketangguhan dalam menghadapi perubahan.

Di sisi lain, literasi digital perlu diperkuat mengingat transformasi digital dalam sistem pemerintahan sudah tidak dapat dihindari, sehingga

penguatan pemahaman ASN terhadap sistem informasi pemerintahan (seperti e-office, e-arsip, e-Sakip, e-Monev, e-Kinerja) harus menguasai penggunaan aplikasinya agar proses kerja lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik guna menunjang efektivitas kerja sehari-hari.

2) Penguatan Budaya Kerja

Dalam kondisi lingkungan kerja yang menuntut kolaborasi lintas bidang, budaya kerja ASN di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus diarahkan pada nilai-nilai kerja yang selaras dengan prinsip berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Hal ini berarti setiap ASN tidak hanya bekerja secara individual, tetap mampu menbangun sinergi dengan bagian lain untuk mencapai tujuan bersama.

3) Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier

Kondisi pengelolaan SDM di era sekarang mengharuskan adanya sistem evaluasi yang objektif, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi kinerja tidak hanya didasarkan pada kehadiran, tetapi lebih pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran kerja pegawai (SKP).

Hasil evaluasi kinerja dijadikan dasar dalam pengembangan karier, sehingga promosi jabatan maupun kesempatan mengikuti pelatihan didasarkan pada prestasi kerja, bukan semata-mata faktor senioritas. Setiap ASN dipetakan potensinya agar ditempatkan sesuai kompetensi, dan diarahkan pada posisi yang bisa memaksimalkan kontribusinya.

b. Tahapan Implementasi Strategi

Strategi Sekretariat Daerah dijalankan secara bertahap selama periode Renstra (5 Tahun) dengan pendekatan berkelanjutan, yaitu :

- ✓ Tahun I (Perencanaan), fokusnya adalah mengubah strategi dari konsep menjadi rencana aksi yang konkret dan terukur.
- ✓ Tahun II-III (Pelaksanaan), berfokus pada waktu untuk mengeksekusi semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- ✓ Tahun IV (Evaluasi), bertujuan mengukur kinerja dan mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan.

✓ Tahun V (Penyesuaian), berfokus pada perbaikan dan penyesuaian strategi untuk masa depan.

Untuk penjelasan dari masing-masing tahapan di atas, dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Fokus Utama : Penataan dasar **Langkah Strategis :** - Penyusunan rencana aksi - Pembentukan tim implementasi - Alokasi sumber daya - Perbaikan sistem kerja dan SOP	**Fokus Utama** : Penguatan Tata Kelola **Langkah Strategis** : - Implementasi tata kelola berbasis kinerja - Penguatan koordinasi lintas bagian - Pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan	**Fokus utama** : Digitalisasi Administrasi **Langkah Strategis** : - Penerapan sistem e-Government secara luas (e-office, e-surat, e-Sakip, dll) - Pelatihan literasi digital ASN - Optimalisasi layanan administrasi pimpinan	**Fokus utama** : Evaluasi berkelanjutan **Langkah Strategis** : - Pengukuran Kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan - Pengumpulan umpan balik dari berbagia pihak - Analisis hasil; data kinerja dan umpan balik	**Fokus Utama** : Evaluasi Menyeluruh **Langkah Strategis** : - Evaluasi pencapaian sasaran Renstra - Perbaikan kelemahan dan penguatan program - Penyusunan rencana strstegis baru

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Kondisi yang diharapkan : terbangunnya kesamaan persepsi, struktur kerja yang jelas, dan SDM mulai ditempatkan sesuai kompetensi	**Kondisi yang diharapkan :** tata kelola semakin akuntabel, kondisi lebih lancar, dan kinerja mulai terukur dengan indikator jelas	**Kondisi yang diharapkan :** administrasi lebih cepat, efisien, transparan, dan pelayanan internal semakin berkualitas	**Kondisi yang diharapkan :** layanan dan tata kelola semakin merata, inovasi berhasil direplikasi, koordinasi antar OPD makin solid	**Kondisi yang diharapkan :** seluruh capaian dapat diukur, kelemahan teratasi, dan Sekretariat Daerah semakin berperan sebagai pusat koordinasi daerah

Dengan tahapan Renstra yang sistematis seperti ini, Sekretariat Daerah memastikan setiap langkah diambil secara terukur, tidak tergesa-gesa, dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi slogan, tetapi sebuah proses sistematis yang melibatkan setiap komponen organisasi, dari sumber daya manusia hingga teknologi, demi mencapai tujuan akhir; pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih efisien.

c. Fokus Strategis

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, Sekretariat Daerah Sumatera Selatan menetapkan 3 (tiga) fokus utama yaitu :

1) Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Saat ini kondisi birokrasi Sekretariat Daerah masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, proses kerja yang panjang, dan koordinasi antarbagian yang belum optimal. Untuk memperkuat tata kelola OPD, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengambil tiga langkah utama.

Pertama, melakukan reformasi birokrasi untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan melayani. Reformasi dalam hal ini juga mencakup pembenahan pola kerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan profesionalisme ASN.

Kedua, dilakukan penataan struktur dan fungsi organisasi agar lebih ramping, responsif dan sesuai dengan kebutuhan aktual pemerintahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas antarbagian. Ketiga, dilakukan penyederhanaan proses bisnis, yaitu memangkas alur kerja yang terlalu panjang menjadi lebih ringkas, jelas dan berbasis teknologi informasi.

2) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Akuntabilitas kinerja dan keuangan menjadi hal yang sangat krusial di lingkungan Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban publik. Untuk memperkuat hal tersebut, Setda Sumsel mendorong penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan jelas antara input, output, dan outcome.

Disamping itu juga, dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala sebagai langkah pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan. Tak kalah penting, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik juga dilakukan dengan membuka akses informasi publik secara luas, termasuk publikasi capaian kinerja dan laporan keuangan secara rutin.

3) Peningkatan Peran Strategis Sumsel di Tingkat Nasional

Saat ini, Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan lumbung energi nasional, terus diperkuat dengan peran strategis yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui peran dukungan koordinatif terhadap program strategis nasional, misalnya dengan memfasilitasi percepatan proyek-proyek prioritas yang didukung pemerintah pusat.

Selain itu, dilakukan advokasi dan komunikasi kebijakan pusat-daerah, yaitu memperkuat hubungan kelembagaan dan diplomasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan kementerian/lembaga agar kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan daerah. Langkah lainnya adalah penguatan daya saing birokrasi di tingkat regional, dengan meningkatkan kapasitas ASN, mempercepat pelayanan, dan membangun citra birokrasi Sumsel yang profesional dan kompetitif.

d. Penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan saling mendukung. Penentuan program dan kegiatan ini dilakukan secara terencana, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan, kebutuhan organisasi, serta tantangan lingkungan strategis yang dinamis.

Setiap program dirancang untuk mendukung fokus utama organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai bentuk operasionalisasi strategi, dan dilanjutkan pada sub-kegiatan sebagai unit kerja teknis yang lebih rinci dan terukur.

Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan :

- ✓ **8 Program Utama**, antara lain :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Program Penataan Organisasi
  - Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Program Kesejahteraan Rakyat
- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

✓ **30 Kegiatan Turunan**, yang mencakup :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

✓ **Lebih dari 100 Sub-Kegiatan**, contohnya :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- Penataan Analisis Jabatan
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
- Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Sosial

- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Data lengkap mengenai program/kegiatan/subkegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 2025-2029 akan dijabarkan di Bab IV.

1.2.2 Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan peran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai motor penggerak koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, diperlukan pemetaan yang jelas terhadap lokus tugas dan fungsi setiap biro yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Lokus di sini berarti ruang lingkup tugas, fungsi, dan fokus pelayanan strategis yang menjadi tanggung jawab masing-masing biro.

Berikut tabel Lokus 9 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Biro	Lokus (Ruang Lingkup Tugas/Fokus)
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tata kelola pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, fasilitasi pilkada, hubungan antar pemerintah
2	Biro Hukum dan HAM	Penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, penyuluhan hukum, fasilitasi perlindungan dan pemajuan HAM
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Urusan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Biro Perekonomian	Kebijakan ekonomi daerah, investasi, perdagangan, energi, pengelolaan sumber daya

		alam, serta koordinasi dunia usaha
5	Biro Administrasi Pembangunan	Perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah agar tepat sasaran dan akuntabel
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan sistem pengadaan, e-procurement, transparansi dan efisiensi belanja daerah
7	Biro Organisasi	Penataan organisasi perangkat daerah, analisis jabatan, tata laksanan, reformasi birokrasi, peningkatan kinerja ASN
8	Biro Umum dan Perlengkapan	Administrasi Umum, pengelolaan aset, rumah tangga pemerintahan, sarana dan prasarana, dan pelayanan operasional
9	Biro Humas dan Protokol	Hubungan masyarakat, publikasi kebijakan, dokumentasi, komunikasi publik, serta tata protokol pimpinan daerah

Di samping itu juga, untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang terukur, maka arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinatif dan administratif secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan nasional, sehingga berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode RPJMD.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan misi yang telah ditetapkan, sebagai berikut

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Setda

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Setda	Ket.
1.	Mengawal pengendalian inflasi daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga stabilitas harga dan pasokan barang strategis dapat terjaga dan mendukung stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1. Penguatan fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal dalam pengendalian inflasi daerah 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung TPID	Misi 2; berfokus pada Biro Perekoniman Setda Prov. Sumsel
2.	Melakukan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang	1. Penguatan koordinasi dan tata kelola implementasi SPBE di lingkungan Setda Prov.	Misi 6; berfokus pada Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Administrasi pembangunan,

	penyusunan roadmap transformasi digital pemerintahan	didukung oleh kualitas dan informasi	Sumsel 2. Pengembangan layanan pemerintahan digital yang terpadu dan mudah diakses	Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Setda	Ket.
3.	Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan mendorong kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan inklusif	Penguatan identitas budaya dan moderasi keagamaan	1. Fasilitasi dan dukungan kegiatan seni, budaya, dan kearifan lokal 2. Pengembangan program edukasi nilai toleransi, kerukunan, dan kebhinekaan	Misi 7; berfokus pada Biro Kesejateraan Rakyat Setda Prov. Sumsel

Dari ketiga arah kebijakan RPJMD yaitu peningkatan efektivitas TPID, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi, serta penguatan identitas budaya dan moderasi keagamaan menegaskan peran strategis Setda sebagai penggerak utama koordinasi lintas perangkat daerah.

Melalui penurunan arah kebijakan tersebut ke dalam Renstra Setda, diharapkan :

- ✓ Stabilitas ekonomi daerah terjaga melalui penguatan peran TPID dalam pengendalian inflasi secara terkoordinasi, berbasis data, dan responsif terhadap gejolak harga.
- ✓ Kualitas tata kelola pemerintahan meningkat melalui percepatan transformasi digital, integrasi data dan informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam budaya kerja digital.
- ✓ Kehidupan sosial masyarakat semakin harmonis melalui pelestarian budaya lokal, penguatan nilai toleransi, dan pembinaan moderasi beragama secara kolaboratif.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, Sekretariat Daerah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi, serta memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Seluruh program dan kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen operasional dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, mendukung koordinasi pembangunan lintas sektor, serta menunjang pelayanan administrasi pemerintahan yang efisien dan transparan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah ke depan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Apabila dilihat dari nilai anggaran, maka terdapat peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program-program yang telah disusun, sehingga peningkatan anggaran akan diiringi dengan peningkatan kinerja. Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan saling mendukung. Penentuan program dan kegiatan ini dilakukan secara terencana, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan, kebutuhan organisasi, serta tantangan lingkungan strategis yang dinamis.

Setiap program dirancang untuk mendukung fokus utama organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai bentuk operasionalisasi strategi, dan dilanjutkan pada sub-kegiatan sebagai unit kerja teknis yang lebih rinci dan terukur.

Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan :

- ✓ **8 Program Utama**, antara lain :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  - Program Penataan Organisasi
  - Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Program Kesejahteraan Rakyat
- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

✓ **30 Kegiatan Turunan**, yang mencakup :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- ✓ **Lebih dari 100 Sub-Kegiatan**, contohnya :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
  - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
  - Penataan Analisis Jabatan
  - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
  - Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
  - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
  - Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
  - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
  - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Sosial
  - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
  - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
  - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
  - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
  - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
  - Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Data lengkap mengenai program/kegiatan/subkegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Indek Reformasi Birokrasi	**Program** Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Kegiatan** Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Sub Kegiatan** Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Kegiatan** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya administrasi Diklat Kepemimpinan	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Sub Kegiatan** Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Sub-Kegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional jabatan	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Sub Kegiatan** Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Sub Kegiatan** Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	**Kegiatan** Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya administrasi jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	**Sub-Kegiatan** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Program** Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Kegiatan** Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tersusun Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Sub Kegiatan** Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Sub Kegiatan** Fasiilitasi Penataan Wilayah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Kegiatan** Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Sub Kegiatan** Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Sub Kegiatan** Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Kegiatan** Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Pemerintah	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	**Sub Kegiatan** Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi		Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah		Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah		Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah		Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya administrasi jasa pelayanan umum kantor	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah		Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya administrasi Bimbingan Teknis	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya administrasi Diklat Kepemimpinan	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya pakaian dinas lapangan	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Pengadaan Pakaian Dinas	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah		Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya kendaraan dinas operasional jabatan	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Hukum

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya Informasi Teknologi	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Biro Hukum
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan		Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	terlaskananya Fasiltasi dan evaluasi Produk Hukum Kabupaten/kota	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Msalah Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Menigkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaiana Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi		Biro Kesejahteraan Rakyat
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Penggadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penggadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Penggadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan lainnya	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat

			Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna Lainnya.	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Biro Kesejahteraan Rakyat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Indek Reformasi Birokrasi		Biro Perekonomian
		Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah		Menigkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah		Biro Perekonomian
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Perekonomian
					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Perekonomian
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Perekonomian
					Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Perekonomian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Perekonomian
					Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Perekonomian
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Perekonomian
					Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Perekonomian
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Perekonomian
					Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Perekonomian
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan pakaian dinas	Biro Perekonomian
						Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Biro Perekonomian

						Benchmaking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Biro Perekonomian
						Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Biro Perekonomian
						Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Biro Perekonomian
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan		Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan		Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan		Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanEnergi dan Air	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan		Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Biro Perekonomian

	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	TersedianyaHasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Biro Perekonomian
	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya HasilKoordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolahan Perekonomian dan Pembangunan	5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Biro Perekonomian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi		Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terkendalinya administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Tersedianya analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Tersusunnya pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Biro Administrasi Pembangunan
	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tingkat Kematang UKPBJ	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultansi danatau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematang UKPBJ	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.1.1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Organisasi
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.2.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.2.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.3.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Biro Organisasi
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.3.2. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.3.3. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.3.4. 'Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.3.5. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Organisasi
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.3.6. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.4.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.4.2. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Organisasi
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.4.3. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.5.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.5.2. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Biro Organisasi

	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.6.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Ditetapkan Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi
			Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.7.1. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Biro Organisasi
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintah	1.7.2. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Biro Organisasi
	Penataan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	2. Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	2.1.1. Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	2.1.2. Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Biro Organisasi
	Penataan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	2.1.3. Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Ditetapkan Dokumen Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	2.2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2.2.1. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
			Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Provinsi dan Setda)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2.2.2. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
	Penataan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	2.2.3. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Biro Organisasi
	Penataan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	2.2.4. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Biro Organisasi
	Penataan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	2.2.5. Sub-Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.				Indeks Reformasi Birokrasi		Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan		Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan		Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan

	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Biro Umum dan Perlengkapan

	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Alat Besar	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Alat Besar	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Mebel	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Mebel	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan

	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Mebel	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
	Biro Umum dan Perlengkapan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.				Indeks Reformasi Birokrasi		Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan		Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti**	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan		Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biro Humas dan Protokol

	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Sub Penyiapan Materi pimpinan	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Sub Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	**Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Sub Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Humas dan Protokol
	Biro Humas dan Protokol	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pendukung Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendukung Urusan Pemerintahan	Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Biro Humas dan Protokol

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
Sekretariat Daerah															
Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Provinsi	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1,548,386,577	90%	871,078,016	90%	760,084,000	90%	783,067,511	90%	814,749,742	90%	857,469,629	90%	912,580,313	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaaan Tugas ASN dilaksanakan	161,760,000		135,480,000		192,480,000		156,840,000		156,840,000		156,840,000		156,840,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161,760,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	135,480,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	192,480,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Honorarium KPA selama 12 (dua belas) bulan	41,040,000	1 (satu) Orang KPA	31,080,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Honorarium PPTK selama 12 (dua belas) bulan	120,720,000	5 (lima) Orang PPTK	104,400,000	5 (lima) Orang PPTK	135,240,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fomal	-		-		-		**20,000,000**		**20,000,000**		**20,000,000**		-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya	-	-	-	-	-	**1 (satu) Orang**	**20,000,000**	**1 (satu) Orang**	**20,000,000**	**1 (satu) Orang**	**20,000,000**	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1 (satu) Orang	20,000,000	1 (satu) Orang	20,000,000	1 (satu) Orang	20,000,000	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	**547,398,577**		**260,000,000**		**260,492,000**		**399,115,511**		**490,797,742**		**383,517,629**		**510,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	**15,080,000**	**32 (tiga puluh dua) item**	**10,000,000**	**18 (tiga puluh dua) item**	**10,000,000**	**18 (tiga puluh dua) item**	**10,000,000**	**18 (tiga puluh dua) item**	**10,000,000**	**18 (tiga puluh dua) item**	**10,000,000**	**18 (tiga puluh dua) item**	**10,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	15,080,000	32 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**532,318,577**	**40 Kali**	**250,000,000**	**40 Kali**	**250,492,000**	**60 Kali**	**389,115,511**	**75 Kali**	**480,797,742**	**81 Kali**	**373,517,629**	**81 Kali**	**500,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	532,318,577	40 Kali	250,000,000	40 Kali	250,492,000	60 Kali	389,115,511	75 Kali	480,797,742	81 Kali	373,517,629	81 Kali	500,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	**-**		**-**		**160,000,000**		**60,000,000**		**-**		**150,000,000**		**98,628,313**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiional Lapangan yang tersedia	**-**		**-**				**60,000,000**		-		-		98,628,313	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiional Mobil (R4)	-	Unit	-		-			-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiional Motorl (R2)	-	Unit	-		-	2 Unit	60,000,000	-	-	-	-	2 Unit	98,628,313	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	**-**		**-**		**160,000,000**	Unit	**-**	Unit	**-**		**150,000,000**	-	**-**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Komputer, Printer , Laptop yang tersedia	-		-	6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop	160,000,000		-		-	3 (tiga) unit komputer, 3 (tiga) unit printer, 3 (tiga) unit laptop	150,000,000			Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	**839,228,000.00**		**475,598,016**		**147,112,000**		**97,112,000**		**97,112,000**		**97,112,000**		**97,112,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor Yang disediakan	**839,228,000**	**29 Orang**	**475,598,016**	4 Orang	147,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Orang Tenaga Administrasi Pelayanan Umum Kantor	839,228,000	29 Orang	475,598,016	4 Orang	147,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan	**22,362,646,423**	**90%**	**63,998,707,550**	**90%**	**89,087,147,507**	**90%**	**5,191,299,952**	**90%**	**5,230,839,314**	**90%**	**5,271,168,917**	**90%**	**5,271,168,912**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Dilaksanakan	**1,250,000,000**		**902,768,000**		**1,700,000,000**		**2,591,299,952**		**2,150,000,000**		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	**650,000,000**	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	**443,600,000**	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	**500,000,000**	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	**900,000,000**	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	**900,000,000**	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	**750,000,000**	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	**750,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kecamatan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	430,000,000	75 Kecamatan	221,800,000	75 Kecamatan	250,000,000	65 Kecamatan	300,000,000	65 Kecamatan	300,000,000	65 Kecamatan	250,000,000	65 Kecamatan	250,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	220,000,000	1 (satu) Laporan	221,800,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasiilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Daerah	**600,000,000**	322 Dokumen	**459,168,000**	322 Dokumen	**1,200,000,000**	322 Dokumen	**1,691,299,952**	322 Dokumen	**1,250,000,000**	322 Dokumen	**1,250,000,000**	322 Dokumen	**1,250,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Pembentukan Pemekaran Kecamatan yg di fasilitasi	50,000,000	2 Kecamatan	81,370,000	2 Kecamatan	200,000,000	2 Kecamatan	400,000,000	2 Kecamatan	300,000,000	2 Kecamatan	300,000,000	2 Kecamatan	300,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah yang difasilitasi	200,000,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	143,665,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	500,000,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	441,299,952	4 Batas Bermasalah, 4 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	300,000,000	4 Batas Bermasalah, 4 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	300,000,000	4 Batas Bermasalah, 4 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	300,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Lokasi Penamaan Rupa Bumi yang teridentifikasi	150,000,000	3 Lokasi	81,944,000	3 Lokasi	300,000,000	3 Lokasi	400,000,000	2 Lokasi	350,000,000	2 Lokasi	350,000,000	2 Lokasi	350,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Pilar Permanen yang terpasang	200,000,000	10 Pilar	152,189,000	10 Pilar	200,000,000	10 Pilar	450,000,000	8 Pilar	300,000,000	8 Pilar	300,000,000	8 Pilar	300,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	**2,751,232,000**		**2,585,939,550**		**1,700,000,000**		**1,900,000,000**		**2,280,839,314**		**2,471,168,917**		**2,471,168,912**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	**1,050,000,000**	100 Dokumen	**1,586,699,550**	100 Dokumen	**550,000,000**	106 Dokumen	**700,000,000**	114 Dokumen	**880,839,314**	120 Dokumen	**1,100,000,000**	120 Dokumen	**1,100,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terverifikasi	**340,600,000**	30 Dokumen	160,000,000	30 Dokumen	150,000,000	32 Dokumen	200,000,000	30 Dokumen	280,839,314	36 Dokumen	300,000,000	36 Dokumen	300,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kunjungan Kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	**18,400,000**	40 kali	115,000,000	40 kali	250,000,000	42 kali	150,000,000	46 kali	300,000,000	48 kali	400,000,000	48 kali	400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Izin yang diterbitkan	**130,000,000**	30 Surat Izin	132,000,000	30 Surat Izin	150,000,000	32 Surat Izin	350,000,000	34 Surat Izin	300,000,000	36 Surat Izin	400,000,000	36 Surat Izin	400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Pembinaan dan Desk Pilkada Yg dilaksanakan	**561,000,000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	-		1,179,699,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	**1,701,232,000**	61 Dokumen	**999,240,000**	61 Dokumen	**1,150,000,000**	61 Dokumen	**1,200,000,000**	61 Dokumen	**1,400,000,000**	61 Dokumen	**1,371,168,917**	61 Dokumen	**1,371,168,912**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen RLPPD Prov. Sumsel	**235,916,400**	55 Buku	120,000,000	55 Buku	100,000,000	55 Buku	200,000,000	55 Buku	300,000,000	55 Buku	271,168,917	55 Buku	271,168,912	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen LPPD Prov. Sumsel	**874,090,750**	2 Dokumen (120 buku)	359,240,000	2 Dokumen (120 buku)	500,000,000	2 Dokumen (120 buku)	500,000,000	2 Dokumen (120 buku)	400,000,000	2 Dokumen (120 buku)	400,000,000	2 Dokumen (120 buku)	400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran	**337,666,600**	3 dokumen	400,000,000	3 dokumen	450,000,000	3 dokumen	300,000,000	3 dokumen	400,000,000	3 dokumen	400,000,000	3 dokumen	400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota	**253,558,250**	1 (satu) Laporan	120,000,000	1 (satu) Laporan	100,000,000	1 (satu) Laporan	200,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Mou yang difasilitasi	**18,361,414,423**	62 Dokumen	**60,510,000,000**	62 Dokumen	**85,687,147,507**	72 Dokumen	**700,000,000**	82 Dokumen	**800,000,000**	92 Dokumen	**800,000,000**	102 Dokumen	**800,000,000**	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Di Fasilitasi	21 Dokumen	31 Dokumem	26 Dokumen	31 Dokumem	85,687,147,507	36 Dokumem	700,000,000	41 Dokumem	800,000,000	46 Dokumem	800,000,000	48 Dokumem	800,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI	494,916,401	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	215,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	300,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	350,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	400,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	400,000,000	5 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	332,157,022	25 Dokumen	295,000,000	25 Dokumen	387,147,507	30 Dokumen	350,000,000	35 Dokumen	400,000,000	40 Dokumen	400,000,000	43 Dokumen	400,000,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Puslatput Kodiklat-AD	6,034,341,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II Sriwijaya (Pembangunan Kolam Renang Jasdam II Sriwijaya Palembang)	9,000,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan	2,500,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan)	-		10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel (Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Pintu)	-		50,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Lanjutan Kolam Renang Jasdam II/SWJ, Tribun Kolam, Kolam Renang Anak-Anak, Ruang Bilas/Lobi, Pengaspalan Komplek Jasdam II/SWJ)					11,490,604,470									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan RS. Tingkat II dr. A.K. Gani Gedung Poliklinik, Rawat Inap dan Prasarana RS. Tingkat II dr. A.K. Gani)					53,509,395,530									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Rumah Dinas As-Ops, As-Intel,As-Ter, Dokter,Ka. Pendam, Ka. Infolahtadam, Ka. Bintaldam dan Pengaspalan Jalan Komplek Sintraman					10,000,000,000									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Sumsel (Pembelian/Pembebasan Lahan Kantor BPS Sumsel)					4,000,000,000									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Hibah Kepada Universitas Sriwijaya (Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP)					6,000,000,000									Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		23,911,033,000		**64,869,785,566**		**89,847,231,507**		**5,974,367,463**		**6,045,589,056**		**6,128,638,546**		**6,183,749,225**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**1,729,000,000**	100%	**2,000,824,779**	100%	**1,909,260,000**	100%	**1,863,968,621**	100%	**1,939,383,171**	100%	**2,041,071,120**	100%	**2,172,253,406**	Biro Hukum
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**124,480,000**	100%	**90,100,000**	100%	**90,100,000**	100%	**100,100,000**	100%	**120,100,000**	100%	**134,560,000**	100%	**141,016,000**	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124,480,000	1 Dokumen	90,100,000	1 Dokumen	90,100,000	1 Dokumen	100,100,000	1 Dokumen	120,100,000	1 Dokumen	134,560,000	1 Dokumen	141,016,000	Biro Hukum
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persetase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**519,690,000**	100%	**363,671,164**	100%	**429,860,000**	100%	**470,000,000**	100%	**500,000,000**	100%	**520,000,000**	100%	**550,000,000**	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35,000,000	2 Paket	13,671,164	1 Paket	30,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	70,000,000	1 Paket	80,000,000	1 Paket	90,000,000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	484,690,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	399,860,000	1 Paket	410,000,000	1 Paket	430,000,000	1 Paket	440,000,000	1 Paket	460,000,000	Biro Hukum
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,051,830,000**	100%	**708,590,735**	100%	**665,000,000**	100%	**665,000,000**	100%	**665,000,000**	100%	**736,511,120**	100%	**750,000,000**	Biro Hukum
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,051,830,000	1 Laporan	708,590,735	1 Laporan	665,000,000	1 Laporan	665,000,000	1 Laporan	665,000,000	1 Laporan	736,511,120	1 Laporan	750,000,000	Biro Hukum
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah**		100%	**156,500,000**	100%	**254,300,000**	100%	**273,868,621**	100%	**305,000,000**	100%	**300,000,000**	100%	**336,237,406**	Biro Hukum
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Orang	85,000,000	16 Orang	119,300,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	220,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	221,237,406	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai bersdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan		5 orang	71,500,000	8 Orang	85,000,000	8 Orang	40,000,000	8 Orang	50,000,000	8 Orang	60,000,000	8 Orang	70,000,000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dinas lapangan		-	-	54 Orang	50,000,000	54 orang	33,868,621	54 orang	35,000,000	54 orang	40,000,000	54 orang	45,000,000	Biro Hukum
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**33,000,000**	100%	**681,962,880**	100%	**470,000,000**	100%	**295,000,000**	100%	**287,283,171**	100%	**286,000,000**	100%	**329,000,000**	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	315,382,880	4 Unit	170,000,000	3 Unit	90,000,000	4 Unit	120,000,000	5 Unit	150,000,000	6 Unit	180,000,000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33,000,000	8 Unit	366,580,000	1 Paket	300,000,000	9 Unit	205,000,000	1 Paket	167,283,171	1 Paket	136,000,000	1 Paket	149,000,000	Biro Hukum
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100%**	**60,000,000**	**100%**	**62,000,000**	**100%**	**64,000,000**	**100%**	**66,000,000**	Biro Hukum
Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	36,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	38,000,000	Biro Hukum
Sub-Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	26,000,000	1 Dokumen	27,000,000	1 Dokumen	28,000,000	Biro Hukum
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Produk Hukum yang dihasilkan**	**1,591,364,000**	100%	**1,617,598,061**	100%	**2,259,162,840**	100%	**2,080,537,266**	100%	**2,164,713,994**	100%	**2,278,216,746**	100%	**2,424,640,689**	Biro Hukum
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	**Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku**	**641,214,805**	100%	**540,794,866**	100%	**811,766,544**	100%	**763,791,696**	100%	**795,000,000**	100%	**808,030,000**	100%	**874,640,689**	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	217,015,210	34 Dokumen	175,544,866	36 Dokumen	215,000,000	43 Dokumen	230,000,000	46 Dokumen	245,000,000	48 Dokumen	250,000,000	50 Dokumen	265,000,000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	70,000,000	780 Dokumen	53,000,000	825 Dokumen	113,826,719	828 Dokumen	150,791,696	831 Dokumen	140,000,000	834 Dokumen	145,000,000	837 Dokumen	155,692,000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	95,000,000	110 Dokumen	107,250,000	75 Dokumen	267,250,000	78 Dokumen	143,000,000	81 Dokumen	150,000,000	84 Dokumen	153,030,000	87 Dokumen	173,948,689	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	259,199,595	510 Dokumen	205,000,000	530 Dokumen	215,689,825	540 Dokumen	240,000,000	550 Dokumen	260,000,000	560 Dokumen	260,000,000	570 Dokumen	280,000,000	Biro Hukum
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	**Persentase Produk Hukum yang dihasilkan**	**950,149,195**	100%	**1,076,803,195**	100%	**1,447,396,296**	100%	**1,316,745,570**	100%	**1,369,713,994**	100%	**1,470,186,746**	100%	**1,550,000,000**	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	868,149,195	53 Kasus	976,325,295	60 Kasus	1,336,300,496	65 Kasus	1,191,745,570	70 Kasus	1,237,713,994	75 Kasus	1,335,186,746	80 Kasus	1,400,000,000	Biro Hukum
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaiana Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	82,000,000	3 kasus	100,477,900	4 Kasus	111,095,800	4 Kasus	125,000,000	4 Kasus	132,000,000	4 Kasus	135,000,000	4 Kasus	150,000,000	Biro Hukum
		3,320,364,000		**3,618,422,840**		**4,168,422,840**		**3,944,505,887**		**4,104,097,165**		**4,319,287,866**		**4,596,894,095**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti**	**2,293,925,800**		**2,874,867,180**		**3,041,782,698**		**3,345,960,968**		**3,680,557,065**		**4,048,612,772**		**4,453,474,049**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**110,000,000**		**121,000,000**		**133,100,000**		**146,410,000**		**161,051,000**		**177,156,100**		**194,871,710**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,000,000	4 Laporan	121,000,000	4 Laporan	133,100,000	4 Laporan	146,410,000	4 Laporan	161,051,000	4 Laporan	177,156,100	4 Laporan	194,871,710	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**189,292,000**		**189,392,000**		**188,892,000**		**207,781,200**		**228,559,320**		**251,415,252**		**276,556,777**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189,292,000	6 Laporan	189,392,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	207,781,200	6 Laporan	228,559,320	6 Laporan	251,415,252	6 Laporan	276,556,777	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**87,865,360**		**96,651,896**		**106,317,086**		**116,948,795**		**128,643,675**		**141,508,043**		**155,658,847**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87,865,360	3 Orang	96,651,896	3 Orang	106,317,086	3 Orang	116,948,795	3 Orang	128,643,675	3 Orang	141,508,043	3 Orang	155,658,847	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**778,948,440**		**975,903,284**		**1,184,043,612**		**1,302,447,973**		**1,432,692,770**		**1,575,962,047**		**1,733,558,252**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100,000,000	10 paket	110,000,000	10 paket	121,000,000	10 paket	133,100,000	10 paket	146,410,000	10 paket	161,051,000	10 paket	177,156,100	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42,548,440	6 Paket	46,803,284	6 Paket	51,483,612	6 Paket	56,631,973	6 Paket	62,295,170	6 Paket	68,524,687	6 Paket	75,377,156	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636,400,000	150 Laporan	819,100,000	150 Laporan	1,011,560,000	150 Laporan	1,112,716,000	150 Laporan	1,223,987,600	150 Laporan	1,346,386,360	150 Laporan	1,481,024,996	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**345,000,000**		**702,500,000**		**632,750,000**		**696,025,000**		**765,627,500**		**842,190,250**		**926,409,275**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	70,000,000	2 Unit	400,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	330,000,000	2 Unit	363,000,000	2 Unit	399,300,000	2 Unit	439,230,000	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	275,000,000	15 Unit	302,500,000	15 Unit	332,750,000	15 Unit	366,025,000	15 Unit	402,627,500	15 Unit	442,890,250	15 Unit	487,179,275	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**716,820,000**		**716,820,000**		**716,820,000**		**788,502,000**		**867,352,200**		**954,087,420**		**1,049,496,162**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	716,820,000	24 Laporan	716,820,000	24 Laporan	716,820,000	24 Laporan	788,502,000	24 Laporan	867,352,200	24 Laporan	954,087,420	24 Laporan	1,049,496,162	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**66,000,000**		**72,600,000**		**79,860,000**		**87,846,000**		**96,630,600**		**106,293,660**		**116,923,026**	Biro Kesejahteraan Rahyat

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	66,000,000	10 Unit	72,600,000	10 Unit	79,860,000	10 Unit	87,846,000	10 Unit	96,630,600	10 Unit	106,293,660	10 Unit	116,923,026	Biro Kesejahteraan Rahyat
Program Kesejahteraan Rakyat	**Persentase fasilitasi pembinaan mental spiritual,pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti**	**37,257,934,200**		**37,759,632,820**		**25,452,487,302**		**27,997,736,032**		**30,797,509,635**		**33,877,260,598**		**37,264,986,658**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	**Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual**	**36,361,934,200**		**36,784,732,820**		**24,333,267,302**		**26,766,594,032**		**29,443,253,435**		**32,387,578,778**		**35,626,336,656**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan prasarana Spiritual yang dikelola	17,405,000,000	10 unit	20,510,000,000	10 unit	7,063,050,000	10 unit	7,769,355,000	10 unit	8,546,290,500	10 unit	9,400,919,550	10 unit	10,341,011,505	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	18,956,934,200	7 lembaga	16,274,732,820	7 lembaga	17,270,217,302	7 lembaga	18,997,239,032	7 lembaga	20,896,962,935	7 lembaga	22,986,659,228	7 lembaga	25,285,325,151	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	**Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti**	**437,000,000**		**447,700,000**		**492,470,000**		**541,717,000**		**595,888,700**		**655,477,570**		**721,025,327**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	77,000,000	1 Dokumen	84,700,000	1 Dokumen	93,170,000	1 Dokumen	102,487,000	1 Dokumen	112,735,700	1 Dokumen	124,009,270	1 Dokumen	136,410,197	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi,Koordinasi,Sinkronisasi , evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	1 Dokumen	241,576,500	1 Dokumen	265,734,150	1 Dokumen	292,307,565	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	195,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	1 Dokumen	241,576,500	1 Dokumen	265,734,150	1 Dokumen	292,307,565	Biro Kesejahteraan Rahyat
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti**	**459,000,000**		**527,200,000**		**626,750,000**		**689,425,000**		**758,367,500**		**834,204,250**		**917,624,675**	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	275,000,000	1 Dokumen	302,500,000	1 Dokumen	332,750,000	1 Dokumen	366,025,000	1 Dokumen	402,627,500	1 Dokumen	442,890,250	1 Dokumen	487,179,275	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	77,000,000	1 Dokumen	84,700,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	154,000,000	1 Dokumen	169,400,000	1 Dokumen	186,340,000	1 Dokumen	204,974,000	Biro Kesejahteraan Rahyat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	107,000,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	154,000,000	1 Dokumen	169,400,000	1 Dokumen	186,340,000	1 Dokumen	204,974,000	1 Dokumen	225,471,400	Biro Kesejahteraan Rahyat
JUMLAH		**39,551,860,000**		**40,634,500,000**		**28,494,270,000**		**31,343,697,000**		**34,478,066,700**		**37,925,873,370**		**41,718,460,707**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DAERAH															
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**														Biro Perekonomian
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100%**	**50,000,000**	**100%**	**50,000,000**	**100%**	**50,000,000**	**100%**	**50,000,000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah						1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**174,886,000**	**100%**	**169,886,000**	**100%**	**169,886,000**	**100%**	**169,886,000**	**100%**	**169,886,000**	**100%**	**169,886,000**	
Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 166,142,500	1 tahun	174,886,000	1 tahun	169,886,000	1 tahun	169,886,000	1 tahun	169,886,000	1 tahun	169,886,000	100%	169,886,000	Biro Perekonomian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**297,793,000**	**100%**	**297,793,000**	**100%**	**317,793,000**	**100%**	**327,793,000**	**100%**	**332,793,000**	**100%**	**332,793,000**	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Rp 103,947,500	30 jenis	112,000,000	30 jenis	112,000,000	30 jenis	112,000,000	30 jenis	112,000,000	30 jenis	112,000,000	100%	112,000,000	Biro Perekonomian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 296,600,000	1 laporan	185,793,000	1 laporan	185,793,000	1 laporan	205,793,000	1 laporan	215,793,000	1 laporan	220,793,000	100%	220,793,000	Biro Perekonomian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**77,818,000**	**100%**	**188,561,144**	**100%**	**188,561,144**	**100%**	**188,561,144**	**100%**	**188,561,144**	**100%**	**188,561,144**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	Rp 150,092,150	6 unit	77,818,000	6 unit	188,561,144	6 unit	188,561,144	6 unit	188,561,144	6 unit	188,561,144	100%	188,561,144	Biro Perekonomian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**185,743,144**	**100%**	**75,000,000**	**100%**	**75,000,000**	**100%**	**75,000,000**	**100%**	**75,000,000**	**100%**	**75,000,000**	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rp 375,661,000	12 orang	185,743,144	12 orang	75,000,000	12 orang	75,000,000	12 orang	75,000,000	12 orang	75,000,000	100%	75,000,000	Biro Perekonomian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**100%**	-	-	-		-		-		-		-	
Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan pakaian dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan		-	-	-	-		-		-		-		-	Biro Perekonomian
Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)			-	-	-	-		-		-		-		-	Biro Perekonomian
Benchmaking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)			-	-	-	-		-		-		-		-	Biro Perekonomian
Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)			-	-	-	-		-		-		-		-	Biro Perekonomian

Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)			-	-	-	-		-		-		-		-	Biro Perekonomian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan		-	100,000,000	-	100,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Biro Perekonomian
Program Perekonomian dan Pembangunan	**Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana**														
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	**Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia**		**100%**	**820,481,900**	**100%**	**820,481,900**	**100%**	**840,481,900**	**100%**	**850,481,900**	**100%**	**870,481,900**	**100%**	**880,481,900**	
1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp 557,924,000	2 Dokumen	489,313,500	2 Dokumen	489,313,500	2 Dokumen	509,313,500	2 Dokumen	519,313,500	2 Dokumen	529,313,500	100%	539,313,500	Biro Perekonomian
2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp 305,500,000	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	341,168,400	100%	341,168,400	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	**Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik**		100%	**902,069,575**	100%	**907,069,575**	100%	**907,069,575**	100%	**907,069,575**	100%	**917,069,575**	100%	**917,069,575**	
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp 177,469,250	2 Dokumen	224,786,000	2 Dokumen	229,786,000	2 Dokumen	229,786,000	2 Dokumen	229,786,000	2 Dokumen	239,786,000	100%	239,786,000	Biro Perekonomian
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp 270,100,000	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	100%	318,779,125	Biro Perekonomian
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanEnergi dan Air	Rp 98,984,250	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	100%	358,504,450	Biro Perekonomian
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	**Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD**		**55%**	**900,870,000**	**64%**	**900,870,000**	**70%**	**947,361,540**	**75%**	**1,016,015,369**	**80%**	**1,071,885,544**	**80%**	**1,155,027,473**	
1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp 157,600,000	1 Dokumen	128,068,350	1 Dokumen	128,068,350	1 Dokumen	128,068,350	1 Dokumen	128,068,350	1 Dokumen	138,068,350	100%	148,068,350	Biro Perekonomian
2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-	1 Dokumen	103,412,500	1 Dokumen	103,412,500	1 Dokumen	103,412,500	1 Dokumen	103,412,500	1 Dokumen	113,412,500	100%	133,412,500	Biro Perekonomian
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD	Rp 571,485,000	2 Dokumen	493,770,500	2 Dokumen	493,770,500	2 Dokumen	540,262,040	2 Dokumen	608,915,869	2 Dokumen	608,915,869	100%	622,057,798	Biro Perekonomian
4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	-	1 Dokumen	101,694,650	1 Dokumen	101,694,650	1 Dokumen	101,694,650	1 Dokumen	101,694,650	1 Dokumen	111,694,650	100%	131,694,650	Biro Perekonomian
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD	Rp 149,400,000	2 Dokumen	73,924,000	2 Dokumen	73,924,000	2 Dokumen	73,924,000	2 Dokumen	73,924,000	2 Dokumen	99,794,175	100%	119,794,175	Biro Perekonomian
		Rp 3,380,905,650		3,459,661,619		3,459,661,619		3,496,153,159		3,584,806,988		3,675,677,163		3,768,819,092	

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-						-	1 Unit	75.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	**Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah**	**576.075.167**	**100%**	**675.750.000**	**100%**	**684.500.000**	**100%**	**1.300.000.000**	**100%**	**1.445.000.000**	**100%**	**1.585.000.000**	**100%**	**1.720.000.000**	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**330.066.933**	**100%**	**391.750.000**	**100%**	**396.500.000**	**100%**	**675.000.000**	**100%**	**745.000.000**	**100%**	**810.000.000**	**100%**	**885.000.000**	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBD	139.494.595	1 laporan	176.250.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	270.000.000	1 laporan	285.000.000	1 laporan	325.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBN	89.888.601	1 laporan	91.500.000	1 laporan	91.500.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan Wilayah	100.683.737	1 laporan	124.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	275.000.000	1 laporan	285.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**246.008.234**	**100%**	**284.000.000**	**100%**	**288.000.000**	**100%**	**625.000.000**	**100%**	**700.000.000**	**100%**	**775.000.000**	**100%**	**835.000.000**	Biro Administrasi Pembangunan
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah	59.167.570	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	83.661.780	1 laporan	101.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	1 laporan	285.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	103.178.884	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	Biro Administrasi Pembangunan
		1.399.480.093		**1.810.627.269**		**1.810.627.269**		**2.867.712.266**		**3.069.965.224**		**3.319.255.684**		**3.621.835.467**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**823,404,926**	**100%**	**1,134,877,269**	**100%**	**1,126,127,269**	**100%**	**1,567,712,266**	**100%**	**1,624,965,244**	**100%**	**1,734,255,684**	**100%**	**1,901,835,467**	**Biro Adm Pembangunan**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***17,559,300***	**100%**	***20,000,000***	**100%**	***20,000,000***	**100%**	***75,000,000***	**100%**	***75,000,000***	**100%**	***90,000,000***	**100%**	***100,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	Biro Adm Pembangunan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,559,300	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	50,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	Biro Adm Pembangunan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat**	***111,160,000***	**100%**	***111,160,000***	***dokumen***	***111,160,000***	**100%**	***111,160,000***	**100%**	***150,000,000***	**100%**	***150,000,000***	**100%**	***150,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111,160,000	1 Dokumen	111,160,000	1 Dokumen	111,160,000	1 Dokumen	111,160,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	Biro Adm Pembangunan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***81,186,000***	**100%**	***81,000,000***	**100%**	***56,000,000***	**100%**	***120,000,000***	**100%**	***90,000,000***	**100%**	***185,000,000***	**100%**	***275,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	51,900,000	30 paket	25,000,000			30 Paket	40,000,000			30 paket	60,000,000	30 paket	75,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	29,286,000	1 Orang	26,000,000	3 Orang	36,000,000	3 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	3 Orang	75,000,000	4 Orang	100,000,000	Biro Adm Pembangunan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	5 Orang	30,000,000	8 Orang	20,000,000	10 Orang	30,000,000	5 orang	40,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	100,000,000	Biro Adm Pembangunan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***335,406,626***	**100%**	***279,051,257***	**100%**	***233,967,269***	**100%**	***271,552,266***	**100%**	***350,000,000***	**100%**	***469,255,684***	**100%**	***525,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	63,235,900	1 Paket	31,551,257	1 Paket	33,967,269	1 Paket	41,552,266	1 Paket	75,000,000	1 Paket	139,255,684	1 Paket	175,000,000	Biro Adm Pembangunan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272,170,726	1 laporan	247,500,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	230,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	330,000,000	1 laporan	350,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***85,520,000***	**100%**	***420,000,000***	**100%**	***510,000,000***	**100%**	***785,000,000***	**100%**	***634,965,244***	**100%**	***450,000,000***	**100%**	***461,835,467***	**Biro Adm Pembangunan**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	R 4 =1 unit	420,000,000	R 4 =1 unit	450,000,000	R4 = 1 unit	470,000,000	R4 = 1 unit	460,000,000	R2 = 3 unit	90,000,000	R2 = 3 unit	90,000,000	Biro Adm Pembangunan

Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-			-	1 (Satu) unit	200,000,000						-	Biro Adm Pembangunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	85,520,000	-		5 unit	60,000,000	5 unit	115,000,000	12 unit	174,965,244	12 unit	360,000,000	12 unit	371,835,467	Biro Adm Pembangunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***192,573,000***	**100%**	***223,666,012***	**100%**	***195,000,000***	**100%**	***205,000,000***	**100%**	***250,000,000***	**100%**	***300,000,000***	**100%**	***300,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	192,573,000	1 Laporan	223,666,012	1 Laporan	195,000,000	1 Laporan	205,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	-		-		-		-	**100%**	***75,000,000***	**100%**	***90,000,000***	**100%**	***90,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-						-	1 Unit	75,000,000	1 Unit	90,000,000	1 Unit	90,000,000	Biro Adm Pembangunan
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	**Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah**	**576,075,167**	**100%**	**675,750,000**	**100%**	**684,500,000**	**100%**	**1,300,000,000**	**100%**	**1,445,000,000**	**100%**	**1,585,000,000**	**100%**	**1,720,000,000**	**Biro Adm Pembangunan**
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Peningkatan Pengendalian Administrasi**	***330,066,933***	**100%**	***391,750,000***	**100%**	***396,500,000***	**100%**	***675,000,000***	**100%**	***745,000,000***	**100%**	***810,000,000***	**100%**	***885,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBD	139,494,595	1 laporan	176,250,000	1 laporan	205,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	270,000,000	1 laporan	285,000,000	1 laporan	325,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBN	89,888,601	1 laporan	91,500,000	1 laporan	91,500,000	1 laporan	225,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	275,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan Wilayah	100,683,737	1 laporan	124,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	225,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	285,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Peningkatan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan**	***246,008,234***	**100%**	***284,000,000***	**100%**	***288,000,000***	**100%**	***625,000,000***	**100%**	***700,000,000***	**100%**	***775,000,000***	**100%**	***835,000,000***	**Biro Adm Pembangunan**
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah	59,167,570	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	Biro Adm Pembangunan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	83,661,780	1 laporan	101,000,000	1 laporan	105,000,000	1 laporan	225,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	285,000,000	Biro Adm Pembangunan
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	103,178,884	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	Biro Adm Pembangunan
		1,399,480,093		**1,810,627,269**		**1,810,627,269**		**2,867,712,266**		**3,069,965,244**		**3,319,255,684**		**3,621,835,467**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	**PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**1,529,400,000**	100%	**1,561,682,354**	100%	**776,000,000**	100%	**1,970,440,289**	100%	**2,167,484,318**	100%	**2,384,232,750**	100%	**2,622,656,025**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						100%	**50,000,000**	100%	**50,000,000**	100%	**50,000,000**	100%	**50,000,000**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Junlah dokumen perencanaan perangkat daerah						1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						12 data	25,000,000	12 data	25,000,000	12 data	25,000,000	12 data	25,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**250,400,000**	100%	**251,000,000**	100%	**251,000,000**	100%	**232,275,000**	100%	**350,000,000**	100%	**350,000,000**	100%	**450,000,000**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250,400,000	12 Dokumen	251,000,000	12 Dokumen	251,000,000	12 Dokumen	232,275,000	12 Dokumen	350,000,000	12 Dokumen	350,000,000	12 Dokumen	450,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur yang Terlaksana**	**75,000,000**	100%	**50,000,000**	100%	**75,000,000**	100%	**75,000,000**	100%	**100,000,000**	100%	**94,232,750**	100%	**100,000,000**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang ikut pelatihan kepemimpinan		3 orang	50,000,000	5 orang	75,000,000	5 orang	75,000,000	5 orang	100,000,000	5 orang	94,232,750	5 orang	100,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani**	**75,000,000**	100%	**20,000,000**	100%	**80,000,000**	100%	**213,165,289**	100%	**750,000,000**	100%	**450,000,000**	100%	**850,000,000**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		24 paket	-	24 paket	20,000,000	24 paket	21,000,000	24 paket	250,000,000	24 paket	150,000,000	24 paket	250,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000	30 laporan	20,000,000	30 laporan	60,000,000	30 laporan	192,165,289	30 laporan	500,000,000	30 laporan	300,000,000	30 laporan	600,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**420,000,000**	100%	**957,000,000**	100%	**200,000,000**	100%	**1,200,000,000**	100%	**400,000,000**	100%	**1,200,000,000**	100%	**600,000,000**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		-	-	-	-	8 unit	900,000,000	-		-	900,000,000	-	-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	420,000,000	20 unit	957,000,000	20 unit	200,000,000	20 unit	300,000,000	20 unit	400,000,000	20 unit	300,000,000	20 unit	600,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**784,000,000**	100%	**283,682,354**	100%	**170,000,000**	100%	**200,000,000**	100%	**517,484,318**	100%	**240,000,000**	100%	**572,656,025**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	784,000,000	13 laporan	283,682,354	13 laporan	170,000,000	13 laporan	200,000,000	13 laporan	517,484,318	13 laporan	240,000,000	13 laporan	572,656,025	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**4,265,000,000**	Level 3	**5,171,035,850**	Level 3	**5,991,345,204**	Level 3 Pusat	**6,890,046,985**	Level 3 Pusat Unggulan	**7,923,554,032**	Level 4	**9,112,087,137**	Level 4	**10,478,900,208**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa**	**1,130,000,000**	**100%**	**1,504,041,000**	**100%**	**2,100,000,000**	**100%**	**2,615,046,985**	**100%**	**2,973,554,032**	**100%**	**3,500,000,000**	**100%**	**4,150,000,000**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	185,000,000	4 laporan	320,340,500	4 laporan	300,000,000	4 laporan	350,000,000	4 laporan	450,000,000	4 laporan	500,000,000	4 laporan	750,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	780,000,000	12 laporan	894,000,000	12 laporan	1,500,000,000	12 laporan	1,815,046,985	12 laporan	2,023,554,032	12 laporan	2,500,000,000	12 laporan	2,750,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	165,000,000	12 laporan	289,700,500	12 laporan	300,000,000	12 laporan	450,000,000	12 laporan	500,000,000	12 laporan	500,000,000	12 laporan	650,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**1,125,000,000**	**100%**	**1,179,700,000**	**100%**	**1,400,000,000**	**100%**	**1,550,000,000**	**100%**	**1,750,000,000**	**100%**	**1,900,000,000**	**100%**	**2,250,000,000**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	720,000,000	4 laporan	707,000,000	4 laporan	700,000,000	4 laporan	750,000,000	4 laporan	850,000,000	4 laporan	850,000,000	4 laporan	900,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	195,000,000	4 laporan	320,000,000	4 laporan	400,000,000	4 laporan	450,000,000	4 laporan	500,000,000	4 laporan	550,000,000	4 laporan	700,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	210,000,000	4 laporan	152,700,000	4 laporan	300,000,000	4 laporan	350,000,000	4 laporan	400,000,000	4 laporan	500,000,000	4 laporan	650,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**2,010,000,000**	**100%**	**2,487,294,850**	**100%**	**2,491,345,204**	**100%**	**2,725,000,000**	**100%**	**3,200,000,000**	**100%**	**3,712,087,137**	**100%**	**4,078,900,208**	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	720,000,000	45 orang	1,379,294,850	45 orang	941,345,204	45 orang	950,000,000	45 orang	1,200,000,000	45 orang	1,400,000,000	45 orang	1,400,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	275,000,000	5 dokumen	325,000,000	5 dokumen	850,000,000	5 dokumen	875,000,000	5 dokumen	900,000,000	5 dokumen	1,100,000,000	5 dokumen	1,300,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	1,015,000,000	4 dokumen	783,000,000	4 dokumen	700,000,000	4 dokumen	900,000,000	4 dokumen	1,100,000,000	4 dokumen	1,212,087,137	4 dokumen	1,378,900,208	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH		**5,794,400,000**		**6,732,718,204**		**6,767,345,204**		**8,860,487,274**		**10,091,038,350**		**11,496,319,887**		**13,101,556,233**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Kerja Perangkat Daerah**	***1,668,609,790***	***100%***	***1,180,518,800***	***100%***	***1,180,518,800***	***100%***	***1,216,215,469***	***100%***	***1,265,422,490***	***100%***	***1,331,772,564***	***100%***	***1,417,367,313***	Biro Organisasi
1.1. 1.1.1 Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12,000,000**	**100%**	**20,500,000**	**100%**	**20,500,000**	**100%**	**21,000,000**	**100%**	**21,500,000**	**100%**	**22,000,000**	**100%**	**23,000,000**	Biro Organisasi
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000	1 Dok.	20,500,000	1 Dok.	20,500,000	1 Dok.	21,000,000	1 Dok.	21,500,000	1 Dok.	22,000,000	1 Dok.	23,000,000	Biro Organisasi
1.2. 1.2.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**160,400,000**	**100%**	**170,000,000**	**100%**	**170,000,000**	**100%**	**175,000,000**	**100%**	**178,000,000**	**100%**	**182,000,000**	**100%**	**185,000,000**	Biro Organisasi
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160,400,000	1 Dok.	170,000,000	1 Dok.	170,000,000	1 Dok.	175,000,000	1 Dok.	178,000,000	1 Dok.	182,000,000	1 Dok.	185,000,000	Biro Organisasi
1.3. 1.3.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**227,000,000**	**100%**	**172,173,200**	**100%**	**192,800,000**	**100%**	**202,000,000**	**100%**	**211,500,000**	**100%**	**222,000,000**	**100%**	**231,000,000**	Biro Organisasi
13.2. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21,000,000	n/a	n/a	1 Paket	10,000,000	1 Paket	11,000,000	1 Paket	11,500,000	1 Paket	12,000,000	1 Paket	13,000,000	Biro Organisasi
1.3.3. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000	1 Dok.	101,373,200	1 Dok.	100,000,000	1 Dok.	105,000,000	1 Dok.	110,000,000	1 Dok.	115,000,000	1 Dok.	120,000,000	Biro Organisasi
1.3.4. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	n/a	1 Dok.	30,960,000	1 Dok.	30,960,000	1 Dok.	32,000,000	1 Dok.	33,000,000	1 Dok.	35,000,000	1 Dok.	36,000,000	Biro Organisasi
1.3.5. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	n/a	1 Dok.	31,840,000	1 Dok.	31,840,000	1 Dok.	32,000,000	1 Dok.	33,000,000	1 Dok.	35,000,000	1 Dok.	36,000,000	Biro Organisasi
1.3.6. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85,000,000	10 Orang	8,000,000	2 orang	10,000,000	2 orang	11,000,000	2 orang	12,000,000	2 orang	12,500,000	2 orang	13,000,000	Biro Organisasi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	21,000,000	5 Orang	n/a	3 Orang	10,000,000	3 Orang	11,000,000	3 Orang	12,000,000	3 Orang	12,500,000	3 Orang	13,000,000	Biro Organisasi
1.4. 1.4.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**602,549,790**	**100%**	**344,700,000**	**100%**	**391,368,800**	**100%**	**399,000,000**	**100%**	**407,500,000**	**100%**	**418,000,000**	**100%**	**473,124,313**	Biro Organisasi
1.4.2. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100,000,000	1 Paket	91,000,000	1 Paket	91,000,000	1 Paket	93,000,000	1 Paket	95,000,000	1 Paket	98,000,000	1 Paket	100,000,000	Biro Organisasi
1.4.3. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502,549,790	1 Laporan	226,500,000	1 Laporan	250,368,800	1 Laporan	256,000,000	1 Laporan	260,000,000	1 Laporan	265,000,000	1 Laporan	317,124,313	Biro Organisasi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	n/a	1 Dok.	27,200,000	1 Dok.	50,000,000	1 Dok.	50,000,000	1 Dok.	52,500,000	1 Dok.	55,000,000	1 Dok.	56,000,000	Biro Organisasi
1.5.1.5.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**170,000,000**	**100%**	**80,000,000**	**100%**	**177,350,000**	**100%**	**235,476,000**	**100%**	**244,049,000**	**100%**	**246,727,000**	**100%**	**254,243,000**	Biro Organisasi

1.5.2. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	0	0	1 Unit Motor (R2)	27,350,000	3 Unit R2 (Motor)	80,476,000	3 Unit R2 (Motor)	86,049,000	3 Unit R2 (Motor)	86,727,000	3 Unit R2 (Motor)	92,243,000	Biro Organisasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	170,000,000	10 Unit	80,000,000	10 Unit	150,000,000	10 Unit	155,000,000	10 Unit	158,000,000	10 Unit	160,000,000	10 Unit	162,000,000	Biro Organisasi
1.6. 161. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**431,660,000**	**100%**	**214,645,600**	**100%**	**100,000,000**	**100%**	**55,239,469**	**100%**	**68,873,490**	**100%**	**104,045,564**	**100%**	**110,000,000**	Biro Organisasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	431,660,000	1 Dok.	214,645,600	1 Dok.	100,000,000	1 Dok.	55,239,469	1 Dok.	68,873,490	1 Dok.	104,045,564	1 Dok.	110,000,000	Biro Organisasi
1.7.1.7.1. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65,000,000**	**100%**	**178,500,000**	**100%**	**128,500,000**	**100%**	**128,500,000**	**100%**	**134,000,000**	**100%**	**137,000,000**	**100%**	**141,000,000**	Biro Organisasi
1.7.2. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	40,000,000	5 Aplikasi	120,000,000	5 Aplikasi	70,000,000	5 Aplikasi	70,000,000	5 Aplikasi	73,000,000	5 Aplikasi	75,000,000	5 Aplikasi	76,000,000	Biro Organisasi
Program Penataan Organisasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25,000,000	1 Paket	58,500,000	1 Paket	58,500,000	1 Paket	58,500,000	1 Paket	61,000,000	1 Paket	62,000,000	1 Paket	65,000,000	Biro Organisasi
	INDEKS KEMATANGAN ORGANISASI	**1,081,860,000**	***30***	**918,544,600**	***37***	**918,544,600**	***40***	**1,056,326,290**	***42***	**1,099,064,333**	***45***	**1,156,691,727**	***46***	**1,231,033,803**	Biro Organisasi
2.1.2.1.1. Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	**Persentase Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**330,000,000**	**100%**	**317,460,000**	**100%**	**317,460,000**	**100%**	**433,326,290**	**100%**	**454,064,333**	**100%**	**489,691,727**	**100%**	**542,033,803**	Biro Organisasi
2.1.2. Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	80,000,000	1 Dok.	80,560,000	1 Dok.	80,560,000	1 Dok.	191,326,290	1 Dok.	204,064,333	1 Dok.	232,691,727	1 Dok.	278,033,803	Biro Organisasi
2.1.3. Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	80,000,000	1 Dok.	76,900,000	1 Dok.	76,900,000	1 Dok.	78,000,000	1 Dok.	80,000,000	1 Dok.	82,000,000	1 Dok.	84,000,000	Biro Organisasi
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	170,000,000	2 Dok.	160,000,000	2 Dok.	160,000,000	2 Dok.	164,000,000	2 Dok.	170,000,000	2 Dok.	175,000,000	2 Dok.	180,000,000	Biro Organisasi
2.2. 2.2.1. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	**Persentase Peningkatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**751,860,000**	**100%**	**601,084,600**	**100%**	**601,084,600**	**100%**	**623,000,000**	**100%**	**645,000,000**	**100%**	**667,000,000**	**100%**	**689,000,000**	Biro Organisasi
2.2.2. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110,000,000	2 Dok.	142,070,000	2 Dok.	142,070,000	2 Dok.	145,000,000	2 Dok.	150,000,000	2 Dok.	155,000,000	2 Dok.	160,000,000	Biro Organisasi
2.2.3. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	321,860,000	2 Dok.	167,019,600	2 Dok.	167,019,600	2 Dok.	170,000,000	2 Dok.	175,000,000	2 Dok.	180,000,000	2 Dok.	182,000,000	Biro Organisasi
2.2.4. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	100,000,000	1 Dok.	77,860,000	1 Dok.	77,860,000	1 Dok.	90,000,000	1 Dok.	95,000,000	1 Dok.	100,000,000	1 Dok.	110,000,000	Biro Organisasi
2.2.5. Sub-Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	120,000,000	2 Dok.	128,135,000	2 Dok.	128,135,000	2 Dok.	130,000,000	2 Dok.	135,000,000	2 Dok.	140,000,000	2 Dok.	143,000,000	Biro Organisasi
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100,000,000	1 Dok.	86,000,000	1 Dok.	86,000,000	1 Dok.	88,000,000	1 Dok.	90,000,000	1 Dok.	92,000,000	1 Dok.	94,000,000	Biro Organisasi
JUMLAH TOTAL		**2,750,469,790**		**2,099,063,400**		**2,099,063,400**		**2,272,541,759**		**2,364,486,823**		**2,488,464,291**		**2,648,401,116**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**														Biro Umum dan Perlengkapan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**385,800,000**		**385,800,000**		**327,728,496**		**319,800,000**		**319,800,000**		**319,800,000**		**351,513,980**	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	Biro Umum dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,496	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	Biro Umum dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	Biro Umum dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	Biro Umum dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66,000,000	2 Laporan	66,000,000	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan		Biro Umum dan Perlengkapan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**68,217,811,532**	**-**	**68,859,918,000**	**-**	**94,426,162,000**		**94,426,162,000**		**94,426,162,000**	**-**	**94,926,162,000**	**-**	**97,011,162,000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67,032,811,532	475 orang	67,674,918,000	480 orang	93,448,162,000	487 orang	93,448,162,000	511 orang	93,448,162,000	515 orang	93,948,162,000	515 orang	95,948,162,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,100,000,000	12 Dokumen	1,100,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	925,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	30,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	35,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1,880,000,000**		**2,080,000,000**		**2,080,000,000**		**2,080,000,000**		**2,080,000,000**		**2,080,000,000**		**2,140,000,000**	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	140,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	350,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,362,451,626**		**2,921,435,580**		**285,900,000**		**285,900,000**		**285,900,000**		**285,900,000**		**2,785,900,000**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1,176,551,626	1 Paket	2,535,535,580	-	-	-	-	-	-	1 Paket		1 Paket	2,500,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85,900,000	4 Orang	185,900,000	5 Orang	185,900,000	4 Orang	185,900,000	4 Orang	185,900,000	3 Orang	185,900,000	3 Orang	185,900,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	15 Orang	-		-		-		-		-		-	Biro Umum dan Perlengkapan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	25 Orang	200,000,000	25 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	20 orang	100,000,000	20 orang	100,000,000	20 orang	100,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**27,839,001,100**		**36,571,000,000**		**38,621,000,000**		**34,371,000,000**		**34,371,000,000**		**34,371,000,000**		**41,671,000,000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	900,000,000	15 Paket	800,000,000	10 Paket	350,000,000	7 Paket	400,000,000	7 Paket	400,000,000	7 Paket	400,000,000	7 Paket	500,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2,571,000,000	12 Paket	3,871,000,000	12 Paket	2,871,000,000	12 Paket	2,571,000,000	12 Paket	2,571,000,000	12 Paket	2,571,000,000	12 Paket	3,571,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	500,000,000	12 Paket	500,000,000	12 Paket	200,000,000	12 Paket	200,000,000	15 Paket	200,000,000	15 Paket	200,000,000	15 Paket	300,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14,449,200,000	12 Laporan	22,000,000,000	12 Laporan	28,000,000,000	12 Laporan	24,000,000,000	12 Laporan	24,000,000,000	12 Laporan	24,000,000,000	12 Laporan	28,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,920,000,000	3 Laporan	9,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	9,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400,000,000	6 Dokumen	400,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	300,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP	98,801,100	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19,410,000,000**		**22,328,279,700**		**12,751,866,251**		**13,907,145,950**		**13,985,803,175**		**14,428,803,175**		**20,598,279,500**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4,880,000,000	R4 = 20 unit, R2 = 10 unit	7,798,279,700	R4 = 4 unit	3,600,000,000	R4 = 4 unit	4,755,279,700	R4 = 5 unit	4,833,936,925	R4 = 7 unit	5,276,936,925	R4 = 7 unit	7,598,279,500	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit		1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2,530,000,000	4 Paket	2,530,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	3,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	12,000,000,000	50 unit	12,000,000,000	50 unit	7,151,866,251	50 unit	7,151,866,250	50 unit	7,151,866,250	50 unit	7,151,866,250	50 unit	10,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42,410,000,000**		**53,928,646,000**		**52,928,646,000**		**50,928,646,000**		**50,928,646,000**		**51,428,646,000**		**51,428,646,000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	11,450,000,000	50 Laporan	13,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17,700,000,000	36 Laporan	26,000,000,000	36 Laporan	28,000,000,000	36 Laporan	26,000,000,000	36 Laporan	26,000,000,000	36 Laporan	26,500,000,000	36 Laporan	26,500,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13,060,000,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	Biro Umum dan Perlengkapan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48,244,020,374**		**63,830,394,252**		**69,329,683,753**		**41,597,685,150**		**42,597,685,150**		**43,226,659,835**		**44,251,185,684**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	284,000,000	2 unit	1,000,000,000	2 unit	802,000,000	2 unit	850,000,000	2 unit	850,000,000	2 unit	850,000,000	2 unit	850,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11,983,074,300	210 unit	12,983,074,300	210 unit	9,638,258,441	210 unit	9,638,258,400	210 unit	9,638,258,400	220 unit	9,638,258,400	220 unit	9,839,258,400	Biro Umum dan Perlengkapan
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dipelihara	800,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	600,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	800,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	33,105,126,122	18 aset bangunan dan gedung kantor	46,975,500,000	18 aset bangunan dan gedung kantor	57,017,605,360	18 aset bangunan dan gedung kantor	29,037,606,800	18 aset bangunan dan gedung kantor	30,037,606,800	18 aset bangunan dan gedung kantor	30,366,581,485	18 aset bangunan dan gedung kantor	31,190,107,334	Biro Umum dan Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2,071,819,952	200 Unit	2,071,819,952	200 Unit	1,271,819,952	200 Unit	1,271,819,950	200 Unit	1,271,819,950	200 Unit	1,571,819,950	200 Unit	1,571,819,950	Biro Umum dan Perlengkapan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**10,687,175,800**		**12,675,898,000**		**14,244,409,000**		**14,244,409,000**		**14,244,409,000**		**14,244,409,000**		**14,244,409,000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	253,933,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH	11,025,000	4 Orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000	2 orang	15,000,000	2 orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	2,100,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	8,322,217,800	2 Orang	7,489,461,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Peningkatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**11,450,800,000**		**15,750,000,000**		**15,750,000,000**		**15,000,000,000**		**15,000,000,000**		**16,600,000,000**		**16,600,000,000**	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	10,250,800,000	30 Paket	11,000,000,000	30 Paket	10,000,000,000	50 Paket	10,000,000,000	50 Paket	10,000,000,000	50 Paket	11,000,000,000	50 Paket	11,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	30 Paket	3,250,000,000	30 Paket	4,250,000,000	30 Paket	3,500,000,000	30 Paket	3,500,000,000	30 Paket	4,000,000,000	30 Paket	4,000,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	1,200,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,600,000,000	15 Paket	1,600,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan
	Jumlah	**231,887,060,432**		**279,331,371,532**		**300,745,395,500**		**267,160,748,100**		**268,239,405,325**		**271,911,380,010**		**291,082,096,164**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**50,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	I Dokumen	25,000,000	I Dokumen	25,000,000	I Dokumen	25,000,000	I Dokumen	25,000,000	Biro Humas dan Protokol
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	Biro Humas dan Protokol
Penyediaan Administrasi Keuangan	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**251,047,000**		**229,000,000**		**229,000,000**		**229,000,000**		**229,000,000**		**235,000,000**	**100%**	**235,000,000**	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251,047,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	235,000,000	1 Dokumen	235,000,000	Biro Humas dan Protokol
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**190,000,000**		**400,000,000**		**272,000,000**		**402,000,000**		**272,000,000**		**400,000,000**	**100%**	**280,000,000**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	170,000,000	2 paket	320,000,000	1 paket	192,000,000	2 paket	322,000,000	1 paket	192,000,000	2 paket	320,000,000	1 paket	190,000,000	Biro Humas dan Protokol
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	50,000,000	Biro Humas dan Protokol
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	10 Orang	30,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000	Biro Humas dan Protokol
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2,193,000,000**		**2,150,000,000**		**2,150,000,000**	**100%**	**2,150,000,000**	**100%**	**2,200,000,000**		**2,200,000,000**		**2,200,000,000**	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	Biro Humas dan Protokol
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	Biro Humas dan Protokol
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**300,000,000**		**600,000,000**		**400,000,000**		**750,000,000**		**400,000,000**	**100%**	**800,000,000**	**100%**	**450,000,000**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	R4 = 1 Unit	320,000,000	-	-	R4 = 1 Unit	350,000,000	-	-	R4 = 1 Unit	400,000,000	-	-	Biro Humas dan Protokol
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	300,000,000	10 Unit	280,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	450,000,000	Biro Humas dan Protokol

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,189,000,000**		**663,386,000**		**390,050,000**		**365,050,000**		**365,050,000**		**365,050,000**		**365,050,000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	Biro Humas dan Protokol
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1,109,000,000	1 Laporan	583,386,000	1 Laporan	310,050,000	1 Laporan	285,050,000	1 Laporan	285,050,000	1 Laporan	285,050,000	1 Laporan	285,050,000	Biro Humas dan Protokol
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,000,000**		**110,000,000**	**100%**	**110,000,000**	**100%**	**110,000,000**		**110,000,000**	**100%**	**110,000,000**		**110,000,000**	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	Biro Humas dan Protokol
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	Biro Humas dan Protokol
Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Peningkatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**30,775,953,000**		**30,263,005,233**		**30,164,914,858**		**30,448,487,974**		**32,414,217,659**		**33,521,780,852**		**36,741,513,382**	
Sub Penyiapan Materi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	2,525,000,000	5 Dokumen	3,645,858,137	5 Dokumen	3,800,000,000	5 Dokumen	3,900,000,000	5 Dokumen	4,000,000,000	5 Dokumen	4,200,000,000	5 Dokumen	4,500,000,000	Biro Humas dan Protokol
Sub Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3,237,000,000	1 Laporan	2,677,696,872	1 Laporan	2,700,000,000	1 Laporan	2,800,000,000	1 Laporan	2,900,000,000	1 Laporan	3,000,000,000	1 Laporan	3,500,000,000	Biro Humas dan Protokol
Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	25,013,953,000	1 Laporan	23,939,450,224	1 Laporan	23,664,914,858	1 Laporan	23,748,487,974	1 Laporan	25,514,217,659	1 Laporan	26,321,780,852	1 Laporan	28,741,513,382	Biro Humas dan Protokol
Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	**Persentase Peningkatan Fasilitasi Keprotokolan**	**8,425,000,000**		**9,000,573,625**		**9,700,000,000**		**10,250,000,000**		**10,500,000,000**		**11,300,000,000**		**11,700,000,000**	
Sub Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	5,200,000,000	1 Laporan	5,280,573,625	1 Laporan	5,500,000,000	1 Laporan	5,800,000,000	1 Laporan	5,900,000,000	1 Laporan	6,500,000,000	1 Laporan	6,600,000,000	Biro Humas dan Protokol
Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	2,725,000,000	1 Laporan	3,000,000,000	1 Laporan	3,500,000,000	1 Laporan	3,700,000,000	1 Laporan	3,800,000,000	1 Laporan	4,000,000,000	1 Laporan	4,300,000,000	Biro Humas dan Protokol
Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	500,000,000	1 Laporan	720,000,000	1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	800,000,000	1 Laporan	800,000,000	1 Laporan	800,000,000	Biro Humas dan Protokol
JUMLAH		**43,449,000,000**		**43,440,964,858**		**43,440,964,858**		**44,754,537,974**		**46,565,267,659**		**49,006,830,852**		**52,156,563,382**	

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun.

Program Prioritas Pembangunan Daerah secara tidak langsung memiliki fungsi yaitu menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah, Mengarahkan program/kegiatan di Organisasi Perintahan Daerah agar terintegrasi dan fokus serta Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung ke masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 12 Program Strategis sebagai landasan utama pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Adapun 12 Program Strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Berobat Grtais Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
4. Pendidikan Yang Berkeadilan
5. Infrastruktur Tuntas Merata
6. Sumsel Interkoneksi
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel

8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
9. Sumsel Wonderful 2030
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
12. Revitalisasi Pasar Tradisional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan sebagimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program-program prioritas daerah yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi menyeluruh. Dari 12 Program Strategis Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan tiga program utama yaitu :

1. Sumsel Berintegritas dan Melayani;
2. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya;dan
3. 100.000 Sultan Muda Sumsel

Secara rinci Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait di kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah disajikan pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	*2*	*3*	*3*	
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance(Responsive dan melayani	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance(Responsive dan melayani	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Biro Hukum dan HAM
			Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum dan HAM
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaiana Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum dan HAM
	Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya	Melanjutkan Program Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK)	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
	100.000 Sultan Muda Sumsel	Memberikan bantuan dan memfasilitasi Moda Usaha dengan StartUp dan UMKM yang menggandeng Perbankan dan BUMN/BUMD	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatnya Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Good and Clean Governance, Responsive dan Melayani)	1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Biro Adm. Pembangunan
			2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Biro Adm. Pembangunan
			3. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Adm. Pembangunan
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan meningkatkan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih Good and Governance (Responsive dan Melayani)	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan barang dan Jasa
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan barang dan Jasa
	SUMSEL BERINTEGRITAS DAN MELAYANI	Menciptakan Pemerintahan yang bersih (good dan clean governance)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Organisasi
			1. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Biro Organisasi
			Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
			2. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
			3. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
			4. Sub-Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Biro Organisasi
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih Good and Clean Governance (Responsive dan Melayani)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Biro Umum dan Perlengkapan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Umum dan Perlengkapan
	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (Good and clean Governance(Responsive dan melayani	Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	

4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi; 2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama; 3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan; 4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses; 5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; 6. Efektif, data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yag mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah).

Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut : a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah); b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); c. Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dirancang untuk mencerminkan kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (2029) dapat dicapai. Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, indikator kinerja daerah dibagi atas tiga

aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dari ketiga aspek tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan fokus pada pelaksanaan indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi Penunjang urusan pemerintahan. Penunjang urusan Pemerintahan dimaksud terdiri atas penelitian dan pengembangan. Adapun capaian dari setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini :

Dengan capaian IKU ini, Sekretariat Daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan langsung dalam mengawal keberhasilan RPJMD 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75-76)	BB (76-77)	BB (77-78)	BB (78-79)	BB (79-80)	BB (80-81)	

4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Indikator Kinerja Kunci disusun untuk masing-masing urusan pemerintahan dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Setiap indikator dirancang secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kebermanfaatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci dirumuskan untuk setiap urusan pemerintahan dan mencerminkan capaian hasil yang diharapkan dari kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.

Dalam periode perencanaan tahun 2026–2030, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator kinerja kunci yang mencerminkan fungsi strategis dalam mendukung koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengendalian pembangunan daerah. Setiap indikator dirancang dengan target capaian tahunan yang realistis, progresif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Bisa dilihat pada tabel 4.6 berikut dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Jumlah	26	31	36	41	46	51	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	3,4 (Tinggi)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum dan HAM
3	Meningkatnya Peringkat STQ/MTQ	Besar	10	10	10	10	10	10	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebjakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BIRO PEREKONOMIAN
5	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	Biro Administrasi Pembangunan
6	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	Level 3	Level 3	Level 3 Pusat Keunggulan Pengadaan	Level 3 Pusat Keunggulan Pengadaan	Level 4	Level 4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	54%	55%	56%	57%	58%	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	25%	26%	27%	28%	30%	35%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
9	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
10	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
11	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
12	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	30	37	40	42	45	46	Biro Organisasi
13	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan
14	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Biro Humas dan Protokol

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis ini Adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sehingga tidak sama dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2025-2030. Dan juga dengan mempertimbangkan hasil kajian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Sasaran, Program, dan kegiatan Pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen Bersama Adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah. Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Selatan.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (Prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan, September 2025
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto

EDWARD CANDRA, MH